



BANK INDONESIA

# Laporan Perekonomian Provinsi Riau

AGUSTUS 2026



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI RIAU





Laporan Perekonomian  
**Provinsi Riau**

AGUSTUS 2026



BANK INDONESIA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Riau

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)





Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju

## Misi

- 1 Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 3 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 4 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
- 5 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
- 6 Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
- 7 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.



# Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia



Kejujuran dan integritas (*trust & integrity*)



Profesionalisme (*professionalism*)



Keunggulan (*excellence*)



Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai

“  
duduk di rumah memegang amanah  
duduk di tanah memegang petuah  
duduk di kampung menjadi payung  
duduk di banjar bertunjuk ajar  
duduk di ladang tenggang menenggang  
duduk di negeri tahukan diri  
duduk di dusun ia penyantun  
duduk beramai elok perangai

apa tanda melayu bertuah  
tahu berguru pada yang sudah  
tahu berbuat pada yang ada  
tahu memandang jauh ke muka  
apa tanda melayu terbilang  
dada lapang pandangan panjang

“





# Kata Pengantar



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI (LPP) RIAU ini merupakan kajian triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 dengan penekanan pada kondisi ekonomi makro regional antara lain: Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Asesmen Inflasi Daerah, Asesmen Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM, Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta Prospek Perekonomian Daerah tahun 2026 berdasarkan indikator

terkini. Analisis dilakukan berdasarkan data bulanan bank umum, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, hasil survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, data perekonomian dan ketenagakerjaan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data pendukung yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dan instansi/lembaga lainnya, termasuk informasi anekdotal terkait.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 15 September 2026  
Kepala Kantor Perwakilan  
Bank Indonesia Provinsi Riau

Dr. Panji Achmad  
Direktur



# Daftar Isi

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar                                                                                                                                | v   |
| Daftar Isi                                                                                                                                    | vi  |
| Daftar Tabel                                                                                                                                  | ix  |
| Daftar Grafik                                                                                                                                 | x   |
| Tabel Indikator Ekonomi Terpilih                                                                                                              | xii |
| Ringkasan Eksekutif                                                                                                                           | xv  |
| <br>                                                                                                                                          |     |
| <b>Bab 1</b><br>Perkembangan Ekonomi<br>Makro Daerah                                                                                          |     |
| 1. Kondisi Umum                                                                                                                               | 02  |
| 2. PDRB Sisi Penggunaan                                                                                                                       | 03  |
| 2.1. Konsumsi                                                                                                                                 | 03  |
| 2.2. Investasi (PMTB)                                                                                                                         | 04  |
| 2.3. Ekspor dan Impor                                                                                                                         | 05  |
| 2.3.1. Ekspor Luar Negeri                                                                                                                     | 05  |
| 2.3.2. Impor Luar Negeri                                                                                                                      | 06  |
| 2.3.3. Net Ekspor Antardaerah                                                                                                                 | 06  |
| 3. PDRB Lapangan Usaha                                                                                                                        | 07  |
| 3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                                                                                       | 07  |
| 3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian                                                                                               | 08  |
| 3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan                                                                                                       | 09  |
| 3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran,<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor                                                          | 09  |
| 3.5. Lapangan Usaha Konstruksi                                                                                                                | 10  |
| <br>                                                                                                                                          |     |
| <b>Boks 1</b><br><i>The 2nd Riau Economic Forum</i> sebagai Wadah Kolaborasi Strategis Memperkuat<br>Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Riau | 11  |
| <br>                                                                                                                                          |     |
| <b>Bab 2</b><br>Perkembangan<br>Inflasi Daerah                                                                                                |     |
| 1. Kondisi Umum                                                                                                                               | 16  |
| 2. Perkembangan Inflasi Riau                                                                                                                  | 16  |
| 2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran                                                                                            | 18  |
| 2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau                                                                                                            | 20  |
| 3. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2026                                                                                                  | 22  |
| 4. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah                                                                                                          | 23  |



### Bab 3

#### Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Perkembangan Kinerja Perbankan Riau                 | 28 |
| 1.1. Pembiayaan Korporasi                              | 29 |
| 1.2. Pembiayaan Rumah Tangga                           | 30 |
| 1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum                 | 31 |
| 1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum  | 32 |
| 2. Total Aset Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)              | 33 |
| 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset                     | 33 |
| 2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) | 33 |
| 3. Perkembangan Kinerja Perbankan Secara Spasial       | 34 |
| 3.1. Penyaluran Kredit Spasial                         | 34 |
| 4. Perkembangan Perbankan Syariah                      | 35 |
| 5. Perkembangan Akses Keuangan Dan UMKM                | 36 |

### Boks 2

#### Karya Riau Bertuah 2026: Mendorong UMKM Naik Kelas dan Memperkuat Ekonomi Daerah

38

### Bab 4

#### Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Kondisi Umum                                                                                  | 42 |
| 2. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai                                                          | 42 |
| 2.1. Aliran Uang Masuk ke ( <i>Inflow</i> ) dan Keluar dari<br>( <i>Outflow</i> ) Bank Indonesia | 42 |
| 2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar                                                           | 43 |
| 2.3. Temuan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya                                               | 44 |
| 3. Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai                                                      | 44 |
| 3.1. Transaksi SKNBI                                                                             | 44 |
| 3.2. Transaksi BI-RTGS                                                                           | 45 |
| 3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)                                          | 45 |
| 3.4. Transaksi Uang Elektronik                                                                   | 46 |
| 3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non-tunai                                                     | 47 |
| 3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)                                               | 48 |

### Boks 3

#### TAMASYA QRIS: Hobinya Banyak, QRIS-nya Satu!

50



## Bab 5 Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Daerah

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Gambaran Umum                                | 56 |
| 2. Kondisi Ketenagakerjaan Daerah               | 56 |
| 3. Kondisi Kesejahteraan Daerah                 | 59 |
| 3.1. Kemiskinan                                 | 59 |
| 3.2. Garis Kemiskinan                           | 60 |
| 3.3. Tingkat Ketimpangan ( <i>Rasio Gini</i> )  | 61 |
| 3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan | 61 |

## Bab 6 Prospek Perekonomian Daerah

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Prospek Ekonomi Global 2026                                          | 66 |
| 2. Prospek Ekonomi Regional 2026                                        | 68 |
| 2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2026                     | 68 |
| 2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau<br>Sisi Permintaan     | 69 |
| 2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau<br>Sisi Lapangan Usaha | 70 |
| 2.2. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2026                                 | 72 |
| 3. Risiko                                                               | 73 |

## Daftar Istilah

76



# Daftar Tabel

|            |                                                                                              |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. | Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (% yoy) .....                                       | 2  |
| Tabel 1.2. | Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha (% yoy) .....                                   | 8  |
| Tabel 2.1. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan (% andil yoy) .....                       | 18 |
| Tabel 2.2. | Perkembangan Inflasi Spasial Riau (% yoy) .....                                              | 21 |
| Tabel 2.3. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Triwulan II 2026 (% andil yoy) ..... | 21 |
| Tabel 2.4. | Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Triwulan II 2026 (% yoy) .....        | 21 |
| Tabel 2.5. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Agustus 2026 (% andil yoy) .....             | 23 |
| Tabel 3.1. | Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha (Rp Triliun).....                                | 30 |
| Tabel 3.2. | Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial.....                                              | 35 |
| Tabel 4.1. | Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau.....                                         | 45 |
| Tabel 4.2. | Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau .....                                             | 47 |
| Tabel 5.1. | Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Riau (Ribuan Orang) .....                    | 57 |
| Tabel 5.2. | Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ribuan Orang) .....       | 58 |
| Tabel 5.3. | Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .....                                      | 58 |
| Tabel 5.4. | Garis Kemiskinan Provinsi Riau .....                                                         | 60 |
| Tabel 6.1. | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Sejumlah Negara Maju dan Berkembang (% yoy) .....       | 68 |
| Tabel 6.2. | Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia (% yoy).....                                   | 68 |
| Tabel 6.3. | Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Riau Tahun 2026 .....                                   | 75 |

# Daftar Grafik

|             |                                                                            |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.1  | Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, dan Nasional Secara Tahunan (%yoy).... | 2  |
| Grafik 1.2  | DPK Perorangan.....                                                        | 3  |
| Grafik 1.3  | Harga TBS Lokal .....                                                      | 3  |
| Grafik 1.4  | DPK Perorangan.....                                                        | 3  |
| Grafik 1.5  | Pengadaan Semen Riau.....                                                  | 4  |
| Grafik 1.6  | Impor Barang Modal.....                                                    | 4  |
| Grafik 1.7  | PMDN Riau.....                                                             | 4  |
| Grafik 1.8  | PMA Riau.....                                                              | 5  |
| Grafik 1.9  | Ekspor Riau.....                                                           | 5  |
| Grafik 1.10 | Ekspor CPO.....                                                            | 5  |
| Grafik 1.11 | Ekspor <i>Pulp &amp; Paper</i> .....                                       | 6  |
| Grafik 1.12 | Impor Riau.....                                                            | 6  |
| Grafik 1.13 | Impor Bahan Baku.....                                                      | 6  |
| Grafik 1.14 | Impor Barang Konsumsi.....                                                 | 6  |
| Grafik 1.15 | Perkembangan PDRB Net Ekspor AD.....                                       | 7  |
| Grafik 1.16 | Harga TBS Riau.....                                                        | 7  |
| Grafik 1.17 | Kredit Industri <i>Pulp Paper</i> .....                                    | 7  |
| Grafik 1.18 | Kredit Pertambangan.....                                                   | 8  |
| Grafik 1.19 | Harga Minyak.....                                                          | 9  |
| Grafik 1.20 | Kredit Industri Pengolahan.....                                            | 9  |
| Grafik 1.21 | Kredit Perdagangan.....                                                    | 9  |
| Grafik 1.22 | Harga TBS Riau.....                                                        | 10 |
| Grafik 1.23 | Konsumsi Semen.....                                                        | 10 |
| Grafik 1.24 | Kredit Konstruksi.....                                                     | 10 |
| Grafik 2.1  | Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (%yoy).....                         | 16 |
| Grafik 2.2  | Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (%yoy).....     | 17 |
| Grafik 2.3  | Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera (%yoy).....                           | 17 |
| Grafik 2.4  | Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran (%yoy).....                      | 18 |
| Grafik 2.5  | Perkembangan Harga Emas Global.....                                        | 19 |
| Grafik 2.6  | Perkembangan Inflasi Bulanan Riau dan Nasional (%yoy).....                 | 22 |
| Grafik 2.7  | Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK.....                       | 22 |
| Grafik 3.1  | Perkembangan Indikator Perbankan Riau.....                                 | 28 |
| Grafik 3.2  | Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan..... | 29 |
| Grafik 3.3  | Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga.....                                       | 30 |
| Grafik 3.4  | Kredit Multiguna.....                                                      | 30 |
| Grafik 3.5  | Kredit Kendaraan Bermotor.....                                             | 31 |
| Grafik 3.6  | Kredit Perumahan .....                                                     | 31 |
| Grafik 3.7  | Kredit <i>Durable Goods</i> .....                                          | 31 |
| Grafik 3.8  | Suku Bunga Kredit Perbankan Riau.....                                      | 32 |
| Grafik 3.9  | Suku Bunga DPK Perbankan Riau .....                                        | 32 |



|             |                                                                            |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 3.10 | Perkembangan NPL Kredit Perbankan Riau.....                                | 32 |
| Grafik 3.11 | Perkembangan Aset Perbankan Riau.....                                      | 33 |
| Grafik 3.12 | Perkembangan DPK Perbankan Riau.....                                       | 33 |
| Grafik 3.13 | DPK Berdasarkan Kepemilikan.....                                           | 33 |
| Grafik 3.14 | DPK Perorangan per Kelompok Nominal.....                                   | 34 |
| Grafik 3.15 | Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan..... | 35 |
| Grafik 3.16 | Perkembangan Aset Perbankan Syariah.....                                   | 36 |
| Grafik 3.17 | Perkembangan DPK Perbankan Syariah.....                                    | 36 |
| Grafik 3.18 | Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM.....                              | 36 |
| Grafik 3.19 | Perkembangan NPL Kredit UMKM.....                                          | 37 |
|             |                                                                            |    |
| Grafik 4.1  | Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan.....                                    | 42 |
| Grafik 4.2  | Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total <i>Inflow</i> .....                 | 43 |
| Grafik 4.3  | Nominal Penukaran.....                                                     | 43 |
| Grafik 4.4  | Nominal Kas Titipan.....                                                   | 44 |
| Grafik 4.5  | Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau.....           | 44 |
| Grafik 4.6  | Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau.....               | 44 |
| Grafik 4.7  | Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau.....                    | 45 |
| Grafik 4.8  | Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau.....                   | 45 |
| Grafik 4.9  | Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debet di Riau.....                     | 46 |
| Grafik 4.10 | Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debet di Riau.....                    | 46 |
| Grafik 4.11 | Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau.....                    | 46 |
| Grafik 4.12 | Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau.....                               | 47 |
| Grafik 4.13 | Perkembangan <i>Merchant QRIS</i> di Riau.....                             | 47 |
| Grafik 4.14 | Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau.....          | 48 |
| Grafik 4.15 | Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau.....          | 48 |
|             |                                                                            |    |
| Grafik 5.1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau.....               | 56 |
| Grafik 5.2  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera.....        | 57 |
| Grafik 5.3  | Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau .....                      | 57 |
| Grafik 5.4  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera .....              | 57 |
| Grafik 5.5  | Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau.....     | 57 |
| Grafik 5.6  | Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....     | 59 |
| Grafik 5.7  | Perkembangan Penduduk Miskin Riau.....                                     | 59 |
| Grafik 5.8  | Sebaran Penduduk Miskin Riau.....                                          | 59 |
| Grafik 5.9  | Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....                             | 61 |
| Grafik 5.10 | Perkembangan Gini Ratio.....                                               | 61 |
| Grafik 5.11 | Perkembangan Nilai Tukar Petani.....                                       | 62 |
|             |                                                                            |    |
| Grafik 6.1  | Perkembangan Inflasi Global.....                                           | 66 |
| Grafik 6.2  | Harga Komoditas Global.....                                                | 67 |
| Grafik 6.3  | Harga Komoditas Unggualan.....                                             | 67 |
| Grafik 6.4  | Ekspektasi Inflasi.....                                                    | 72 |



# Tabel Indikator Ekonomi Terpilih

## A. Inflasi dan PDRB

| INDIKATOR                                 | 2025        |             |             |             | 2025          | 2026        |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                                           | I           | II          | III         | IV          |               | I           | II          |
| Laju Inflasi Tahunan (%yoy) :             |             |             |             |             |               |             |             |
| - Provinsi Riau                           | 0,68        | 0,98        | 5,08        | 4,88        | 4,88          | 3,65        | 4,55        |
| - Kota Pekanbaru                          | 0,90        | 1,08        | 4,63        | 4,83        | 4,83          | 3,80        | 4,43        |
| - Kota Dumai                              | 1,03        | 1,11        | 4,94        | 4,24        | 4,24          | 3,71        | 4,30        |
| - Kota Tembilahan                         | 2,91        | 2,19        | 6,34        | 6,17        | 6,17          | 4,71        | 4,38        |
| - Kabupaten Kampar                        | (0,16)      | 0,57        | 4,68        | 5,01        | 5,01          | 3,23        | 4,90        |
|                                           |             |             |             |             |               |             |             |
| PDRB – ADHB (Rp Juta)                     | 293.409.835 | 293.048.130 | 307.013.745 | 307.557.428 | 1.201.383.763 | 317.139.365 | 340.342.987 |
| PDRB – ADHK (Rp Juta)                     | 145.335.676 | 147.545.761 | 152.771.601 | 152.957.412 | 598.610.451   | 152.447.946 | 154.554.503 |
|                                           |             |             |             |             |               |             |             |
| Pertumbuhan PDRB (%yoy)                   | 4,65        | 4,59        | 4,98        | 4,94        | 4,79          | 4,89        | 4,75        |
| Penggunaan                                |             |             |             |             |               |             |             |
| - Konsumsi RT                             | 4,86        | 4,69        | 4,73        | 4,59        | 4,72          | 4,93        | 4,60        |
| - Konsumsi Pemerintah                     | 4,06        | (9,33)      | 2,50        | (0,41)      | (0,88)        | 18,36       | 13,08       |
| - PMTB                                    | 1,17        | 2,47        | 2,15        | 3,25        | 2,43          | 9,95        | 10,30       |
| - Ekspor LN                               | 14,98       | 12,77       | 19,94       | 2,74        | 11,86         | 1,97        | 0,74        |
| - Impor LN                                | (10,22)     | 1,63        | (13,75)     | (8,72)      | (8,38)        | 66,31       | 60,17       |
| Lapangan Usaha                            |             |             |             |             |               |             |             |
| - Pertanian                               | 5,15        | 4,38        | 5,39        | 4,66        | 4,90          | 4,48        | 5,31        |
| - Pertambangan & Penggalian               | 0,44        | (0,10)      | 0,27        | (0,15)      | 0,12          | (0,29)      | (0,56)      |
| - Industri Pengolahan                     | 5,23        | 6,63        | 7,17        | 6,49        | 6,39          | 5,56        | 4,59        |
| - Konstruksi                              | 5,19        | 4,95        | 3,36        | 6,69        | 5,03          | 7,32        | 8,95        |
| - Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi | 6,13        | 5,94        | 4,59        | 4,34        | 5,25          | 6,86        | 5,42        |
|                                           |             |             |             |             |               |             |             |
| Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)         | 4.808,84    | 4.678,53    | 5.468,87    | 5.560,54    | 20.516,78     | 5.095,46    | 5.093,38    |
| Volume Ekspor Non Migas (ribu Ton)        | 5.849,43    | 5.894,18    | 7.538,79    | 6.557,06    | 25.839,46     | 6.081,16    | 5.699,47    |
|                                           |             |             |             |             |               |             |             |
| Nilai Impor Non Migas (Juta USD)          | 351,44      | 414,56      | 260,39      | 333,84      | 1.360,23      | 872,14      | 963,10      |
| Volume Impor Non Migas (ribu Ton)         | 1.360,78    | 1.450,06    | 1.213,10    | 1.491,71    | 5.515,65      | 1.669,96    | 1.973,49    |



## B. Perbankan

| INDIKATOR                             | 2025        |             |             |             | 2025        | 2026        |                |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                                       | I           | II          | III         | IV          |             | I           | II             |
| Bank Umum                             |             |             |             |             |             |             |                |
| Total Aset (dalam Rp Juta)            | 157.288.004 | 158.684.719 | 162.347.697 | 163.363.821 | 163.363.821 | 159.861.464 | 165.073.005    |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan DPK (%yoy)                | 5,22        | 3,90        | 5,96        | 5,73        | 5,73        | 4,30        | 3,47           |
| DPK (dalam Rp Juta)                   | 127.300.940 | 129.958.149 | 134.943.523 | 134.412.671 | 134.412.671 | 133.596.468 | 135.242.153    |
| – Giro                                | 22.694.936  | 24.146.148  | 27.621.798  | 23.934.612  | 23.934.612  | 26.175.893  | 25.378.420     |
| – Tabungan                            | 70.832.182  | 71.960.109  | 73.811.149  | 76.632.713  | 76.632.713  | 76.724.975  | 78.094.268     |
| – Deposito                            | 33.773.822  | 33.851.892  | 33.510.577  | 33.845.345  | 33.845.345  | 30.695.601  | 31.769.465     |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan Kredit Lok. Proyek (%yoy) | 4,75        | 8,66        | 15,85       | 13,34       | 13,34       | 10,15       | 9,73           |
| Kredit Lokasi Proyek (dalam Rp Juta)  | 157.506.258 | 167.875.608 | 172.317.127 | 174.132.660 | 174.132.660 | 174.768.075 | 184.213.612    |
| – Modal Kerja                         | 54.665.594  | 60.764.215  | 63.470.960  | 65.541.109  | 65.541.109  | 65.591.542  | 73.977.653     |
| – Investasi                           | 56.897.440  | 60.655.602  | 61.630.263  | 60.592.148  | 60.592.148  | 60.565.765  | 61.281.068     |
| – Konsumsi                            | 45.943.224  | 46.455.790  | 47.215.904  | 47.999.403  | 47.999.403  | 48.610.768  | 48.954.891     |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan Kredit Lok. Bank (%yoy)   | 8,89        | 7,92        | 5,76        | 5,91        | 5,91        | 7,76        | 8,71           |
| Kredit Lokasi Bank (dalam Rp Juta)    | 102.281.315 | 103.261.929 | 104.331.623 | 107.456.253 | 107.456.253 | 110.216.493 | 112.254.836    |
| – Modal Kerja                         | 29.092.583  | 28.637.023  | 28.407.921  | 30.085.372  | 30.085.372  | 29.547.394  | 30.368.281     |
| – Investasi                           | 33.999.608  | 35.139.615  | 35.888.027  | 36.495.590  | 36.495.590  | 39.638.552  | 40.360.139     |
| – Konsumsi                            | 39.189.124  | 39.485.291  | 40.035.675  | 40.875.291  | 40.875.291  | 41.030.547  | 41.526.415     |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| – LDR (%)                             | 80,35       | 79,46       | 78,11       | 79,95       | 79,95       | 82,50       | 83,00          |
| – NPL (%)                             | 1,70        | 1,62        | 1,55        | 1,49        | 1,49        | 1,63        | 1,49           |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)        | 4,50        | 4,64        | 2,13        | 1,28        | 1,28        | 8,38        | 10,08          |
| Kredit UMKM (dalam Rp Juta)           | 40.241.659  | 40.870.748  | 40.863.163  | 40.916.955  | 40.916.955  | 43.612.626  | 44.990.987     |
| – Mikro                               | 19.581.172  | 19.453.423  | 19.276.318  | 19.381.146  | 19.381.146  | 22.761.030  | 22.964.767     |
| – Kecil                               | 15.252.751  | 15.730.046  | 15.970.943  | 15.991.985  | 15.991.985  | 14.733.253  | 15.302.893     |
| – Menengah                            | 5.407.736   | 5.687.279   | 5.615.902   | 5.543.824   | 5.543.824   | 6.118.343   | 6.723.327      |
| NPL UMKM (%)                          | 3,03        | 3,02        | 2,83        | 2,69        | 2,69        | 2,93        | 2,66           |
| Bank Syariah                          |             |             |             |             |             |             |                |
| Total Aset (dalam Rp Juta)            | 42.616.827  | 43.163.976  | 43.535.722  | 44.386.788  | 44.386.788  | 44.386.788  | 43.827.065     |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan DPK (%yoy)                | -4,06       | 5,07        | 7,92        | 3,94        | 3,94        | 2,62        | -1,79          |
| DPK (dalam Rp Juta)                   | 25.263.534  | 26.822.878  | 27.939.204  | 26.574.424  | 26.574.424  | 25.924.385  | 26.343.327.734 |
| – Giro                                | 3.764.898   | 5.067.422   | 5.671.464   | 3.232.332   | 3.232.332   | 4.341.098   | 4.923.237.524  |
| – Tabungan                            | 12.493.009  | 12.147.468  | 12.596.746  | 13.532.523  | 13.532.523  | 12.991.725  | 13.076.140.924 |
| – Deposito                            | 9.005.627   | 9.607.988   | 9.670.994   | 9.809.568   | 9.809.568   | 8.591.562   | 8.343.949.287  |
|                                       |             |             |             |             |             |             |                |
| Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)         | 8,59        | 7,30        | 5,14        | 5,14        | 5,14        | 4,48        | 12,40          |
| Pembiayaan (dalam Rp Juta)            | 27.007.751  | 27.140.637  | 27.359.427  | 28.156.121  | 28.156.121  | 28.216.887  | 30.505.813     |
| – Modal Kerja                         | 2.331.438   | 2.239.708   | 2.145.311   | 2.284.016   | 2.284.016   | 3.337.439   | 3.579.864      |
| – Investasi                           | 5.417.485   | 5.428.187   | 5.438.414   | 5.606.284   | 5.606.284   | 5.388.876   | 5.965.300      |
| – Konsumsi                            | 19.258.828  | 19.472.742  | 19.775.702  | 20.265.821  | 20.265.821  | 19.490.572  | 20.960.650     |

## C. Sistem Pembayaran

| INDIKATOR                                              | 2025        |           |             |             | 2025         | 2026      |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                        | I           | II        | III         | IV          |              | I         | II        |
| Posisi Kas Gabungan (dalam Rp Juta)                    | (3.138.657) | (860.366) | (4.519.628) | (6.996.318) | (15.514.968) | (75.892)  | (806.630) |
| Inflow (dalam Rp Juta)                                 | 2.104.683   | 2.482.847 | 674.180     | 423.840     | 5.685.551    | 1.314.151 | 449.814   |
| Outflow (dalam Rp Juta)                                | 5.243.340   | 3.343.213 | 5.193.808   | 7.420.158   | 21.200.519   | 1.390.042 | 1.256.444 |
| Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)                 | 72.576      | 110.709   | 2.164.941   | 1.112.563   | 3.460.790    | 188.667   | 170.536   |
| Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar *)                   | 43.607      | 41.318    | 46.684      | 47.767      | 179.376      | 52.049    | 50.485    |
| Volume Transaksi RTGS (lembar *)                       | 15.360      | 16.334    | 19.419      | 20.002      | 71.115       | 17.816    | 19.473    |
| Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)    | 715         | 677       | 765         | 783         | 735          | 740       | 756       |
| Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)        | 252         | 268       | 318         | 328         | 291          | 301       | 310       |
| Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar)                  | 2.104       | 2.079     | 2.221       | 2.151       | 8.555        | 2.151     | 716       |
| Volume Transaksi Kliring (lembar)                      | 42.856      | 44.835    | 45.340      | 44.548      | 177.579      | 44.549    | 13.781    |
| Rata-rata Harian Nominal Transaksi Kliring (Rp miliar) | 34          | 34        | 36          | 35          | 35           | 35        | 35        |
| Rata-rata Harian Volume Transaksi Kliring (lembar)     | 703         | 735       | 743         | 730         | 728          | 734       | 734       |

## D. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

| INDIKATOR                          | 2025    |         |         |         | 2025   | 2026    |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|                                    | Feb/Mar | Feb/Mar | Agt/Sep | Agt/Sep |        | Feb/Mar | Feb/Mar |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 460,96  | 460,96  | 460,96  | 475,57  | 475,57 | 475,75  | 470,80  |
| Persentase Penduduk Miskin (%)     | 6,16    | 6,16    | 6,16    | 6,30    | 6,30   | 6,30    | 6,19    |
| Gini Rasio                         | 0,31    | 0,31    | 0,31    | 0,30    | 0,30   | 0,30    | 0,30    |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,12    | 4,12    | 4,16    | 4,06    | 4,06   | 4,09    | 4,09    |



# Ringkasan Eksekutif

## LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

AGUSTUS 2026

*Perekonomian Riau  
pada TW-II 2026  
tumbuh sebesar 4,75%  
(yoy), lebih rendah  
dibandingkan TW-I  
2026 sebesar 4,89%  
(yoy).*

### I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

- Perekonomian Riau pada triwulan II 2026 melandai dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,89% (yoy), didorong oleh penurunan kinerja Ekspor Luar Negeri. Pelambatan tersebut sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan menjadi 5,29% (yoy), dari 5,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, Provinsi Riau pada triwulan II 2026 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam secara Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.
- Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 disebabkan oleh penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor Luar Negeri. Konsumsi RT melambat seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat menabung dibandingkan mengkonsumsi, terindikasi dari akselerasi pertumbuhan DPK Perseorangan. Kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati tercatat melandai menjadi -0,48% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,45% (yoy).
- Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 disebabkan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalan yang masih berada dalam zona kontraktif meskipun telah membaik dibandingkan triwulan I 2026. Pada triwulan II 2026, LU Pertambangan dan Penggalan tercatat berkontraksi 0,59% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang berkontraksi 2,41% (yoy). Membaiknya LU Pertambangan dan Penggalan sejalan dengan telah selesainya masa perbaikan pipa gas milih PT. Bumi Siak Pusako serta didukung dengan harga minyak pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US\$95,15 per *barrel*, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang berada pada US\$74,11 per *barrel*. Di sisi lain, penurunan struktural akibat *natural declining* migas sekitar 8–12% per tahun terus berlanjut yang berdampak kepada tertahannya kinerja LU Pertambangan yang lebih tinggi.



*Tekanan inflasi di Riau pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,55% (yoy) meningkat dari triwulan I sebesar 3,65% (yoy).*

## II. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Pada triwulan II 2026 inflasi Riau tercatat sebesar 4,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,65% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai merah, serta Kelompok Transportasi, terutama komoditas bensin. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh meredanya inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Secara spasial, tiga wilayah IHK mencatatkan peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai, sementara Tembilahan mencatatkan penurunan inflasi. Dengan sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang semakin solid inflasi Riau diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$ .
- Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, realisasi serta perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), optimalisasi peran BUMD Pangan, serta ekspektasi inflasi yang terjaga, diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2026.

## III. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

*Kinerja intermediasi perbankan di Riau pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif.*

- Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau tetap tumbuh positif, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif. Meskipun demikian, penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat sedikit mengalami pelambatan pada triwulan II 2026 namun diiringi oleh kemampuan bayar korporasi yang lebih baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit kepada Rumah Tangga (RT) terpantau tumbuh melambat.
- Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, tercermin dari *Loan-to-Deposit Ratio* perbankan Riau pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 83,00%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 82,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.



#### IV. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

*Perkembangan transaksi pembayaran tunai dan non-tunai (BI-RTGS & UE) menunjukkan tren peningkatan pada triwulan II 2026.*

- Pada triwulan II 2026, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari meningkatnya tekanan *net-outflow* uang kartal. Pergerakan *inflow* (uang masuk) dan *outflow* (uang keluar) di Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat *net-outflow* sebesar Rp806,63 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net-outflow* sebesar Rp75,89 miliar.
- Hal ini sejalan dengan, transaksi nontunai di Riau pada triwulan II 2026 tercatat menunjukkan kinerja yang meningkat, berdasarkan data dari transaksi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), dan Uang Elektronik (UE). Nominal transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan sebesar 22,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,36% (yoy). Lebih lanjut, nominal transaksi melalui UE juga menunjukkan peningkatan, terutama pada klasifikasi nominal belanja, yaitu penggunaan UE yang tercatat tumbuh positif sebesar 41% (yoy) pada triwulan II 2026.

#### V. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

*Kesejahteraan masyarakat Riau mulai menunjukkan perbaikan sebagaimana tercermin pada penurunan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).*

- Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2026 mulai menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sejalan dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan sektor lapangan usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor unggulan Riau seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.
- Sementara itu, indikator kemiskinan Provinsi Riau tercatat mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2026 yang tercatat menurun menjadi 6,19% dari 6,30% pada September 2025. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2026 tercatat masih cukup baik, yaitu dari 193,69, meskipun menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 197,48. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada seluruh subsektor unggulan Riau seperti tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.



*Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh solid pada kisaran 4,4% - 5,2% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran 2,5%±1%.*

## VI. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- **Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,4 - 5,2% (yoy).** Pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2026 terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi RT, meskipun potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
- **Inflasi Riau pada tahun 2026 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy).** Hal tersebut didukung oleh perkiraan harga komoditas pangan yang berada dalam rentang sasaran, meskipun terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya stabilisasi pasokan komoditas pangan melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir diperkirakan turut mendukung pengendalian inflasi. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 7,74% tahun 2026, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*







# BAB 1

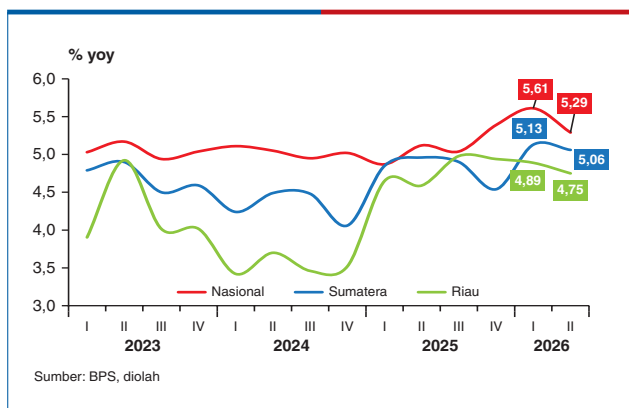
## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

- Perekonomian Riau pada triwulan II 2026 melandai dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,89% (yoy), didorong oleh penurunan kinerja Ekspor Luar Negeri. Pelambatan tersebut sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan menjadi 5,29% (yoy), dari 5,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, Provinsi Riau pada triwulan II 2026 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam secara Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.



## 1. KONDISI UMUM

Perekonomian Riau pada triwulan II 2026 tumbuh meski sedikit melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75% (yoy) atau sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,89% (yoy), dipengaruhi oleh penurunan kinerja Konsumsi RT dan Ekspor. Moderasi tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan II 2026 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Indonesia, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.



**Grafik 1.1.** Pertumbuhan Ekonomi Riau, Sumatera, Nasional Secara Tahunan (% yoy)

Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 disebabkan oleh penurunan konsumsi RT dan kinerja Ekspor Luar Negeri. Konsumsi RT melambat seiring dengan preferensi masyarakat untuk menabung, tercermin dari akselerasi pertumbuhan DPK Perseorangan. Dari sisi ekspor, kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati tercatat melandai menjadi -0,48% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang sebesar 13,45% (yoy).

Namun demikian, akselerasi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menahan pelambatan ekonomi Riau yang lebih rendah. Pada triwulan II 2026, kinerja PMTB tumbuh sebesar 10,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,95% (yoy) yang disebabkan percepatan investasi bangunan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertambangan. Pada triwulan II 2026 LU pertambangan tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,56% (yoy), seiring dengan terjadinya *natural declining* migas sekitar 8–12% per tahun. Hal ini turut didukung oleh peristiwa *turn around* (pemeliharaan mesin) di Dumai selama triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026 kredit pertambangan juga berkontraksi sebesar 17,40% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,59% (yoy).

**Tabel 1.1.** Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (%yoy)

| Komponen Penggunaan                  | Pertumbuhan (% yoy) |        |       |        |       |       |       |       | Kontribusi Pertumbuhan (%yoy) |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      | 2024                | 2025   |       |        |       | 2025  | 2026  |       | 2024                          | 2025  |       |       |       | 2025  | 2026  |       |
|                                      |                     | I      | II    | III    | IV    |       | I     | II    |                               | I     | II    | III   | IV    |       | I     | II    |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 4,78                | 4,86   | 4,69  | 4,73   | 4,59  | 4,72  | 4,93  | 4,60  | 1,65                          | 1,68  | 1,67  | 1,62  | 1,63  | 1,65  | 1,71  | 1,64  |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 13,01               | -1,25  | -0,76 | 3,15   | 2,13  | 0,75  | 6,23  | 7,16  | 0,07                          | -0,01 | 0,00  | 0,02  | 0,01  | 0,00  | 0,04  | 0,04  |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 6,99                | 4,06   | -7,41 | 2,50   | -0,41 | -0,88 | 18,36 | 13,08 | 0,23                          | 0,13  | -0,27 | 0,08  | -0,02 | -0,03 | 0,57  | 0,43  |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 3,25                | 1,17   | 2,47  | 2,15   | 3,25  | 2,43  | 9,95  | 10,30 | 1,01                          | 0,37  | 0,77  | 0,68  | 0,98  | 0,75  | 3,03  | 3,14  |
| 5. Ekspor Luar Negeri                | -4,34               | 14,98  | 12,77 | 19,94  | 2,74  | 11,86 | 1,97  | 0,74  | -1,50                         | 4,62  | 3,92  | 6,11  | 0,99  | 3,79  | 0,67  | 0,24  |
| 6. Impor Luar Negeri                 | -5,57               | -10,22 | 1,63  | -13,75 | -8,72 | -8,38 | 66,31 | 60,17 | -0,36                         | -0,59 | 0,09  | -0,88 | -0,43 | -0,49 | 3,18  | 3,06  |
| 7. Net Ekspor                        | 2,02                | 20,73  | 18,36 | 28,77  | 6,64  | 16,38 | -8,65 | -1,67 | 0,61                          | 6,00  | 5,89  | 6,99  | 2,35  | 5,66  | -3,03 | -0,50 |
| PDRB                                 | 3,52                | 4,65   | 4,59  | 4,98   | 4,94  | 4,79  | 4,89  | 4,75  | 3,52                          | 4,65  | 4,59  | 4,98  | 4,94  | 4,79  | 4,84  | 4,75  |

Sumber : BPS



Pertumbuhan kinerja lapangan usaha yang lebih lambat tertahan oleh akselerasi kinerja LU Konstruksi. Percepatan LU Konstruksi ditengarai dari pengadaan semen di Provinsi Riau yang pada triwulan II 2026 tumbuh 11,21% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,79% (yoy).

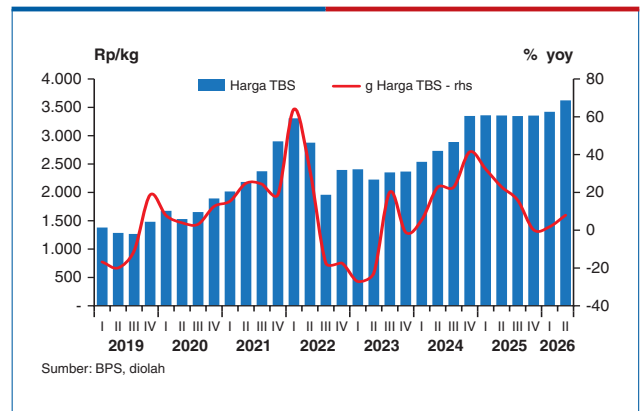
## 2. PDRB SISI PENGGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi Riau yang melandai pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh Konsumsi RT dan Ekspor. Namun demikian, peningkatan PMTB menahan pelambatan yang lebih dalam.

### 2.1. Konsumsi

Konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang lebih landai dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, Konsumsi RT tumbuh 4,60% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,93% (yoy). Penurunan kinerja dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang cenderung menabung, terindikasi dari pertumbuhan DPK Perorangan yang meningkat.

Daya beli masyarakat di Provinsi Riau masih menunjukkan pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan oleh tren harga Tandan Buah Segar (TBS) pada triwulan laporan yang tumbuh lebih tinggi sehingga mendorong peningkatan penerimaan petani di Riau.



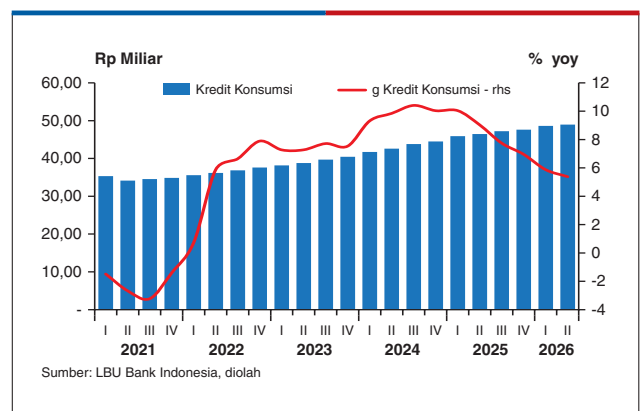
Grafik 1.3. Harga TBS Lokal

Pertumbuhan harga TBS mendorong kenaikan NTP Perkebunan sehingga NTP berada pada 202,43 pada triwulan II 2026. Dari sisi pembiayaan, kinerja kredit konsumsi terus menunjukkan pelambatan, meski masih tumbuh positif sebesar 5,38% (yoy), namun melandai dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,87% (yoy).

Sejalan dengan konsumsi RT, kinerja konsumsi pemerintah juga mengalami pelambatan. Pada triwulan II 2026, konsumsi pemerintah tumbuh 13,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,36% (yoy). Pelambatan konsumsi pemerintah dipengaruhi belanja operasional dalam bentuk penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disalurkan pada triwulan sebelumnya.



Grafik 1.2. Harga TBS Lokal



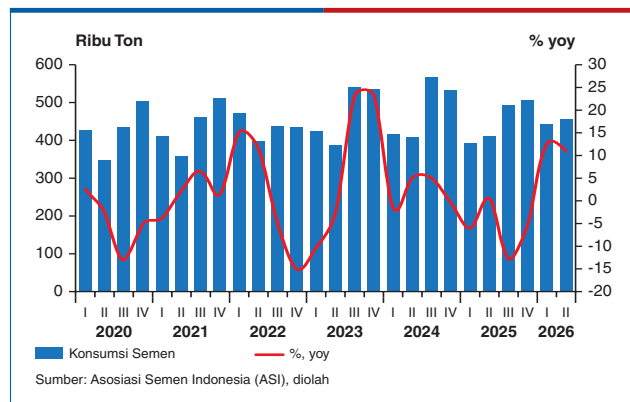
Grafik 1.4. Kredit Konsumsi

Sementara itu, konsumsi LNPR pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 7,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 6,23% (yoy). Hal tersebut terjadi karena peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan yang menguat dari triwulan sebelumnya di tengah semarak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

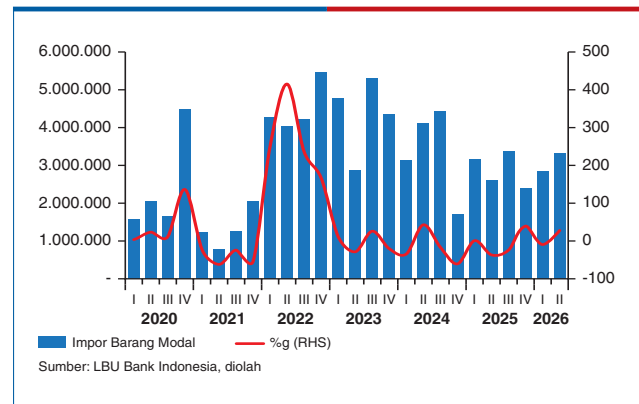
## 2.2. Investasi (PMTB)

Kinerja investasi Riau yang tercermin pada komponen PMTB tumbuh sebesar 10,30% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 9,95% (yoy). Percepatan kinerja investasi terjadi pada kelompok investasi bangunan, seiring proyek pembangunan utama yang selesai. Hal tersebut terindikasi dari pengadaan semen di Provinsi Riau yang pada triwulan II 2026 sebesar 456,26 ribu ton, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 442,82 ribu ton.

Dari sisi investasi nonbangunan, tercatat mengalami peningkatan pada triwulan II 2026. Kenaikan ini ditopang oleh impor barang modal menunjukkan pertumbuhan 27,71% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,97% (yoy). Selain itu, realisasi pembebasan lahan jalan tol juga turut mendukung realisasi investasi.



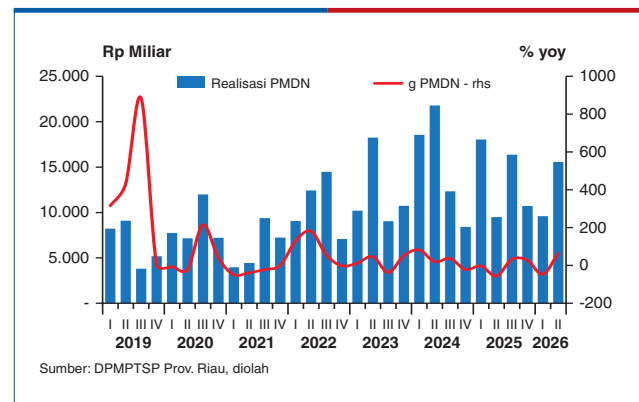
Grafik 1.5. Pengadaan Semen Riau



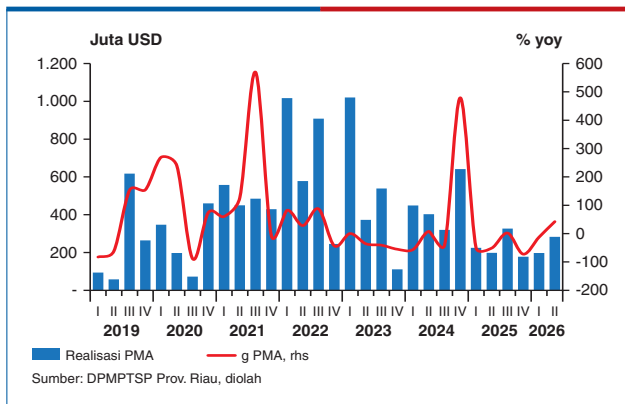
Grafik 1.6. Impor Barang Modal

Pada triwulan II 2026, realisasi penanaman modal di Provinsi Riau tercatat Rp20,23 triliun atau mencapai 45,63% dari target BKPM RI selama tahun 2026. Realisasi secara nominal lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang dikontribusikan oleh kinerja investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat tumbuh akseleratif sebesar 63,88% (yoy), setelah kontraksi 46,77% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Selain itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, menjadi 282,92 juta dollar AS di triwulan II 2026 atau tumbuh 46,90% (yoy), dari sebelumnya 197,01 juta dollar AS atau kontraksi 12,27% (yoy).



Grafik 1.7. PMDN Riau



Grafik 1.8. PMA Riau

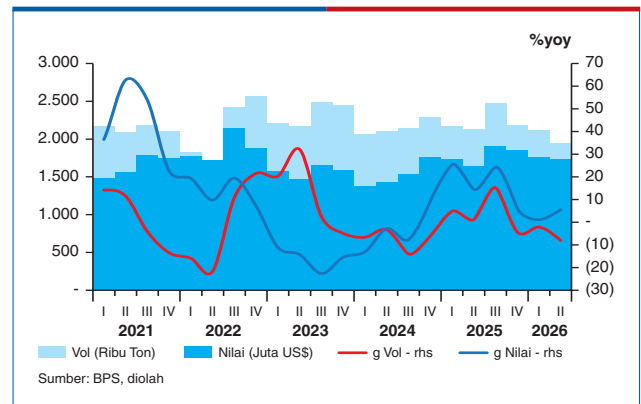
Mengacu pada data realisasi investasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, sektor usaha yang menyumbang capaian realisasi pada triwulan II 2026 adalah sektor Transportasi, Gudang, Telekomunikasi sebesar Rp8,00 triliun atau 39,54%, Kehutanan sebesar Rp3,83 triliun atau 18,93%, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan sebesar Rp2,14 triliun atau 10,57%.

Sementara itu, ditinjau dari negara asalnya, aliran modal asing yang masuk ke Provinsi Riau terutama berasal dari Singapura sebesar US\$145,13 juta, Malaysia sebesar US\$111,41 juta, dan Bermuda sebesar US\$14,20 juta masing-masing dengan pangsa sebesar 51,29%, 39,39%, dan 5,02% dari keseluruhan PMA di Riau.

## 2.3. Ekspor dan Impor

### 2.3.1. Ekspor

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Riau tumbuh melambat pada triwulan II 2026. Berdasarkan data neraca perdagangan yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau, nilai ekspor Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,37% (yoy), melambat dibandingkan 1,49% (yoy) pada triwulan I 2026. Berdasarkan perkembangan volume, ekspor Riau berkontraksi sebesar 7,54% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,54% (yoy). Penurunan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan II 2026

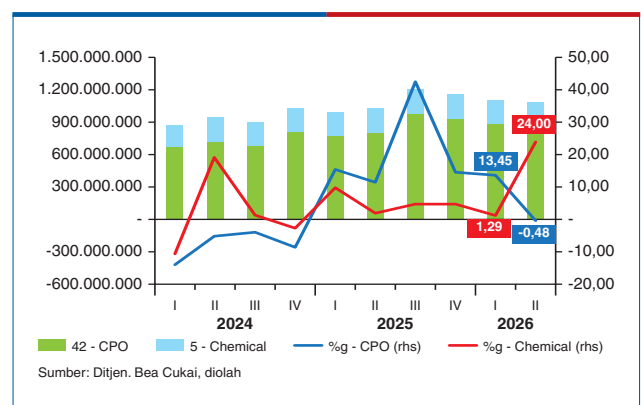


Grafik 1.9. Ekspor Riau

utama disebabkan oleh pelambatan kinerja ekspor kelompok nonmigas.

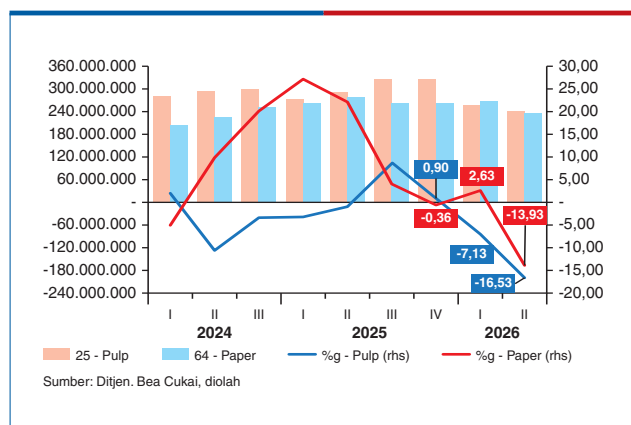
Ditinjau dari komoditasnya, melambatnya ekspor komoditas utama Riau menyebabkan penurunan ekspor luar negeri, seperti lemak dan minyak nabati atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan bubur kayu/*pulp*. Volume ekspor CPO mencatatkan pertumbuhan -0,48% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,45% (yoy), disebabkan oleh penurunan produksi pada triwulan II 2026.

Sejalan dengan komoditas CPO, ekspor komoditas *pulp* juga mengalami penurunan. Volume ekspor *pulp* berkontraksi 16,53% (yoy) pada triwulan II 2026, menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi 7,13% (yoy), ditengarai isu produksi dan ketersediaan bahan baku menahan produksi yang lebih baik.

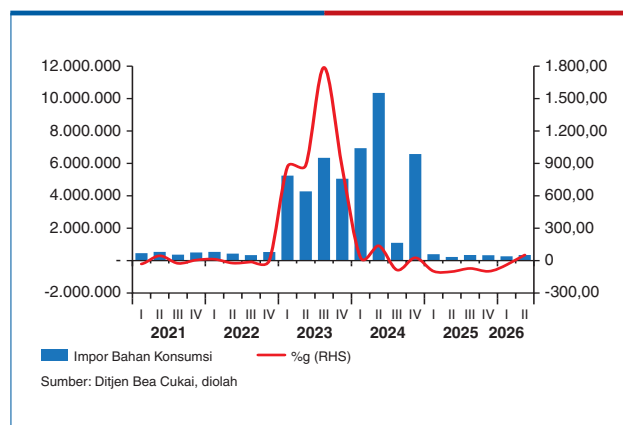


Grafik 1.10. Ekspor CPO





Grafik 1.11. Ekspor Pulp &amp; Paper



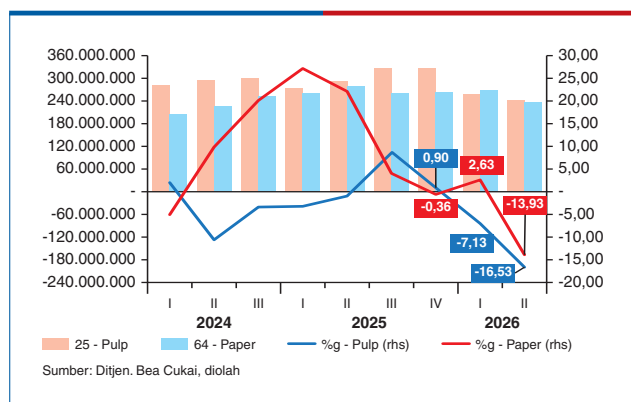
Grafik 1.14. Impor Barang Konsumsi

### 2.3.2. Impor

Sementara itu, kinerja impor mengalami penurunan. Penurunan impor terkonfirmasi dari nilai impor yang tercatat tumbuh 119,90% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 141,25% (yoy). Sementara

secara volume perdagangan impor BPS mencatatkan pertumbuhan 34,28% (yoy) pada triwulan II 2026, dari 24,71% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

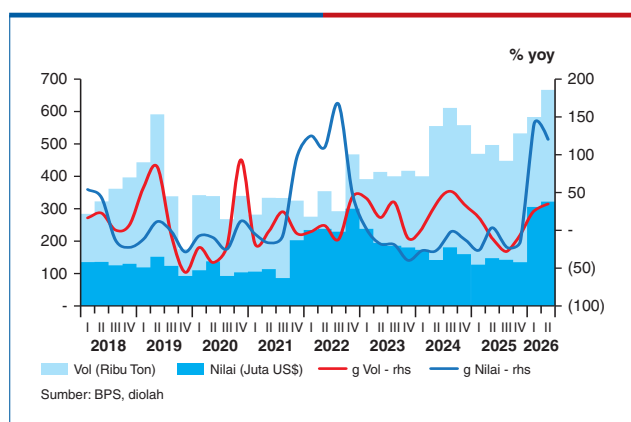
Jika ditinjau dari jenis barangnya, peningkatan volume impor nonmigas terjadi pada seluruh kategori impor. Pada triwulan II 2026, berdasarkan volumenya, impor barang antara tercatat tumbuh 35,03% (yoy) tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,92% (yoy). Selain itu, barang konsumsi tumbuh 55,20% (yoy), lebih baik dari kontraksi triwulan sebelumnya pada 36,57% (yoy). Sejalan dengan itu, impor barang modal tumbuh 27,71% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,97% (yoy).



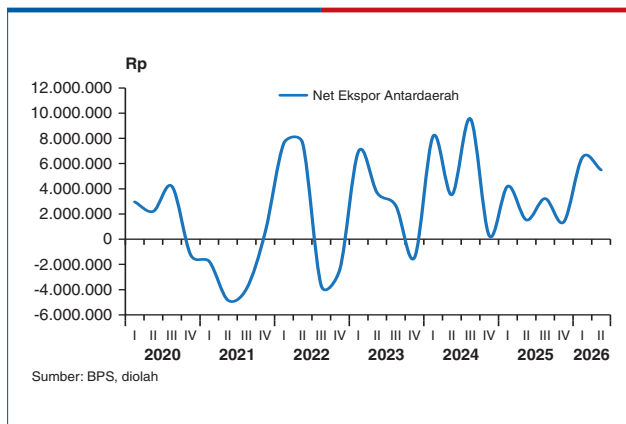
Grafik 1.12. Impor Riau

### 2.3.3. Net Ekspor Antardaerah

Pada triwulan II 2026, nominal PDRB neto ekspor antardaerah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatat surplus sebesar Rp5,49 triliun, atau tumbuh 261,2% (yoy). Peningkatan net ekspor antardaerah didukung oleh peningkatan ekspor antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan atas respons kebijakan B50.



Grafik 1.13. Impor Bahan Baku



Grafik 1.15. Perkembangan PDRB Net Ekspor AD

### 3. PDRB LAPANGAN USAHA

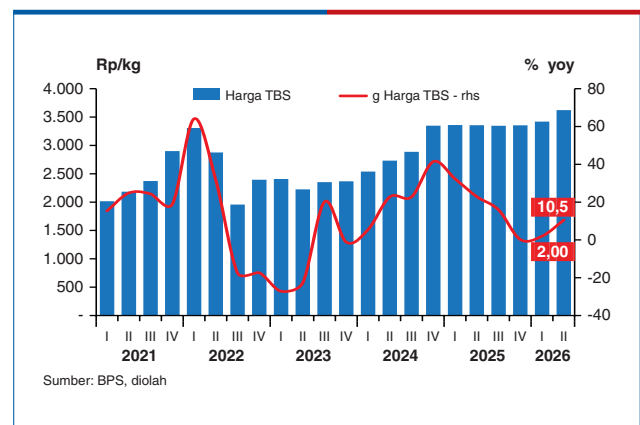
Dari sisi sektoral, melandainya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalan yang dipengaruhi oleh penurunan struktural akibat *natural declining* yang terus berlanjut. Namun demikian, kinerja LU Pertanian dan LU Konstruksi masih menahan pelambatan yang lebih dalam.

#### 3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

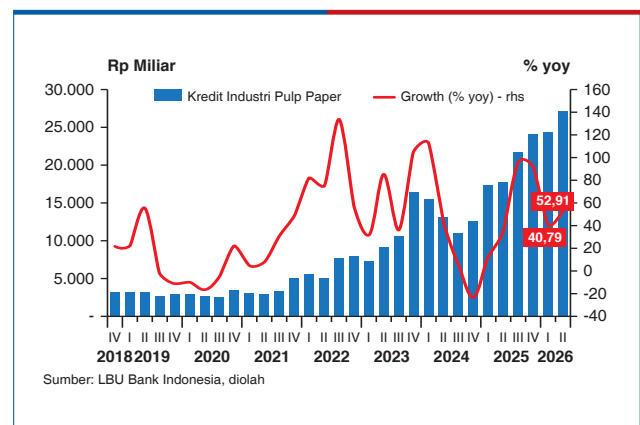
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Riau pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang tumbuh 4,23% (yoy). Peningkatan LU Pertanian dipengaruhi oleh kenaikan harga TBS. Pada triwulan II 2026 harga TBS sebesar Rp3.622 per kg meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu Rp3.420 per kg. Kinerja Industri *Pulp & Paper* sebagai salah satu komoditas utama Riau menunjukkan peningkatan sebesar 52,91% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya yaitu sebesar 40,79% (yoy). Sementara itu, kinerja kredit perkebunan karet Riau pada triwulan II 2026 yang masih berada dalam zona kontraksi sebesar 4,39% (yoy), sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,55% (yoy).

Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian yang lebih tinggi masih tertahan oleh kredit perkebunan sawit yang masih menunjukkan tren penurunan pada triwulan II 2026 sebesar 3,16% (yoy) menurun dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 4,58% (yoy).



Grafik 1.16. Harga TBS Riau

Grafik 1.17. Kredit Industri *Pulp Paper*

**Tabel 1.2.** Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Lapangan Usaha (%yoy)

| Komponen Sektoral                           | Growth (% yoy) |        |        |        |        |         |        |        |         | Kontribusi Pertumbuhan (%pct, yoy) |       |        |        |        |       |        |       |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                             | 2024           | 2025   |        |        |        | 2025    | 2026   |        | 2026    | 2024                               | 2025  |        |        |        | 2025  | 2026   |       | 2026   |
|                                             |                | I      | II     | III    | IV     |         | I      | II     |         |                                    | I     | II     | III    | IV     |       | I      | II    |        |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan         | 2,23%          | 5,15%  | 4,38%  | 5,39%  | 4,66%  | 4,90%   | 4,23%  | 5,31%  | 4,51%   | 0,60%                              | 1,36% | 1,17%  | 1,48%  | 1,23%  | 1,31% | 1,32%  |       | 1,07%  |
| Pertambangan dan Penggalian                 | 0,36%          | 0,44%  | -0,10% | 0,27%  | -0,15% | 0,12%   | -2,41% | -0,56% | -0,29%  | 0,05%                              | 0,06% | -0,01% | 0,04%  | -0,02% | 0,02% | -0,03% |       | -0,04% |
| Industri Pengolahan                         | 3,72%          | 5,23%  | 6,63%  | 7,17%  | 6,49%  | 6,39%   | 6,21%  | 4,59%  | 5,58%   | 1,19%                              | 1,68% | 2,09%  | 2,29%  | 2,10%  | 2,05% | 2,22%  | 1,42% | 1,82%  |
| Pengadaan Listrik, Gas                      | 6,99%          | 15,04% | -0,66% | 3,41%  | 2,79%  | 4,96%   | -4,73  | 1,57%  | 2,94%   | 0,01%                              | 0,01% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  |
| Pengadaan Air                               | 3,71%          | 4,17%  | 7,66%  | 5,91%  | 6,96%  | 6,95%   | 9,44%  | 6,21%  | 3,86%   | 0,00%                              | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  |
| Konstruksi                                  | 6,52%          | 5,19%  | 4,95%  | 3,36%  | 6,69%  | 5,03%   | 8,76%  | 8,95%  | 7,45%   | 0,59%                              | 0,46% | 0,43%  | 0,32%  | 0,62%  | 0,46% | 0,81%  | 0,78% | 0,68%  |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rep. Mobil Motor | 6,05%          | 6,13%  | 5,94%  | 4,59%  | 4,34%  | 5,25%   | 6,54%  | 5,42%  | 6,86%   | 0,63%                              | 0,63% | 0,65%  | 0,44%  | 0,46%  | 0,54% | 0,69%  | 0,60% | 0,69%  |
| Transportasi dan Pergudangan                | 6,55%          | 5,25%  | 3,89%  | 2,62%  | 4,00%  | 3,60%   | 6,63%  | 4,15%  | 2,89%   | 0,05%                              | 0,04% | 0,03%  | 0,02%  | 0,03%  | 0,03% | 0,05%  | 0,04% | 0,02%  |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum        | 10,70%         | 3,37%  | 2,39%  | 5,02%  | 6,04%  | 4,03%   | 13,67% | 1,15%  | 7,91%   | 0,05%                              | 0,02% | 0,01%  | 0,02%  | 0,03%  | 0,02% | 0,07%  | 0,05% | 0,04%  |
| Informasi dan Komunikasi                    | 7,56%          | 5,07%  | 5,30%  | 6,02%  | 6,59%  | 5,82%   | 8,49%  | 6,23%  | 7,12%   | 0,09%                              | 0,06% | 0,07%  | 0,07%  | 0,05%  | 0,07% | 0,11%  | 0,08% | 0,09%  |
| Jasa Keuangan                               | 1,30%          | 1,62%  | 1,45%  | -1,33% | 17,49% | 4,48%   | 7,02%  | 4,69%  | 4,95%   | 0,01%                              | 0,02% | 0,01%  | -0,01% | 0,16%  | 0,04% | 0,05%  | 0,05% | 0,05%  |
| Real Estate                                 | 3,85%          | 2,92%  | 5,36%  | 4,52%  | 2,71%  | 386,00% | 3,95%  | 5,43%  | 2,56%   | 0,04%                              | 0,03% | 0,05%  | 0,04%  | 0,02%  | 0,04% | 0,06%  | 0,05% | 0,02%  |
| Jasa Perusahaan                             | 8,37%          | 7,62%  | 9,32%  | 10,97% | 9,89%  | 9,43%   | 7,73%  | 1,58%  | 2,50%   | 0,00%                              | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  |
| Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos.    | 9,45%          | 8,81%  | -0,79% | 7,31%  | 4,87%  | 4,82%   | 9,96%  | 6,19%  | 5,77%   | 0,17%                              | 0,15% | -0,02% | 0,12%  | 0,06%  | 0,09% | 0,19%  | 0,12% | 0,10%  |
| Jasa Pendidikan                             | 4,42%          | 11,68% | 7,56%  | 8,62%  | 7,59%  | 8,78%   | 10,37% | 1,17%  | 3,23%   | 0,02%                              | 0,06% | 0,04%  | 0,05%  | 0,04%  | 0,05% | 0,06%  | 0,06% | 0,02%  |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial          | 6,62%          | 10,82% | 7,71%  | 8,27%  | 8,41%  | 8,77%   | 6,63%  | 9,37%  | 2,52%   | 0,02%                              | 0,03% | 0,02%  | 0,02%  | 0,02%  | 0,02% | 0,02%  | 0,03% | 0,00%  |
| Jasa lainnya                                | 7,54%          | 8,90%  | 9,37%  | 13,95% | 13,79% | 11,41%  | 13,87% | 1,34%  | -13,58% | 0,04%                              | 0,05% | 0,05%  | 0,06%  | 0,06%  | 0,06% | 0,08%  | 7,00% | 0,05%  |
| PDRB                                        | 3,52%          | 4,65%  | 4,59%  | 4,98%  | 4,94%  | 4,79%   | 4,89%  | 4,75%  | 4,65%   | 3,52%                              | 4,65% | 4,59%  | 4,98%  | 4,94%  | 4,79% | 4,89%  | 4,75% | 4,65%  |

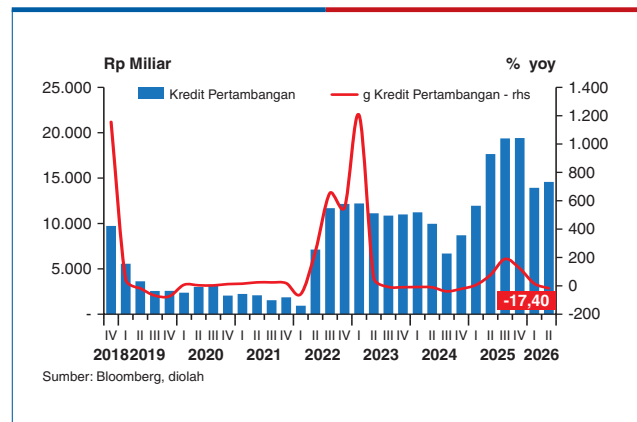
Sumber : BPS

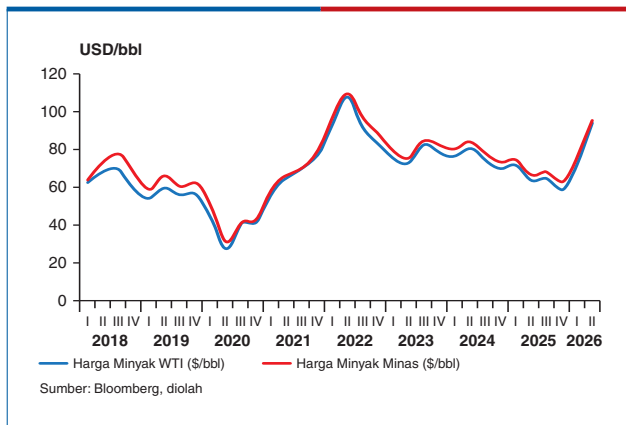
### 3.2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2026 tercatat terkontraksi 0,59% (yoy), membaik dari triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 2,41% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan telah selesainya masa perbaikan pipa gas milik PT. Bumi Siak Pusako serta didukung meningkatnya harga minyak dunia pada triwulan II 2026 menjadi sebesar US\$95,15 per *barrel*, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang berada pada US\$74,11 per *barrel*. Sementara itu, dari sisi distribusi jalur Selat Hormuz yang telah dibuka menahan kenaikan harga minyak yang lebih tinggi. Selanjutnya, kinerja penyaluran kredit pertambangan menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan kinerja pelaku usaha di sektor tersebut yang menurun.

Di sisi lain, penurunan struktural akibat *natural declining* migas diperkirakan menjadi 8-12% per tahun terus berlanjut yang berdampak kepada tertahannya kinerja LU Pertambangan yang lebih

tinggi. Hal ini turut didukung oleh peristiwa *turn around* (pemeliharaan mesin) di Dumai selama triwulan II 2026. Selanjutnya, pada triwulan II 2026 kinerja kredit pertambangan juga terkontraksi sebesar 17,40% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,59% (yoy) sebagai salah satu indikator yang mencerminkan moderasi aktivitas LU Pertambangan dan Penggalian.

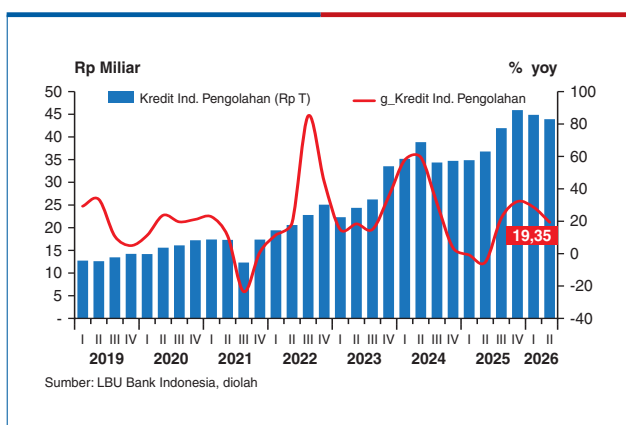

**Grafik 1.18.** Kredit Pertambangan



Grafik 1.19. Harga Minyak

### 3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan II 2026, LU Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,59% (yoy), menurun dibandingkan triwulan II 2026 yang tumbuh 6,21% (yoy). Menurunnya pertumbuhan industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan penjualan ekspor komoditas CPO. Hal ini terindikasi dari penurunan ekspor CPO yang berkontraksi sebesar 0,48% (yoy) pada triwulan I 2026 dari sebelumnya 13,45% (yoy). Hal ini sejalan dengan SBT Industri Pengolahan yang tercatat sebesar 4,67 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,4 serta penyaluran kredit industri pengolahan yang menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan kepercayaan pelaku usaha yang melambat dan mendorong penurunan yang lebih dalam.



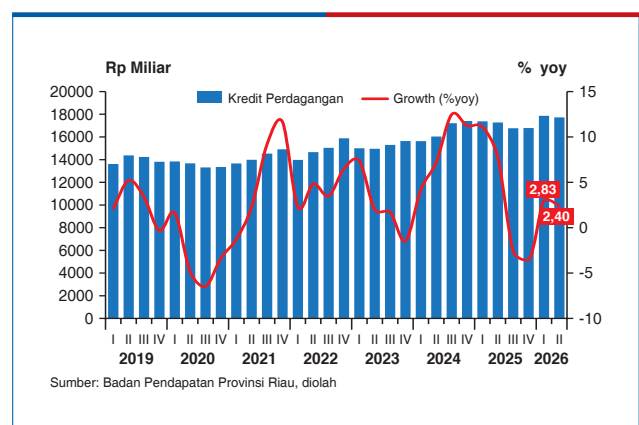
Grafik 1.20. Kredit Industri Pengolahan

Di sisi lain, berdasarkan subsektornya, penurunan kinerja LU Industri Pengolahan yang lebih dalam tertahan didukung oleh masih kuatnya kinerja subsektor *pulp & paper*. Kondisi didukung dari peningkatan kinerja kredit *pulp & paper* yang tumbuh sebesar 52,91% (yoy) dari sebelumnya tumbuh sebesar 40,79% (yoy).

### 3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor tumbuh sebesar 5,42% (yoy), tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,21% (yoy). Penurunan tersebut terutama didorong oleh moderasi pasca momen Ramadan serta HBKN Imlek dan Idulfitri. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit perdagangan yang tumbuh 2,40% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 2,83% (yoy) mengindikasikan moderasi kebutuhan pembiayaan modal kerja seiring dengan normalisasi permintaan dan aktivitas perdagangan.

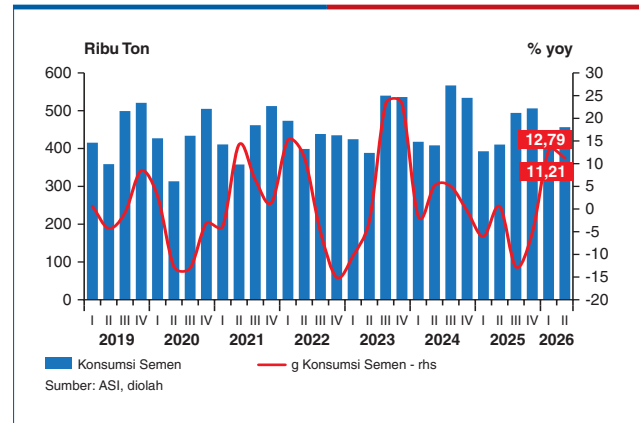
Di sisi lain, penurunan LU Perdagangan yang lebih dalam tertahan oleh meningkatnya harga TBS. Pada triwulan II 2026 harga TBS tumbuh sebesar 10,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83% (yoy), berkontribusi pada penurunan LU Perdagangan Besar & Eceran yang lebih dalam.



Grafik 1.21. Kredit Perdagangan



Grafik 1.22. Harga TBS Riau

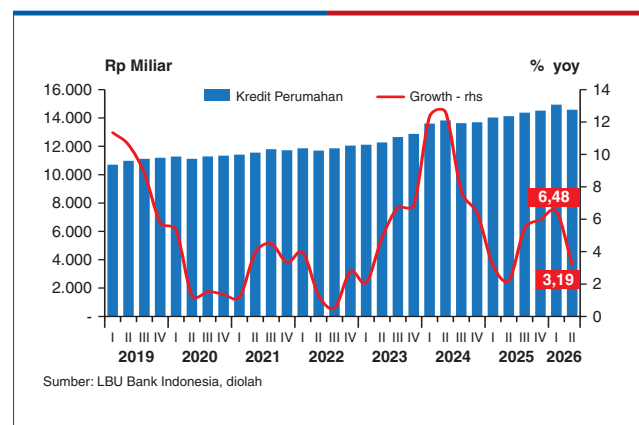


Grafik 1.23. Konsumsi Semen

### 3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 8,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,76% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh realisasi proyek investasi strategis yang masih berlanjut a.l. pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 serta pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Lebih lanjut, kinerja sektor Konstruksi yang tetap tumbuh solid utamanya ditopang oleh realisasi pembebasan lahan untuk proyek JTTS tahap berikutnya pada triwulan II 2026. Hal itu tercermin dari konsumsi semen yang justru tumbuh melambat pada triwulan II 2026 sebesar 11,21% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,29% (yoy), serta kredit konstruksi yang juga mengalami pelambatan sebesar 3,19% (yoy), lebih rendah dari triwulan I 2026 sebesar 6,48% (yoy).



Grafik 1.24. Kredit Konstruksi



## BOKS 1

### **THE 2ND RIAU ECONOMIC FORUM SEBAGAI WADAH KOLABORASI STRATEGIS MEMPERKUAT STABILISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU**

*Riau Economic Forum (REF) 2026: Memperkuat Sinergi Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Riau yang Solid dan Digitalisasi yang Terakselerasi.* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau menyelenggarakan *The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026* pada 31 Agustus 2026 sebagai puncak dari rangkaian *Road to REF* yang meliputi Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), *Focus Group Discussion (FGD)* Perekonomian, Temu Responden, Pasar Murah dalam rangka HUT Riau, serta Festival Diversifikasi Pangan pada rangkaian *Riau Investment Forum (RIF)*. Forum *hybrid* ini menghimpun sekitar 163 peserta secara luring dan 3,2 ribu penonton daring yang terdiri dari unsur *pentahelix*, yaitu Pemerintah Daerah, instansi vertikal, akademisi, perbankan, pelaku usaha, asosiasi, dan media serta disiarkan langsung melalui akun resmi YouTube BI Riau untuk memperluas jangkauan diseminasi kebijakan. Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi daerah, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Riau (mewakili Gubernur Riau), Koordinator Wilayah Bank Indonesia Sumatera, para kepala daerah kabupaten/kota di Riau, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal lainnya, mencerminkan tingginya komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Riau.

**Penguatan Hilirisasi sebagai Motor Pertumbuhan Investasi Riau.** Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, REF 2026 turut menghadirkan Penganugerahan REF Award 2026 kepada 3 (tiga) perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu PT. Energi Sejahtera Mas, PT. Sumber Jaya Industri Oleo, dan PT. Karya Indopalma Makmur serta 3 (tiga) perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. TH Indo Plantations, dan PT. Adhitya Serayakorita dengan realisasi investasi hilirisasi tertinggi pada semester I 2026. Penghargaan ini diberikan di tengah akselerasi realisasi investasi Provinsi Riau yang tercatat tumbuh signifikan pada triwulan II 2026, dengan PMDN tumbuh 63,88% (yoy) dan PMA tumbuh 46,90% (yoy), mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan prospek hilirisasi di Riau, khususnya pada sektor kelapa sawit dan turunannya. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Riau untuk terus memperkuat struktur ekonomi ke arah aktivitas bernilai tambah tinggi, sekaligus memperluas keterkaitan antarindustri di daerah.



**Sinergi Kebijakan Digitalisasi dan Perekonomian sebagai Landasan Prospek ke Depan.** Forum ini menghadirkan 2 (dua) sesi diskusi panel strategis dengan narasumber nasional dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan nasional, ekonom nasional, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Diskusi panel sesi pertama memberikan perspektif bahwa akselerasi digitalisasi sistem pembayaran memberikan manfaat signifikan bagi efisiensi transaksi dan inklusi keuangan, namun perlu diiringi penguatan mitigasi risiko digital melalui *Know Your Customer* (KYC), literasi keuangan/digital, serta penguatan perlindungan dan penjaminan konsumen oleh regulator dan LPS. Adapun diskusi panel sesi kedua menyoroti pentingnya sinergi pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menghasilkan efek *crowding-in* terhadap investasi serta memperkuat keterkaitan antarindustri, sebagai landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih kuat dan berkelanjutan ke depan. Kedua sesi tersebut secara komplementer memperkaya perspektif *stakeholders* dalam merumuskan langkah kebijakan yang selaras antara penguatan stabilitas sistem keuangan dan optimalisasi peluang pertumbuhan baru.

**Momentum Sinergi Pentahelix untuk Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi.** Penyelenggaraan REF 2026 turut diperkaya dengan kolaborasi program Wakaf KETUWA (Kedai Buah Berwakaf) yang mendorong pembelian produk UMKM melalui skema wakaf berbasis QRIS, sehingga sekaligus program tersebut dapat turut mendorong UMKM, digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS, serta





*awareness* masyarakat mengenai keuangan sosial syariah berupa wakaf secara lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, rangkaian REF 2026 menjadikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau sebagai mitra strategis utama Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi yang komprehensif. Ke depan, sinergi *pentahelix* yang telah terbangun diharapkan dapat terus dijaga dan diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang solid, didukung oleh akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang Profesional, Tangguh, dan Terdepan dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.







## BAB 2

# PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

- Inflasi Riau pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 4,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,65% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai merah, serta Kelompok Transportasi, terutama komoditas bensin. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh meredanya inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Dengan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang semakin solid, inflasi Riau diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran  $2,5\% \pm 1\%$ .

## 1. KONDISI UMUM

Pada triwulan II 2026 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 4,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 3,65% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan inflasi Riau terutama didorong oleh peningkatan inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Transportasi dan Rekreasi, Olahraga & Budaya. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan oleh pelambatan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya dan Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga.

Ke depan, sejumlah *upside risks* yang masih membayangi prospek perkembangan inflasi Riau, di antaranya: (i) potensi tekanan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, & kentang akibat keterbatasan pasokan dari daerah produsen sejalan dengan periode tanam; (ii) peningkatan permintaan daging ayam ras dan telur ayam ras di tengah biaya produksi yang masih relatif tinggi; (iii) potensi kenaikan tarif angkutan udara seiring masih berlakunya kebijakan *fuel surcharge* di tengah harga avtur yang relatif tinggi; (iv) penyesuaian harga jual rokok kretek filter secara bertahap di tingkat ritel; serta (v) berlanjutnya tekanan harga pada sejumlah komoditas seiring penurunan biaya energi yang belum sepenuhnya tertransmisikan pada harga jual di tingkat perdagangan.

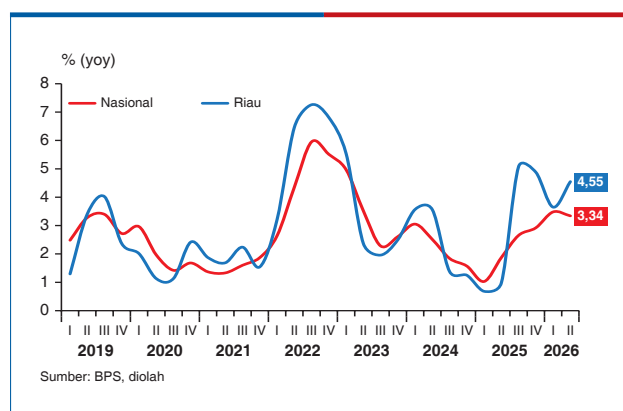
Kendati demikian, risiko peningkatan inflasi yang tinggi diperkirakan dapat ditahan oleh: (i) harga minyak dunia di pasar Internasional yang lebih stabil; (ii) pasokan dan biaya produksi pada komoditas pangan yang terjaga sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi komoditas pangan; (iii) normalisasi permintaan terhadap peralatan sekolah anak, sejalan dengan berakhirnya periode tahun ajaran baru; (iv) pemantauan dan realisasi distribusi Minyak Kita dan Beras SPHP oleh Bulog; (v) efektivitas upaya intervensi harga, peningkatan produksi,

dan jaminan kelancaran distribusi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Kerja sama Antar Daerah (KAD), serta (vi) optimalisasi peran BUMD Pangan dalam pengendalian inflasi daerah.

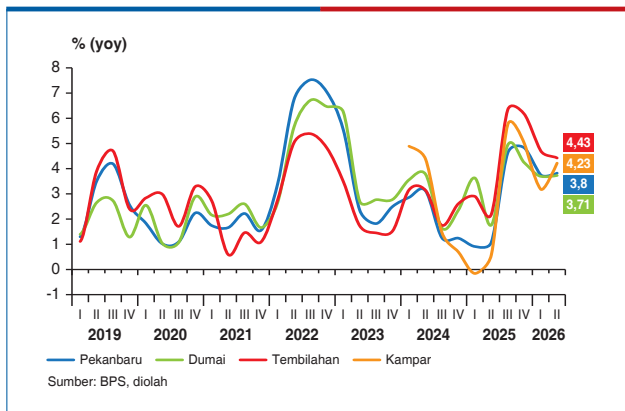
Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$  (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *forward looking*, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID, realisasi serta perluasan KAD, optimalisasi peran BUMD Pangan, serta ekspektasi inflasi yang terjaga, diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2026.

## 2. PERKEMBANGAN INFLASI RIAU

Pada triwulan II 2026, Riau mengalami inflasi sebesar 4,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 3,65% (yoy). Di tengah peningkatan tersebut, inflasi nasional pada triwulan II 2026 tercatat 3,34% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 3,48% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tahunan di Riau dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, khususnya pada komoditas cabai merah, sehingga mendorong peningkatan tekanan inflasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Riau dan Nasional (% yoy)

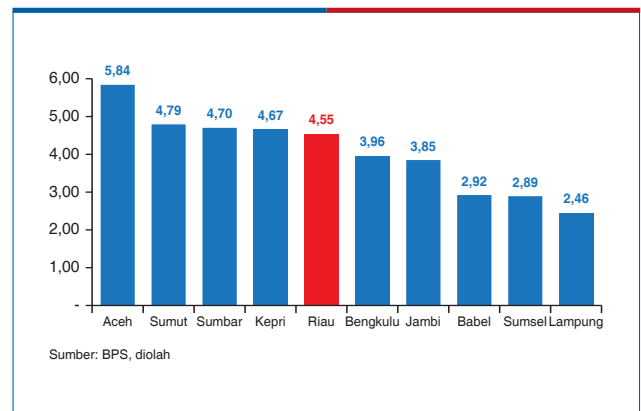


Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi 4 Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Riau (% yoy)

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi terjadi pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Riau, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Pada triwulan II 2026, Kabupaten Kampar mencatat inflasi sebesar 4,90% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 3,23% (yoy). Selanjutnya Kota Pekanbaru tercatat 4,43% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 3,80% (yoy). Kota Dumai juga mencatat inflasi sebesar 4,30% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yakni 3,71% (yoy). Di sisi lain, inflasi kota Tembilahan tercatat sebesar 4,38% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 4,71% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Transportasi; Rekreasi, Olahraga & Budaya; Kesehatan; Penyedia Makanan & Minuman/Restoran; Informasi Komunikasi & Jasa Keuangan serta Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut ditahan oleh deflasi kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga; Pakaian & Alas Kaki; serta Pendidikan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi Riau berada pada urutan kelima tertinggi setelah Aceh sebesar 5,84% (yoy),



Grafik 2.3. Inflasi Seluruh Provinsi di Sumatera (% yoy)

Sumatera Utara 4,79% (yoy), Sumatera Barat 4,70% (yoy) dan Kepulauan Riau 4,67% (yoy).

Lebih lanjut berdasarkan komoditas, inflasi tahunan Riau pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga emas perhiasan akibat ketidakpastian global yang mendorong kenaikan permintaan emas sebagai aset *safe-haven*. Komoditas pangan yakni Cabai Merah & Minyak Goreng juga menunjukkan peningkatan harga. Hal tersebut dipengaruhi oleh (i) pasokan cabai merah yang terbatas dari daerah sentra produksi (a.l. Sumbar & Sumut); (ii) harga jual & biaya distribusi yang tinggi; serta (iii) masih tingginya harga bahan baku CPO dibandingkan periode sebelumnya ditengah tekanan biaya distribusi. Lebih lanjut, Komoditas Bensin juga menyumbang andil inflasi pada periode laporan yang disebabkan oleh peningkatan harga BBM non-subsidi Pertamina Turbo sebesar 4% dan Pertamina sebesar 32%, di ikuti oleh komoditas Angkutan Udara akibat tingginya permintaan terhadap tiket penerbangan sejalan dengan periode libur sekolah. Tekanan inflasi juga bersumber dari komoditas pendidikan (utamanya pendidikan tinggi), sejalan dengan masih berjalannya penyesuaian biaya pendidikan.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas sabun detergen bubuk, yang dipengaruhi oleh (i) tingginya persaingan pada segmen produk *home care*; serta (ii) meningkatnya aktivitas promosi dan pemberian diskon di tingkat

**Tabel 2.1.** Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Tahunan (% andil yoy)

| PENYUMBANG INFLASI       |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| TW I 2026                |       | TW II 2026               |       |
| Komoditas                | Andil | Komoditas                | Andil |
| Emas Perhiasan           | 1,22  | Emas Perhiasan           | 0,79  |
| Tarif Listrik            | 0,64  | Cabai Merah              | 0,57  |
| Daging Ayam Ras          | 0,32  | Bensin                   | 0,16  |
| Ayam Hidup               | 0,25  | Akademi/Perguruan Tinggi | 0,15  |
| Akademi/Perguruan Tinggi | 0,15  | Minyak Goreng            | 0,14  |
| Sewa Rumah               | 0,08  | Pemeliharaan/Service     | 0,13  |

Sumber: BPS, diolah

| PENYUMBANG DEFLASI   |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| TW I 2026            |        | TW II 2026           |        |
| Komoditas            | Andil  | Komoditas            | Andil  |
| Cabai Merah          | (0,13) | Sabun Detergen Bubuk | (0,04) |
| Kentang              | (0,13) | Jengkol              | (0,03) |
| Bawang Putih         | (0,07) | Kentang              | (0,02) |
| Sabun Detergen Bubuk | (0,03) | Masker               | (0,02) |
| Cabai Rawit          | (0,03) | Buncis               | (0,01) |
| Minyak Goreng        | (0,03) | Kelapa               | (0,01) |

Sumber: BPS, diolah

ritel. Selanjutnya penurunan harga juga terjadi pada komoditas sayuran yakni jengkol, kentang & buncis sejalan dengan pasokan yang terjaga ditengah periode panen. Komoditas kelapa juga menunjukkan penurunan harga akibat pasokan yang meningkat dari sentra produksi Riau di tengah melemahnya permintaan ekspor sehingga menekan harga kelapa di tingkat domestik.

## 2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

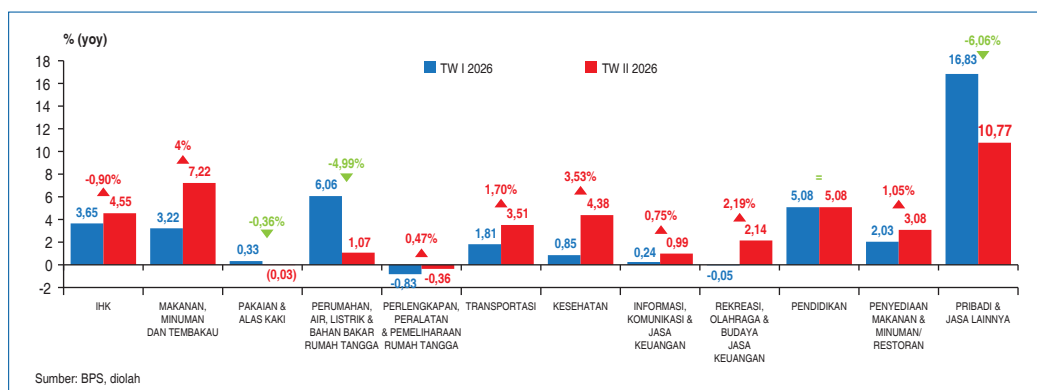
Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2026 terjadi pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu Makanan, Minuman dan Tembakau; Transportasi; Rekreasi, Olahraga & Budaya; Kesehatan; Penyedia Makanan & Minuman/Restoran; Informasi Komunikasi & Jasa Keuangan serta Perlengkapan, Peralatan &

Pemeliharaan Rumah Tangga. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh 4 (empat) kelompok pengeluaran yaitu kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga; Pakaian & Alas Kaki serta Rekreasi, Olahraga & Budaya serta Pendidikan.

## KELOMPOK PENDORONG INFLASI

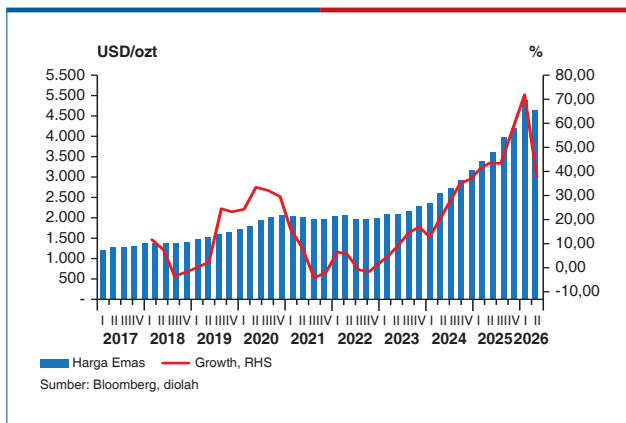
### 1. Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan II 2026, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 7,22% (yoy), meningkat dari triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 3,22% (yoy). Kelompok ini memiliki pangsa  $\pm 30\%$  terhadap total Nilai Konsumsi (NK) Riau, sehingga perkembangan inflasi kelompok ini akan cukup berpengaruh terhadap inflasi Riau secara umum.



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 2.4.** Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran (% yoy)



Grafik 2.5. Perkembangan Harga Emas Global

Berdasarkan komoditas, peningkatan inflasi utamanya disumbang oleh peningkatan harga cabai merah dengan andil 0,57% (yoy) akibat pasokan yang terbatas dari daerah sentra produksi ditengah harga jual komoditas dan biaya distribusi yang stabil tinggi; minyak goreng dengan andil 0,14% (yoy) sejalan dengan harga bahan baku CPO yang stabil tinggi ditengah tekanan biaya distribusi; ikan patin dengan andil 0,12% (yoy) yang disebabkan oleh keterbatasan pasokan akibat cuaca buruk sehingga menurunkan aktivitas melaut dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,11% (yoy) dampak dari penyesuaian harga jual secara bertahap di tingkat ritel.

Di sisi lain, penurunan harga terjadi pada komoditas pangan lainnya yaitu jengkol dengan andil sebesar -0,03% (yoy), kentang sebesar -0,02% (yoy) & buncis sebesar -0,1% (yoy) akibat pasokan dan permintaan yang tegang. Selanjutnya harga komoditas kelapa dengan andil -0,01% (yoy) juga menunjukkan penurunan harga akibat pasokan yang meningkat di tengah melemahnya permintaan ekspor.

## 2. Transportasi

Pada triwulan II 2026, Kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 4,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,85% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada komoditas subkelompok jasa angkutan

penumpang dengan andil inflasi sebesar 4,32% (yoy), subkelompok pembelian kendaraan dengan andil sebesar 3,24% (yoy) dan subkelompok jasa pengiriman barang sebesar 0,34% (yoy).

## 3. Rekreasi, Olahraga, & Budaya

Pada triwulan II 2026 Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya mengalami inflasi sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,05% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya tercermin pada subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga dengan andil sebesar 4,96% (yoy), dan subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah dengan andil sebesar 1,58% (yoy).

## 4. Kesehatan

Pada triwulan II 2026 Kelompok Kesehatan mengalami inflasi sebesar 3,51% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 1,81% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada subkelompok jasa rawat inap dengan andil sebesar 7,47% (yoy), subkelompok jasa rawat jalan dengan andil sebesar 4,89% (yoy) dan subkelompok jasa kesehatan lainnya dengan andil sebesar 2,85% (yoy).

## 5. Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran

Pada triwulan II 2026 Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran mengalami inflasi sebesar 3,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 2,03% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh inflasi pada komoditas nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,09% (yoy), bakso siap santap dengan andil sebesar 0,06% (yoy), es dengan andil sebesar 0,04% (yoy) dan mie dengan andil sebesar 0,02% (yoy).





## 6. Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan

Pada triwulan II 2026 Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan mengalami inflasi sebesar 0,99 % (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,24% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh komoditas telepon seluler dengan andil sebesar 0,29% (yoy).

## 7. Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga

Pada triwulan II 2026, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga masih mencatat deflasi sebesar 0,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan deflasi triwulan I 2026 sebesar 0,83% (yoy), sejalan dengan meningkatnya tekanan harga pada kelompok tersebut. Berkurangnya tekanan deflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok furnitur, perlengkapan dan karpet dengan andil sebesar 3,25% (yoy), diikuti subkelompok tekstil rumah tangga sebesar dengan andil 2,09% (yoy), subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun dengan andil 1,47% (yoy), serta subkelompok peralatan rumah tangga dengan andil sebesar 1,44% (yoy).

## KELOMPOK PENAHAN INFLASI

### 1. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Pada triwulan II 2026, Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya masih mencatatkan inflasi sebesar 10,77% (yoy). Namun realisasi tersebut menurun dari triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 16,83% (yoy). Hal ini juga tercermin dari penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 yakni 136,01 dibandingkan Maret 2026 sebesar 138,28, yang menunjukkan adanya koreksi harga selama triwulan II. Meski demikian, seluruh subkelompok masih mencatat inflasi secara tahunan. Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi 0,79% (yoy), serta lipstik, parfum, sampo, dan *body lotion*, masing-masing dengan andil sebesar 0,01% (yoy).

## 2. Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga

Pada triwulan II 2026, Kelompok Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga masih mencatatkan inflasi sebesar 1,07% (yoy). Namun realisasi tersebut menurun dari triwulan I 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 6,06% (yoy). Subkelompok yang mengalami penurunan yaitu listrik dan bahan bakar rumah tangga khususnya pada komoditas bahan bakar rumah tangga.

### 3. Pakaian & Alas Kaki

Pada triwulan II 2026, Kelompok Pakaian & Alas Kaki mencatatkan deflasi sebesar 0,03% (yoy). Deflasi utamanya didorong oleh subkelompok alas kaki dengan andil sebesar 0,62% (yoy). Sedangkan subkelompok pakaian masih mencatatkan inflasi dengan andil 0,11% (yoy).

## 2.2. Analisis Inflasi Spasial Riau

Pada triwulan II 2026, laju inflasi pada Kota/Kab IHK di Riau meningkat dibanding triwulan II 2026. Sejalan dengan Provinsi Riau, Kab. Kampar turut mengalami peningkatan inflasi dari 3,23% (yoy) menjadi 4,90% (yoy); diikuti Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan inflasi dari 3,80% (yoy) menjadi 4,43% (yoy) serta Kota Dumai dari inflasi 3,71% (yoy) menjadi 4,30% (yoy). Sementara itu, Tembilahan mencatatkan penurunan inflasi dari 4,17% (yoy) menjadi 4,38% (yoy).

Berdasarkan 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi, terdapat kemiripan pada seluruh kab/kota IHK. Komoditas pangan yakni Emas Perhiasan, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng & Bensin terpantau menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di setiap kab/kota, namun dengan andil inflasi yang bervariasi. Di sisi lain, komoditas jengkol, kentang & kelapa terpantau menjadi komoditas utama penyumbang deflasi di setiap kab/kota, sejalan dengan melimpahnya pasokan dan permintaan yang stabil.





Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Spasial Riau (% yoy)

| Wilayah         | TW I 2026 | TW II 2026 | Arah |
|-----------------|-----------|------------|------|
| Provinsi Riau   | 3,65      | 4,55       | ▲    |
| Kota Pekanbaru  | 3,80      | 4,43       | ▲    |
| Kota Dumai      | 3,71      | 4,30       | ▲    |
| Kota Tembilahan | 4,71      | 4,38       | ▼    |
| Kab. Kampar     | 3,23      | 4,90       | ▲    |

Sumber: BPS, diolah

Secara khusus, komoditas cabai merah terpantau memberikan andil inflasi tertinggi di Kabupaten Kampar, dan andil deflasi jengkol terdalam terjadi di Tembilahan. Hal ini sejalan dengan pangsa/bobot komoditas tersebut yang relatif lebih tinggi pada masing-masing kota/kab IHK dibandingkan kota IHK lainnya.

Tabel 2.3. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Kab/Kota IHK Triwulan II 2026 (% andil yoy)

|         | RIAU                     |        | PEKANBARU                |        | DUMAI                        |        | TEMBILAHAN     |        | KAMPAR                 |        |
|---------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|
|         | Komoditas                | Andil  | Komoditas                | Andil  | Komoditas                    | Andil  | Komoditas      | Andil  | Komoditas              | Andil  |
| INFLASI | Emas Perhiasan           | 0,79   | Emas Perhiasan           | 0,85   | Emas Perhiasan               | 0,76   | Emas Perhiasan | 2,25   | Cabai Merah            | 1,29   |
|         | Cabai Merah              | 0,57   | Cabai Merah              | 0,48   | Cabai Merah                  | 0,54   | Cabai Merah    | 1,43   | Cabai Rawit            | 0,70   |
|         | Bensin                   | 0,16   | Akademi/Perguruan Tinggi | 0,28   | Bensin                       | 0,36   | Telur Ayam Ras | 0,23   | Emas Perhiasan         | 0,59   |
|         | Akademi/Perguruan Tinggi | 0,15   | Angkutan Udara           | 0,19   | Bawang Merah                 | 0,11   | Bayam          | 0,19   | Bawang Merah           | 0,41   |
|         | Minyak Goreng            | 0,14   | Bensin                   | 0,16   | Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu | 0,11   | Ikan Serai     | 0,18   | Telur Ayam Ras         | 0,23   |
|         | Pemeliharaan/ Service    | 0,13   |                          |        |                              |        |                |        |                        |        |
| DEFLASI | Sabun Detergen Bubuk     | (0,04) | Jengkol                  | (0,04) | Jengkol                      | (0,02) | Jengkol        | (0,11) | Tomat                  | (0,09) |
|         | Jengkol                  | (0,03) | Kentang                  | (0,03) | Kelapa                       | (0,02) | Ikan Nila      | (0,05) | Jengkol                | (0,09) |
|         | Kentang                  | (0,02) | Sabun Detergen Bubuk     | (0,03) | Jeruk Nipis/Limau            | (0,02) | Tomat          | (0,04) | Bawang Putih           | (0,08) |
|         | Masker                   | (0,02) | Sepatu Pria              | (0,02) | Udang Basah                  | (0,02) | Tempe          | (0,03) | Sabun Detergen Bubuk   | (0,06) |
|         | Buncis                   | (0,01) | Masker                   | (0,02) | Tissu                        | (0,02) | Masker         | (0,03) | Sabun Cair/Cuci Piring | (0,06) |
|         | Kelapa                   | (0,01) |                          |        |                              |        |                |        |                        |        |

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Pengeluaran Kab/Kota IHK Triwulan II 2026 (% yoy)

| Kelompok Pengeluaran                               | Riau   | Pekanbaru | Dumai | Tembilahan | Kampar |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|--------|
| UMUM                                               | 4,55   | 4,43      | 4,30  | 4,38       | 4,90   |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau                     | 7,22   | 6,84      | 6,22  | 4,38       | 8,42   |
| Pakaian dan Alas Kaki                              | (0,03) | (1,17)    | 0,86  | 0,81       | 1,68   |
| Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT                  | 1,07   | 1,00      | 1,71  | 0,84       | 1,00   |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT | (0,36) | (0,42)    | 1,53  | 1,28       | (1,28) |
| Kesehatan                                          | 3,51   | 5,07      | 0,88  | (0,30)     | (0,33) |
| Transportasi                                       | 4,38   | 4,31      | 3,82  | 2,99       | 4,94   |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan           | 0,99   | 1,15      | 2,17  | 0,77       | 0,19   |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                     | 2,14   | 1,05      | 1,73  | (0,15)     | 4,30   |
| Pendidikan                                         | 5,08   | 7,22      | 2,59  | 1,89       | 0,07   |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran            | 3,08   | 2,81      | 4,02  | 5,10       | 2,93   |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                 | 10,77  | 11,39     | 10,09 | 15,75      | 8,49   |

Sumber: BPS, diolah

■ Lebih tinggi dari inflasi Riau



### 3. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2026

Pada triwulan III 2026 (hingga Agustus 2026), Riau menunjukkan tren pelambatan tekanan inflasi. Pada Agustus 2026, inflasi Riau tercatat sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan Juli 2026 sebesar 4,55% (yoy).

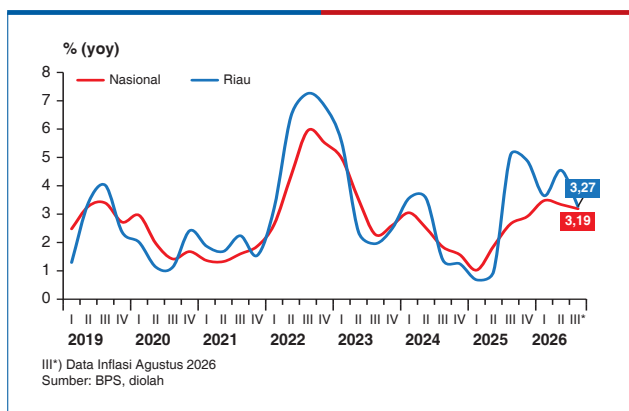
Secara spasial, pada Agustus 2026 inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 4,53% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 3,73% (yoy), Kota Dumai sebesar 2,97% (yoy) dan Kota Pekanbaru sebesar 2,94% (yoy).

Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan pada bulan Agustus 2026 cenderung didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, daging ayam ras, pemeliharaan/service, ayam hidup, bensin, dan cabai merah. Peningkatan harga tersebut dipengaruhi oleh: (i) peningkatan harga emas global di tengah masih tingginya ketidakpastian global dan permintaan investor terhadap *safe-haven asset*, (ii) pasokan daging ayam ras dan ayam hidup yang terbatas serta biaya distribusi dari produsen ke pasar yang stabil tinggi, (iii) penyesuaian tarif *service* sejalan dengan masih tingginya harga *sparepart* dan oli kendaraan sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar Rupiah, (iv) peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan peningkatan harga BBM nonsubsidi hingga periode laporan, serta (v)

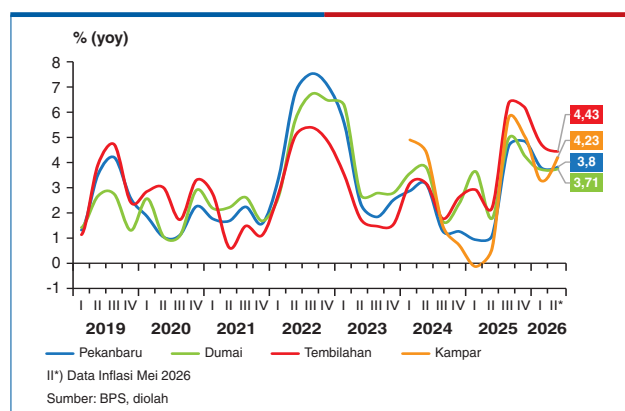
terbatasnya pasokan cabai merah dari daerah sentra produksi yang juga dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Ke depan, laju inflasi Riau masih menghadapi sejumlah *upside risks* yang perlu diwaspadai. Di antaranya risiko tekanan harga komoditas hortikultura seiring masih berlanjutnya *El Nino* di daerah sentra produksi (Sumatera Barat) yang berpotensi menekan produksi dan pasokan. Lebih lanjut peningkatan harga BBM nonsubsidi per 1 September 2026 juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Sementara itu, tekanan juga berpotensi didorong oleh berlanjutnya penyesuaian biaya jasa, serta transmisi kenaikan biaya operasional pelaku usaha.

Meskipun terdapat sejumlah *upside risks*, inflasi Riau untuk tahun 2026 diperkirakan dapat terkendali seiring dengan perbaikan pasokan pangan, penguatan KAD dengan daerah sentra produksi, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai *oftaker* dan *buffer stock*, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar/SPHP, dan pemantauan harga berbasis *Early Warning System*. Selain itu, koordinasi TPIP dan TPID melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) diharapkan dapat memperkuat stabilisasi pasokan dan harga, sehingga laju inflasi Riau tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional  $2,5\% \pm 1\%$  secara tahunan.



Grafik 2.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Riau dan Nasional (% yoy)



Grafik 2.7. Perkembangan Inflasi Bulanan Kota/Kabupaten IHK

**Tabel 2.5.** Komoditas Utama Penyumbang Inflasi/Deflasi Riau Agustus 2026 (% andil yoy)

| INFLASI              |       | DEFLASI              |        |
|----------------------|-------|----------------------|--------|
| Komoditas            | Andil | Komoditas            | Andil  |
| Emas Perhiasan       | 0,69  | Bawang Merah         | (0,50) |
| Daging Ayam Ras      | 0,29  | Jengkol              | (0,05) |
| Pemeliharaan/Service | 0,24  | Buncis               | (0,04) |
| Ayam Hidup           | 0,17  | Kentang              | (0,02) |
| Bensin               | 0,15  | Petai                | (0,02) |
| Cabai Merah          | 0,14  | Sabun Detergen Bubuk | (0,02) |

#### 4. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya yang tergabung dalam TPID terus memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mengendalikan inflasi, terutama melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Pengendalian inflasi yang dilakukan berfokus pada Kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), sebagai berikut:

##### a. Keterjangkauan Harga

TPID se-Provinsi Riau rutin menyelenggarakan pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan berbagai inovasi, di antaranya:

- Hingga triwulan III 2026 (Agustus 2026), TPID se-Provinsi Riau telah melaksanakan 470 titik pasar murah.
- Pengembangan gerai/toko pangan murah di Provinsi Riau, yaitu TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan), Kedai Puantipa, dan Kios Puan Berseri yang dikelola oleh TPID Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru. Selain itu, BUMD Pangan Provinsi Riau juga telah mengoperasikan 3 (tiga) kios pengendali inflasi di pasar pantauan Kota Pekanbaru.
- Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah oleh OPD, instansi vertikal, dan pelaku usaha, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia

(KPwBI) Provinsi Riau sebagai anggota TPID turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar Murah, Makin Murah dengan QRIS. Selain itu, kolaborasi pasar murah turut melibatkan perusahaan, pelaku usaha, dan komunitas daerah untuk berpartisipasi melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- Optimalisasi program inovatif yang diinisiasi oleh BUMD Pangan Provinsi Riau yakni PT. Riau Pangan Bertuah, yaitu Mobil TOPLING (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling) yang rutin melaksanakan pasar murah ke titik rawan pangan pada beberapa kota IHK Provinsi Riau.
- Menerapkan *early warning system* sebagai indikator *pre-emptive* saat terjadi lonjakan harga pada komoditas pangan strategis, sehingga TPID Prov. Riau & TPID Kota/Kab. dapat melakukan langkah strategis untuk menanggulangi lonjakan harga.
- Pelaksanaan sidak pasar ini ditujukan untuk memantau langsung kondisi harga dan pasokan kebutuhan pangan, serta melihat daya beli masyarakat pasca lebaran di Riau bersama Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur Riau, Kepala KPw BI Riau dan Walikota Pekanbaru.

##### b. Ketersediaan Pasokan

Sebagai daerah yang defisit neraca pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Riau cukup bergantung pada pasokan dari daerah penghasil, sehingga TPID Riau berkomitmen terus melakukan langkah sebagai berikut:

- Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah daerah sentra produksi, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, terutama untuk komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi Riau seperti bawang merah, aneka cabai, dan telur ayam ras. Langkah ini diarahkan untuk memperluas alternatif sumber pasokan dan mengurangi risiko ketergantungan pada daerah pemasok tertentu.



- TPID Provinsi Riau terus mendorong peningkatan produktivitas pangan lokal, khususnya beras dan aneka cabai, melalui penguatan kapasitas petani, dukungan sarana produksi dan alsintan, serta pengembangan budidaya yang lebih produktif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Riau.
- Peran BUMD pangan dan TPID kabupaten/kota terus diperkuat dalam menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi komoditas strategis, termasuk melalui pemantauan neraca pangan dan penguatan distribusi komoditas seperti MinyaKita. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung stabilitas harga di Provinsi Riau.

#### c. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjamin kelancaran distribusi pasokan, TPID di Provinsi Riau terus berupaya melakukan langkah sebagai berikut:

- TPID se-Provinsi Riau terus memperkuat kelancaran distribusi pangan dan efisiensi rantai pasok melalui optimalisasi kanal distribusi, digitalisasi pemasaran pangan, serta penguatan konektivitas antara daerah pemasok dan pasar tujuan. Upaya ini antara lain dilakukan melalui pengembangan platform digital pangan untuk mempertemukan produsen, distributor, dan konsumen, serta penguatan pengaturan arus logistik guna memastikan komoditas pangan memperoleh prioritas dalam proses distribusi.
- Penguatan jejaring distribusi antarwilayah terus dilakukan melalui optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan penguatan peran BUMD pangan serta mitra distribusi dalam menyalurkan komoditas strategis dari daerah surplus ke wilayah konsumen di Riau. Langkah tersebut diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kepastian pasokan,

serta menekan potensi kenaikan biaya logistik yang dapat diteruskan ke harga konsumen.

#### d. Komunikasi Efektif

Untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi TPID, serta menjalin komunikasi yang efektif baik internal TPID maupun dengan masyarakat, TPID Riau telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID pada tiga Kota/Kabupaten IHK, yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha 2026. Melalui kegiatan ini, sinergi antaranggota TPID diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.
- Penguatan komunikasi efektif dan *moral suasion* dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga, kesediaan stok pangan, antisipasi spekulasi harga, serta himbauan belanja bijak kepada masyarakat.
- Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Belanja Bijak di Bulan Ramadhan Melalui *Social Media* KPwBI Provinsi Riau (<https://youtu.be/Zk4RH73IF2w?si=gkDvYGF3crUa0aTR>) yang dapat menjadi bentuk himbauan kepada masyarakat untuk dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan.
- Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi rutin setiap minggunya bersama TPIP.
- Rapat Koordinasi TPID Provinsi Riau pengendalian harga komoditas ataupun isu strategis di Provinsi Riau yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Riau.

Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka TPIP, TPID, dan program GPIPS menjadi kunci yang akan terus dioptimalkan sehingga inflasi Riau keseluruhan tahun 2026 tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*







## **BAB 3**

# **PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM**

- Kinerja intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit kepada sektor korporasi, rumah tangga, maupun UMKM di Provinsi Riau tumbuh solid. Likuiditas perbankan yang masih memadai turut mendukung peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor ekonomi. Kualitas kredit juga tetap terjaga sehingga turut mendukung stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sektor keuangan di Prov Riau. Terlebih lagi, kualitas kredit juga terpantau masih tetap terjaga dalam taraf risiko yang terkendali.

## 1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN RIAU

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau tetap tumbuh positif, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif. Meskipun demikian, penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat sedikit mengalami pelambatan pada triwulan II 2026 namun diiringi oleh kemampuan bayar korporasi yang lebih baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit kepada Rumah Tangga (RT) terpantau tumbuh melambat.

Penyaluran kredit perbankan yang berlokasi proyek di Riau pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp184,21 triliun, atau tumbuh 9,73% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 10,15% (yoy). Penyaluran kredit didominasi oleh perbankan yang berlokasi di Provinsi Riau, yaitu mencapai 61,71% dari total kredit. Sementara itu, 38,29% lainnya didanai oleh perbankan di luar wilayah Riau. Penyaluran kredit dengan lokasi proyek di Riau pada triwulan II 2026 dikontribusikan terutama oleh Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) yang tetap tumbuh positif meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2026.

Sejalan dengan perkembangan pada sektor korporasi, kinerja intermediasi perbankan untuk sektor RT terpantau tumbuh terbatas pada triwulan

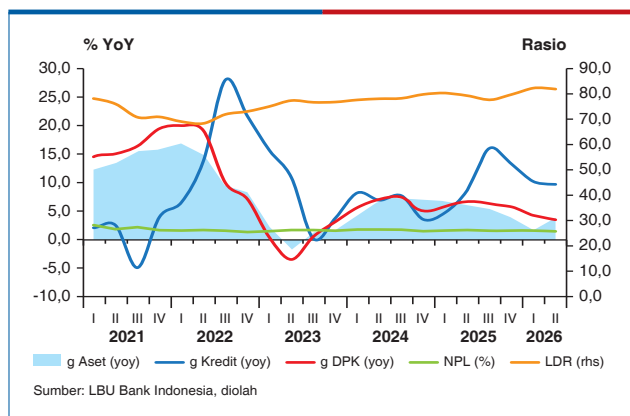
II 2026. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat yang menahan konsumsi, terindikasi dari konsumsi RT yang melandai di tengah akselerasi DPK perseorangan. Lebih lanjut, menurut penggunaannya, pelambatan kredit RT terutama pada kredit perumahan, *durable goods*, dan multiguna.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh Bank Indonesia untuk mendorong kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, preferensi risiko atau *risk appetite* perbankan dan kapasitas likuiditas perbankan yang masih terjaga baik turut mendorong peningkatan penyaluran kredit terutama di wilayah Provinsi Riau.

Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan *Loan-to-Deposit Ratio* perbankan Riau pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 83,00% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 82,50% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan juga tercatat tumbuh positif, meskipun sedikit lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja DPK pada triwulan II 2026 tumbuh 3,47% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,30% (yoy). Kondisi ini ditengarai terjadi karena peningkatan aktivitas investasi perusahaan yang tercermin pada PMTB Riau Triwulan II 2026.

Selain itu, di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II 2026, pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah terpantau membaik. Penyaluran pembiayaan di Riau terlihat dari realisasi kredit syariah yang terakselerasi di angka 12,40% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 4,48% (yoy). Lebih lanjut, pembiayaan syariah yang meningkat tersebut didorong oleh percepatan pada pembiayaan untuk modal kerja, konsumsi, dan investasi.



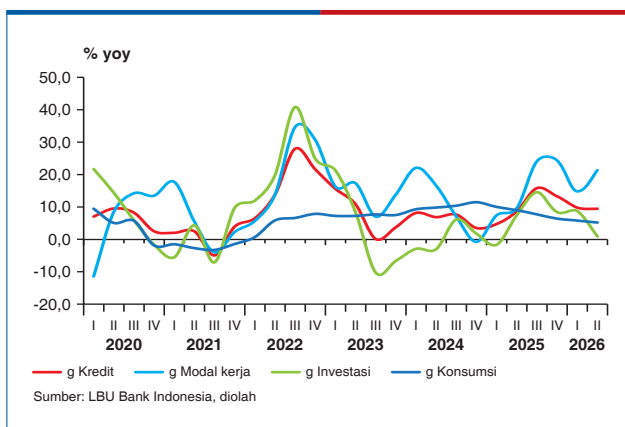
Grafik 3.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau



### 1.1. Pembiayaan Korporasi

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 tercatat masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit di Provinsi Riau pada triwulan laporan secara nominal tercatat mencapai Rp184,21 Triliun atau tumbuh 9,73% (yoy), meningkat secara nominal dibandingkan triwulan I 2026 sebesar Rp174,77 Triliun, namun sedikit melambat dibanding pertumbuhan triwulan I 2026 yang mencapai 10,15% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, kinerja penyaluran kredit mengalami pelambatan pada kredit investasi dan kredit konsumsi. Di sisi lain, kredit modal kerja terpantau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pelambatan kinerja kredit korporasi terindikasi dari penurunan kinerja kredit produktif, yaitu kredit investasi dan modal kerja. Pada triwulan II 2026, kinerja kredit produktif tercatat tumbuh 11,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan 11,89% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Jika ditinjau lebih lanjut, kontributor utama pelambatan kredit produktif adalah kredit investasi yang tercatat sebesar Rp61,28 triliun atau tumbuh 1,03% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 8,66% (yoy). Namun demikian, kredit modal kerja masih mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 21,75% (yoy) atau lebih tinggi dibanding triwulan I 2026 yang mencapai 15,05% (yoy).



Grafik 3.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan pangsa penyalurannya, kredit korporasi terbesar di Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor industri pengolahan (28,05%); sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,36%); dan sektor perdagangan dan akomodasi (9,60%). Dari seluruh sektor ekonomi, pelambatan kredit pada triwulan II 2026 disebabkan utamanya oleh pelambatan pada sektor pertambangan yang berkontraksi sebesar 17,40% (yoy), setelah sebelumnya mampu tumbuh sebesar 16,59% (yoy). Perbaikan kontraksi pada sektor perindustrian & pengolahan menahan pelambatan yang lebih dalam setelah tumbuh sebesar 40,42% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya sebesar 28,63% (yoy).

Kinerja kredit pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami moderasi pertumbuhan dari sebesar 3,73% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 3,33% (yoy) pada triwulan II 2026. Pelambatan tersebut terutama terjadi pada subsektor Perkebunan Kelapa Sawit yang tumbuh 3,16% (yoy) dengan pangsa 91,90% terhadap kredit Pertanian, dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,58% (yoy).

Selain itu, kinerja kredit perdagangan juga mengalami pelambatan pada triwulan laporan dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Kredit perdagangan pada triwulan II 2026 dilaporkan senilai Rp17,69 triliun atau tumbuh sebesar 2,40% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 2,83% (yoy).

Akselerasi pertumbuhan pada sektor industri pengolahan berkontribusi menahan moderasi penyaluran kredit dengan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 40,42% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 28,63% (yoy). Akselerasi tersebut terutama terjadi pada subsektor Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit sebesar 52,91% (yoy) dengan pangsa 54,1% terhadap kredit Industri Pengolahan, dari triwulan sebelumnya tumbuh 40,79% (yoy).

Di tengah moderasi penyaluran kredit, risiko kredit korporasi tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari kualitas penyaluran kredit kepada korporasi, terutama



**Tabel 3.1.** Kredit Lokasi Proyek Menurut Lapangan Usaha (Rp Triliun)

| Rp Miliar                       | 2024          |               |               |               | 2025          |               |               |               | 2026          |               | Pangsa Tw II 2026 | % YoY Tw II 2026 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 | I             | II            | III           | IV            | I             | II            | III           | IV            | I             | II            |                   |                  |
| Pertanian                       | 33,11         | 32,12         | 32,21         | 32,73         | 33,30         | 34,50         | 33,21         | 34,57         | 34,55         | 35,66         | 19,36             | 3,35             |
| Pertambangan                    | 11,23         | 9,96          | 6,69          | 8,70          | 11,95         | 17,65         | 19,38         | 13,89         | 13,93         | 14,58         | 7,91              | -17,39           |
| Perindustrian                   | 35,18         | 38,85         | 34,37         | 34,73         | 34,89         | 36,79         | 41,94         | 45,90         | 44,88         | 51,67         | 28,05             | 40,46            |
| Listrik, gas dan air            | 0,49          | 0,43          | 0,35          | 0,30          | 0,23          | 0,16          | 0,11          | 0,22          | 0,20          | 0,21          | 0,11              | 31,15            |
| Konstruksi                      | 3,94          | 4,23          | 4,29          | 4,58          | 4,32          | 4,44          | 2,79          | 3,01          | 3,02          | 3,09          | 1,68              | -30,43           |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 15,63         | 16,03         | 17,21         | 15,71         | 17,37         | 17,27         | 16,76         | 17,17         | 17,86         | 17,69         | 9,60              | 2,44             |
| Pengangkutan, pergudangan       | 3,57          | 3,70          | 3,09          | 3,49          | 3,89          | 3,59          | 3,70          | 3,97          | 4,22          | 4,15          | 2,25              | 15,47            |
| Jasa                            | 6,58          | 6,57          | 6,71          | 6,61          | 6,79          | 6,97          | 7,21          | 7,40          | 7,36          | 6,01          | 3,26              | -13,80           |
| Rumah Tangga dan Lainnya        | 41,73         | 42,61         | 43,82         | 45,10         | 45,91         | 46,45         | 47,22         | 48,00         | 48,61         | 51,16         | 27,77             | 10,14            |
| <b>Total</b>                    | <b>151,47</b> | <b>154,50</b> | <b>148,75</b> | <b>151,95</b> | <b>158,66</b> | <b>167,82</b> | <b>172,32</b> | <b>174,13</b> | <b>174,63</b> | <b>184,21</b> | <b>100,00</b>     | <b>9,77</b>      |

Sumber: Bank Indonesia, diolah

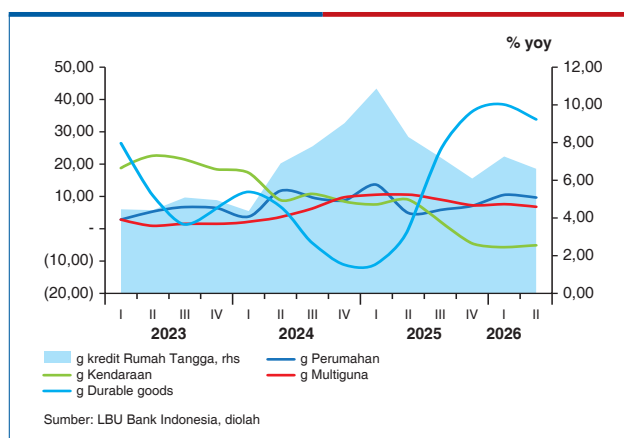
pada sektor-sektor utama selama triwulan II 2026 yang tetap terjaga dalam level yang rendah. Hal ini terlihat pada rasio *Non-Performing Loan (NPL)* pada sektor perindustrian, pertanian, dan perdagangan pada triwulan II 2026 masing-masing pada level 0,23%; 1,09%; dan 2,93% yang masih berada di bawah *threshold* 5% yang ditetapkan.

## 1.2. Pembiayaan Rumah Tangga

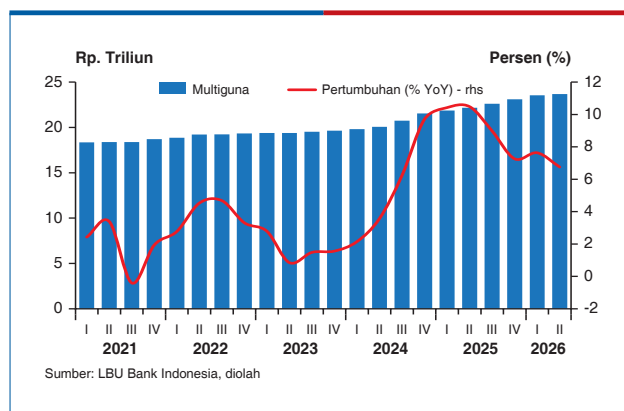
Perkembangan kinerja kredit rumah tangga termoderasi pada triwulan II 2026. Kinerja penyaluran Kredit RT pada triwulan laporan tercatat tumbuh 6,61% (yoy), sedikit melambat dibandingkan 7,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Moderasi kinerja penyaluran kredit RT terutama bersumber dari moderasi kredit perumahan, *durable goods*, dan multiguna. Di sisi lain, kredit kendaraan bermotor mengalami perbaikan sehingga menahan pelambatan lebih lanjut. Berdasarkan komponennya, kredit RT di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh Kredit Multiguna (54,55%) dan Kredit Pemilikan Rumah/KPR (34,45%).

Penyaluran Kredit Multiguna pada triwulan II 2026 tercatat mengalami pelambatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit multiguna yang tumbuh 6,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 7,63% (yoy). Secara *outstanding*,

Kredit Multiguna tercatat mengalami peningkatan dari Rp23,55 triliun menjadi Rp23,68 triliun.



**Grafik 3.3.** Pertumbuhan Kredit RT



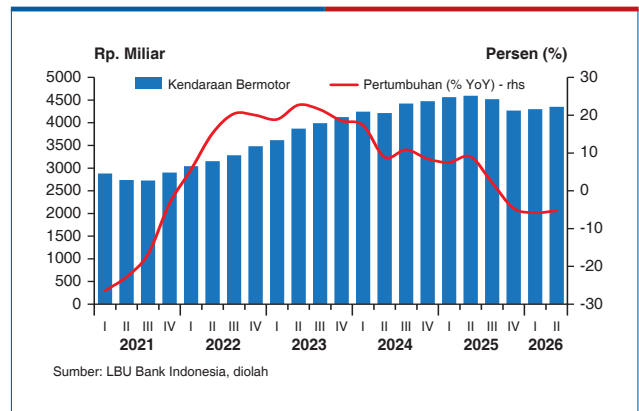
**Grafik 3.4.** Kredit Multiguna



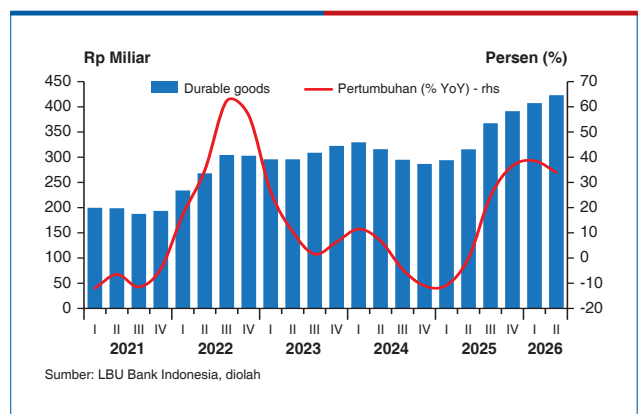
Lebih lanjut, moderasi pertumbuhan Kredit Perumahan terjadi utamanya pada kelompok rumah tipe 22 s.d. 70 dan rumah tipe 70 ke atas. Perumahan tipe 22 s.d. 70 pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 3,61% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,25% (yoy). Selain itu, rumah tipe 70 ke atas juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,43% (yoy) lebih rendah dari 13,67% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, penyaluran KKB tetap berkontraksi, meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Kredit kendaraan bermotor pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 5,25% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,81% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh kredit kendaraan roda empat yang berkontraksi 8,91% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,01% (yoy). Di sisi lain, KKB Sepeda Motor mengalami penurunan, yaitu tumbuh 30,14% (yoy) dari sebelumnya 30,53% (yoy).

Lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit *durable goods* tercatat mengalami moderasi dari semula sebesar 38,65% (yoy) menjadi 33,99% (yoy). Berdasarkan nominalnya, penyaluran kredit *durable goods* meningkat dari Rp407,50 miliar menjadi Rp423,18 miliar. Moderasi tersebut utamanya disebabkan oleh alokasi kredit peralatan lainnya (pangsa 83,54%) yang tumbuh melambat pada 34,90% (yoy), dibandingkan sebelumnya 37,45% (yoy), dan kredit kepemilikan



Grafik 3.6. Kredit Kendaraan Bermotor



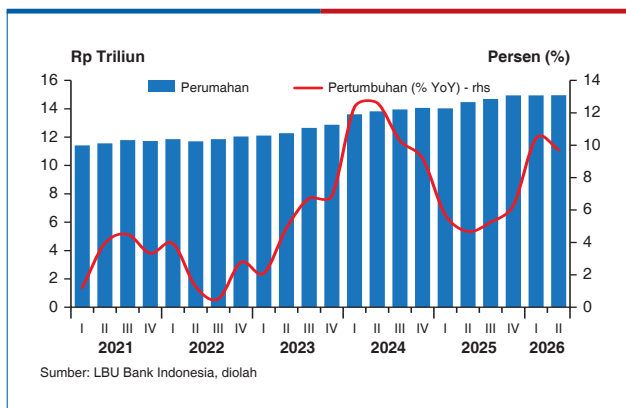
Grafik 3.7. Kredit Durable Goods

komputer dan alat komunikasi (pangsa 11,01%) yang tumbuh melambat pada 31,39% (yoy) dibandingkan sebelumnya 50,45% (yoy).

Dari sisi risiko kredit, pada triwulan II 2026, kualitas kredit konsumsi terpantau dalam level yang terjaga di bawah ambang batas (*threshold*) 5%. NPL kredit konsumsi sebesar 0,66%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya 0,67%.

### 1.3. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juni 2026 memutuskan untuk meningkatkan BI Rate ke level 5,75%. Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah serta menjaga pencapaian sasaran inflasi



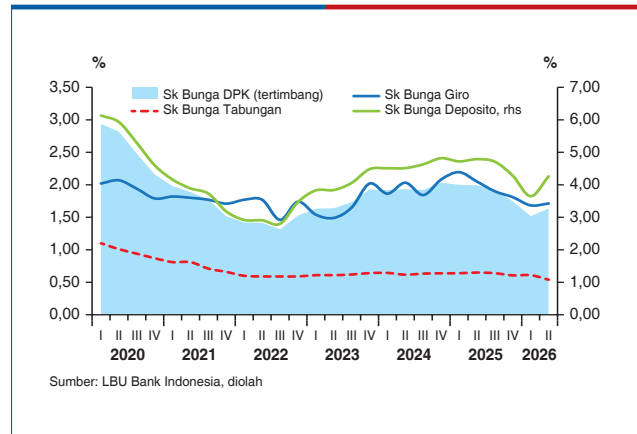
Grafik 3.5. Kredit Perumahan



2026–2027 dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$ . Secara teoritis, perubahan BI Rate akan ditransmisikan ke suku bunga DPK dan suku bunga kredit perbankan.

Meskipun demikian, perkembangan suku bunga kredit bank umum di wilayah Riau pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 8,98%, turun 3 basis poin (bps) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,01%. Ditinjau dari jenis penggunaannya, penurunan suku bunga terjadi pada kredit investasi dan kredit modal kerja. Suku bunga kredit Investasi triwulan II 2026 sebesar 8,53%, dibandingkan triwulan sebelumnya pada 8,65% atau turun 12 bps. Sejalan dengan itu, suku bunga kredit modal kerja triwulan II 2026 sebesar 8,11%, dibandingkan triwulan sebelumnya 8,15% atau turun 4 bps. Akan tetapi, suku bunga kredit konsumsi triwulan II 2026 meningkat dari 9,97% menjadi 10,05% pada triwulan II 2026 atau naik 8 bps.

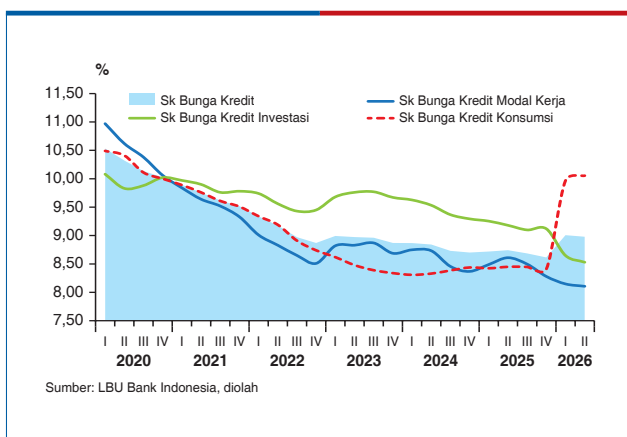
Di sisi penghimpunan DPK, rerata tertimbang suku bunga simpanan di perbankan di Provinsi Riau tercatat sebesar 1,63%, atau naik 11bps dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,52%. Peningkatan suku bunga simpanan terjadi pada deposito dan giro. Suku bunga dalam bentuk deposito tercatat sebesar 4,26% pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan lalu yaitu 3,65%. Sementara itu, tingkat suku bunga giro juga tercatat naik menjadi 1,71% dari 1,68%. Di sisi lain, suku bunga tabungan turun menjadi 0,54%, dari sebelumnya 0,61%.



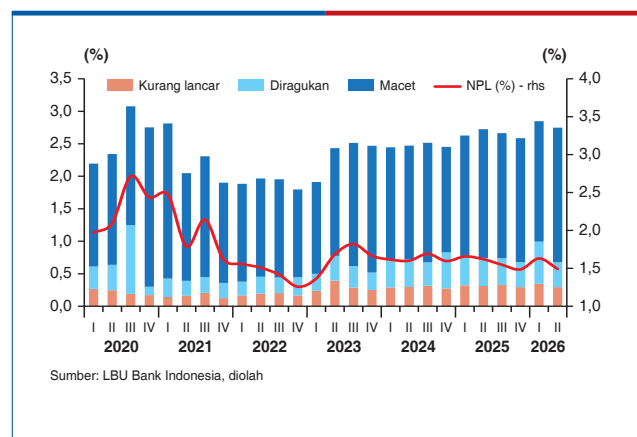
Grafik 3.9. Suku Bunga DPK Perbankan Riau

#### 1.4. Kualitas Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bank Umum

Kualitas kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 membaik, tercermin dari NPL yang mengalami penurunan. NPL sebagai indikator kualitas kredit yang disalurkan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,49%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,63%. Rasio kredit bermasalah tersebut masih jauh berada di bawah *threshold* yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Ditinjau lebih lanjut, penurunan jumlah kredit bermasalah terjadi pada kategori dari "Kurang Lancar" dan "Diragukan".



Grafik 3.8. Suku Bunga Kredit Perbankan Riau



Grafik 3.10. Perkembangan NPL Kredit

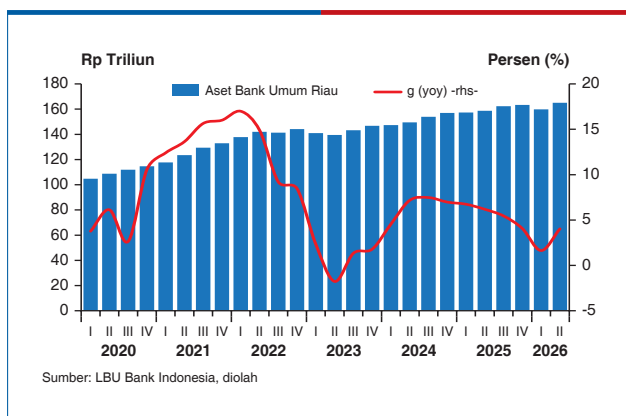
## 2. TOTAL ASET DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

### 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset perbankan di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,63% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,64% (yoy). Dilihat dari nilainya, total aset bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan mencapai Rp165,07 triliun, naik dari triwulan sebelumnya yang tercatat Rp159,86 triliun.

Berdasarkan kelompok kepemilikan Bank, pertumbuhan nilai aset perbankan di Provinsi Riau terjadi pada seluruh jenis bank baik BUMN/D maupun swasta. Nilai aset perbankan BUMN/D (pangsa 70,12%) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp115,75 triliun, naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp114,34 triliun. Sementara itu, nilai aset bank swasta (pangsa 29,88%) tercatat sebesar Rp49,32 triliun, naik dari triwulan sebelumnya sebesar Rp45,52 triliun.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, penurunan nilai aset terjadi pada kegiatan bank konvensional dan syariah. Nilai aset bank konvensional (pangsa 73,45%) pada triwulan I 2026 terpantau sebesar Rp117,41 triliun, sedikit menurun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp118,98 triliun. Sementara itu, nilai aset bank syariah (pangsa 26,55%) terpantau sebesar Rp42,45 triliun, juga sedikit turun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp44,39 triliun.

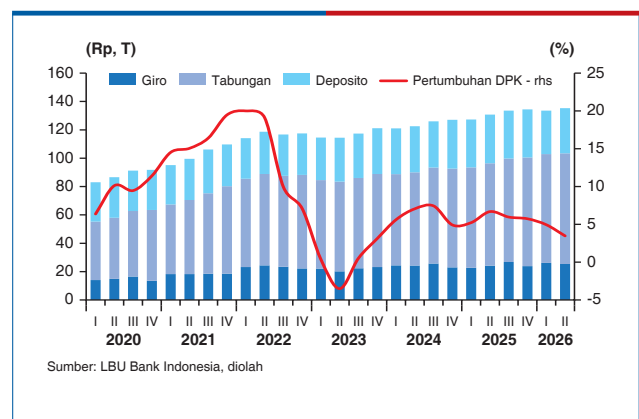


Grafik 3.11. Perkembangan Aset Perbankan Riau

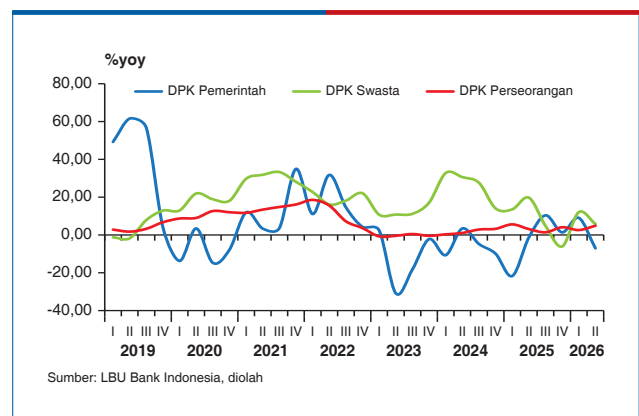
### 2.2. Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan DPK perbankan di Provinsi Riau tercatat mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah DPK perbankan di Riau pada triwulan II 2026 secara nominal tercatat sebesar Rp135,24 triliun, tumbuh 3,47% (yoy) atau lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 4,95% (yoy) dengan nominal Rp133,60 triliun.

Berdasarkan kepemilikannya, DPK perbankan Provinsi Riau pada triwulan laporan masih didominasi oleh DPK perorangan (66,50%) dan swasta (27,53%). Sementara itu, DPK Pemerintah memiliki porsi sebesar 6,78%.



Grafik 3.12. Perkembangan DPK Perbankan Riau



Grafik 3.13. DPK Berdasarkan Kepemilikan

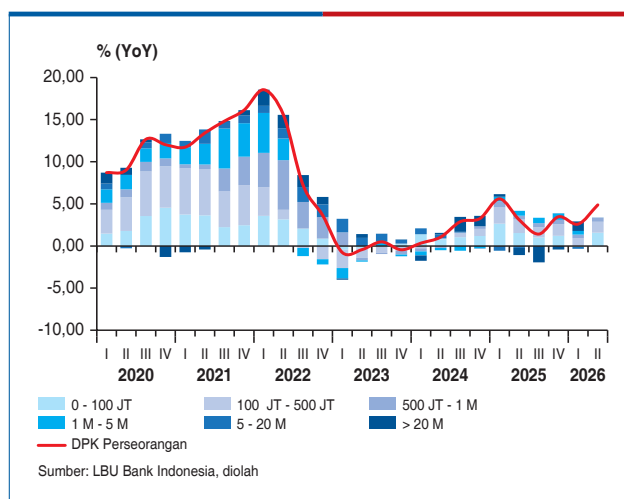
Berdasarkan golongan nasabah, pelambatan pertumbuhan DPK di triwulan laporan bersumber dari pelambatan pertumbuhan DPK pada golongan pemerintah dan swasta. DPK Pemerintah dan DPK Swasta masing-masing tumbuh -7,00% (yoy) dan 5,87% (yoy), dibandingkan sebelumnya tumbuh 9,09% (yoy) dan 12,11% (yoy). Akan tetapi, DPK Perseorangan tumbuh 4,87% (yoy), lebih tinggi dari sebelumnya yang tumbuh 2,60% (yoy).

Berdasarkan jenis simpanannya, DPK perbankan masih didominasi oleh tabungan dengan pangsa sebesar 57,74%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 23,49% dan 18,77%. Pada triwulan II 2026 pelambatan kinerja penghimpunan DPK terjadi karena melambatnya tabungan dan giro. Sementara itu, penghimpunan deposito tercatat tumbuh lebih tinggi sehingga menahan pelambatan DPK secara keseluruhan.

Tabungan tumbuh positif sebesar 8,04% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yaitu 8,32% (yoy). Nominal tabungan mengalami peningkatan dari Rp76,72 triliun menjadi Rp78,09 triliun. Sementara itu, deposito secara nominal tercatat sebesar Rp31,77 triliun atau terkoreksi 7,24% (yoy), setelah sebelumnya terkoreksi 9,11% (yoy). Sementara itu, nilai giro tercatat sebesar Rp25,38 triliun menurun dari triwulan lalu sebesar Rp26,18 triliun, atau melandai dari 15,34% (yoy) menjadi 4,98% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan nominal simpanan, pangsa DPK perorangan dengan nilai nominal di bawah Rp1 miliar memiliki pangsa terbesar mencapai 73,07%, diikuti dengan kelompok deposan dengan nominal di antara Rp1 miliar – Rp5 miliar, dan nominal di atas Rp 5 miliar dengan masing-masing pangsa sebesar 16,85% dan 10,08%.

Berdasarkan kelompok nominalnya, akselerasi pertumbuhan DPK terutama terjadi pada kategori kelompok deposan dengan nominal simpanan antara di bawah Rp1 miliar dengan simpanan mencapai Rp65,72 triliun, atau tumbuh 4,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,20% (yoy). Selanjutnya, kelompok deposan



Grafik 3.14. DPK Perorangan per Kelompok Nominal

dengan diatas Rp5 miliar serta Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar masing-masing juga mengalami peningkatan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,42% (yoy) dan 2,81% (yoy) dari sebelumnya mencapai 2,58% (yoy) dan -3,66% (yoy).

### 3. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN SECARA SPASIAL

#### 3.1. Penyaluran Kredit Spasial

Secara spasial, pangsa kredit terbesar terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Kampar. Sejalan dengan pelambatan penyaluran kredit Provinsi Riau di triwulan II 2026, pertumbuhan kredit pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tercatat lebih rendah, kecuali di Kab. Indragiri ilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru yang memiliki pangsa kredit terbesar di Riau (31,38%) mengalami pertumbuhan 21,19% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akan tetapi, Kota Dumai yang memiliki pangsa kredit terbesar kedua di Riau (18,80%) mengalami pelambatan dari 38,80% (yoy) menjadi 34,42% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, Kabupaten Kampar yang memiliki pangsa penyaluran



Tabel 3.2. Perkembangan Kredit di Riau Secara Spasial

| No | Kab/Kota               | Kredit Tw.II 2026 |            | g Tw.I 2026<br>(yoy) | g Tw.II 2026<br>(yoy) | Arah<br>Pertumbuhan |
|----|------------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                        | Rp (Miliar)       | Pangsa (%) |                      |                       |                     |
| 1  | Kab. Kampar            | 17.438            | 9,47       | 16,29                | -8,40                 | ↓                   |
| 2  | Kab. Bengkalis         | 7.581             | 4,12       | 4,39                 | -4,15                 | ↓                   |
| 3  | Kab. Indragiri Hulu    | 6.270             | 3,40       | 3,43                 | -2,60                 | ↓                   |
| 4  | Kab. Indragiri Hilir   | 9.098             | 4,94       | -9,03                | -3,41                 | ↑                   |
| 5  | Kab. Rokan Hulu        | 8.693             | 4,72       | -26,06               | -48,66                | ↓                   |
| 6  | Kab. Rokan Hilir       | 9.054             | 4,92       | 17,68                | 19,71                 | ↑                   |
| 7  | Kab. Pelalawan         | 11.072            | 6,01       | 10,08                | 17,21                 | ↑                   |
| 8  | Kab. Siak              | 12.617            | 6,85       | -1,11                | 20,36                 | ↑                   |
| 9  | Kab. Kuantan Singingi  | 5.014             | 2,72       | 5,54                 | 6,79                  | ↑                   |
| 10 | Kab. Kepulauan Meranti | 4.939             | 2,68       | -18,85               | 98,30                 | ↑                   |
| 11 | Kota Pekanbaru         | 57.798            | 31,38      | 14,03                | 21,19                 | ↑                   |
| 12 | Kota Dumai             | 34.640            | 18,80      | 38,80                | 34,42                 | ↓                   |
|    | Provinsi Riau          | 184.213,61        | 100,00     | 10,15                | 9,73                  | ↓                   |

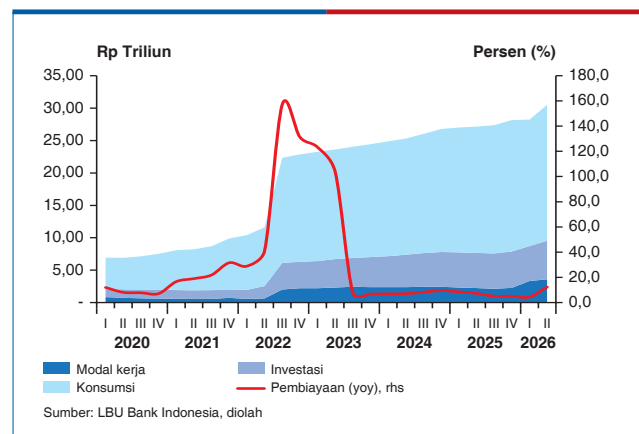
Sumber: Bank Indonesia, diolah

kredit ketiga terbesar di Riau (9,47%) mencatatkan kontraksi 8,40% (yoy) dari sebelumnya 16,29% (yoy).

#### 4. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

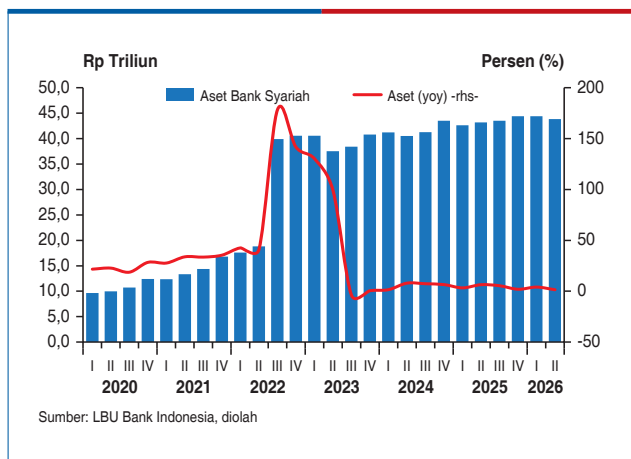
Kinerja penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada triwulan II 2026 terpantau terkaselerasi di angka 12,40% (yoy), dari triwulan sebelumnya sebesar 4,48% (yoy). Pembiayaan konsumsi (pangsa 68,71%) pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 7,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu sebesar 1,20% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi (pangsa 19,55%) mencatatkan perbaikan dari -0,53% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 9,89% (yoy) pada triwulan laporan. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja (pangsa 11,74%) mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 43,15% (yoy) menjadi tumbuh 59,84% (yoy).

Dari sisi kualitas pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah Riau tercatat sebesar 2,47%, memburuk dari triwulan sebelumnya sebesar 2,40%. Selain itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada triwulan II 2026 sebesar 115,80% tercatat

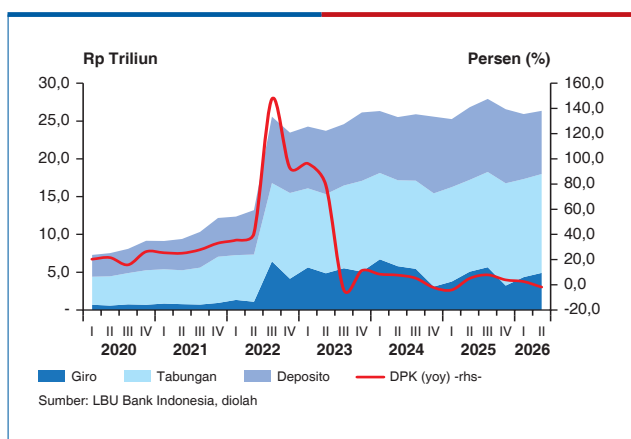


Grafik 3.15. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 108,84%. Rasio FDR yang mencapai lebih dari 100% mengindikasikan bahwa perbankan syariah di Provinsi Riau membutuhkan sumber pendanaan selain DPK di Provinsi Riau, seperti sumber pendanaan dari kantor pusat. Peningkatan FDR disebabkan oleh akselerasi pertumbuhan penyaluran pembiayaan, dan seiring dengan peningkatan NPF mengindikasikan perbankan syariah Riau perlu menjaga kualitas penyaluran pembiayaan.



Grafik 3.16. Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Grafik 3.17. Perkembangan DPK Perbankan Syariah

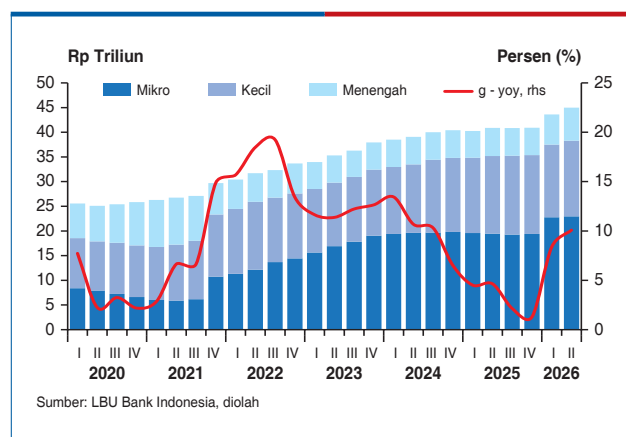
Berbanding terbalik dengan penyaluran pembiayaan, nilai aset perbankan syariah pada triwulan II 2026 mencatatkan pelambatan. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada triwulan II 2026 sebesar 1,54% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,15% (yoy). Secara nominal, perkembangan aset tercatat menurun dari Rp44,39 triliun menjadi Rp43,83 triliun. Akan tetapi, kinerja DPK perbankan syariah mencatatkan penurunan, yaitu terkoreksi 1,79% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,62% (yoy). Secara nominal, DPK Syariah pada triwulan II 2026 tercatat senilai Rp26,34 triliun, lebih tinggi dari Rp25,92 triliun pada triwulan sebelumnya.

Ditinjau dari jenis simpanannya, tabungan masih mendominasi struktur DPK perbankan Syariah dengan pangsa sebesar 50,11%, diikuti oleh deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 33,14% dan 16,75%.

## 5. PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Intermediasi UMKM tumbuh lebih cepat dengan tetap disertai kualitas kredit yang terjaga pada level rendah. Penyaluran kredit UMKM terpantau tumbuh 10,08% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu 8,38% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, porsi kredit UMKM terhadap total kredit terpantau sedikit turun pada level 39,82% dari triwulan sebelumnya sebesar 39,57%. Sejalan dengan percepatan pertumbuhan kredit UMKM, jumlah rekening kredit UMKM mengalami peningkatan menjadi 607.106 pada triwulan II 2026, dari 602.778 rekening pada triwulan I 2026. Secara nominal, *oustanding* pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yaitu dari Rp43,61 triliun menjadi Rp44,99 triliun.

Kinerja positif penyaluran kredit UMKM juga didukung oleh implementasi kebijakan penyaluran kredit/ pembiayaan kepada UMKM berupa penetapan proporsi kredit terhadap total kredit yang disalurkan



Grafik 3.18. Perkembangan dan Pertumbuhan Kredit UMKM

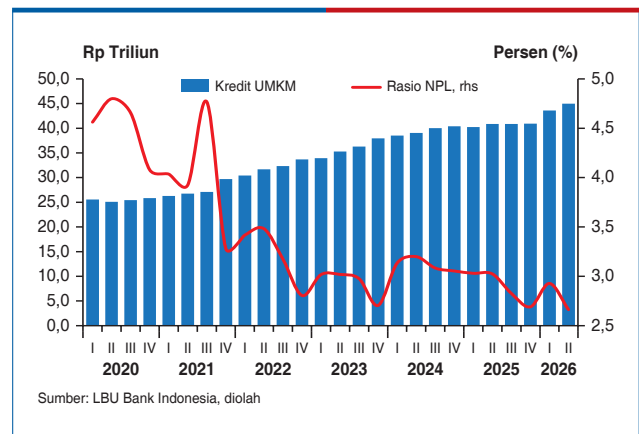


perbankan. Berdasarkan kategori debitur, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Riau didominasi oleh usaha mikro dengan pangsa 52,19%, diikuti oleh usaha kecil dan menengah dengan pangsa masing-masing sebesar 33,78% dan 14,03% terhadap total kredit UMKM.

Kredit UMKM pada kelompok usaha mikro di triwulan II 2026 tercatat tumbuh 18,05% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,24% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM pada kelompok usaha kecil terpantau berkontraksi 2,72% (yoy), dari sebelumnya berkontraksi 3,41% (yoy). Sejalan dengan kelompok usaha mikro, UMKM pada kelompok usaha menengah tumbuh terakselerasi 18,22% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,14% (yoy).

Berdasarkan sektor usahanya, percepatan penyaluran kredit UMKM terutama disumbang oleh sektor pertanian dan jasa. Penyaluran kredit UMKM pada sektor pertanian (pangsa 49,74%) tercatat tumbuh lebih tinggi dari 6,01% (yoy) menjadi 6,48% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit ke sektor jasa (pangsa 13,10%) terakselerasi dari 59,76% (yoy) menjadi 74,91% (yoy).

Namun demikian, pertumbuhan kredit UMKM tertahan oleh kredit pada sektor perindustrian (pangsa 3,97%) yang mencatatkan kontraksi sebesar 0,57% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berhasil tumbuh 7,26% (yoy).



Grafik 3.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM

Kualitas kredit UMKM pada triwulan II 2026 terjaga pada level yang rendah serta di bawah ambang batas *threshold* sebesar 5%. Kondisi ini merata terjadi pada UMKM Menengah, Kecil, dan Mikro. NPL kredit UMKM di Provinsi Riau pada triwulan laporan terpantau 2,93%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,69%.



## BOKS 2

### KARYA RIAU BERTUAH 2026: MENDORONG UMKM NAIK KELAS DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau secara konsisten mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, peningkatan akses pembiayaan, serta akselerasi digitalisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan *end-to-end* yang mencakup pembinaan, pendampingan, kurasi produk, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran. Implementasi strategi tersebut antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan event Karya Riau Bertuah (KRB) setiap tahunnya.

Penyelenggaraan Karya Riau Bertuah pada 30 Juni hingga 5 Juli 2026 di Living World Pekanbaru menjadi salah satu instrumen penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam rangka memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mendorong adopsi digitalisasi pada sektor UMKM. Di tahun 2026, kegiatan ini menghadirkan berbagai produk UMKM unggulan Provinsi Riau dari sektor *fashion*, *food & beverages*, dan *kriya*.

Penyelenggaraan KRB 2026 mencatat nilai transaksi lebih dari Rp1,5 miliar atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan meningkatnya permintaan terhadap produk UMKM lokal serta efektivitas kegiatan promosi dalam mendorong transaksi dan perluasan pasar bagi pelaku usaha. Di samping itu, event dimaksud juga berhasil mempertemukan UMKM dengan berbagai calon pembeli potensial dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dari sisi partisipasi masyarakat, jumlah pengunjung tercatat mencapai sekitar 8.500 orang per hari selama pelaksanaan kegiatan. Tingginya jumlah kunjungan turut mendukung peningkatan eksposur produk UMKM, memperluas interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta membuka peluang pembentukan jejaring usaha yang lebih luas, sehingga diharapkan pada gilirannya berkontribusi terhadap penguatan kapasitas pemasaran dan daya saing UMKM Provinsi Riau.



Selain sebagai sarana promosi dan pemasaran, KRB juga menjadi bagian dari program pembinaan UMKM yang terintegrasi. Melalui proses kurasi dan pendampingan, UMKM potensial dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi pada tingkat yang lebih luas guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini juga memfasilitasi *business matching* antara UMKM dan Lembaga keuangan formal guna memperkuat akses pembiayaan dan mendukung peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha.

Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, KRB 2026 juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan yaitu *talkshow* tentang kopi liberika, pengembangan fashion, kuliner khas Riau, edukasi ekonomi digital, perlindungan konsumen, ekonomi berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga kompetisi kopi, dan kampanye produk pangan alternatif bersama chef nasional.

Ke depan, Karya Riau Bertuah diharapkan terus mendukung penguatan peran UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Upaya peningkatan kualitas produk, penguatan tata kelola usaha, akselerasi digitalisasi, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran perlu terus didorong guna meningkatkan daya saing UMKM dan memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.





BM 7102 TP  
12 29

BANK INDONESIA

BANK INDONESIA

PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU

SEROMATI

SEROMATI  
2026

Rupiah Memberi Makna di Bulan Per...

13 FEBRUARI - 15 MARET 2026



## BAB 4

# PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

- Pada triwulan II 2026, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari meningkatnya tekanan *net-outflow* uang kartal. Pergerakan *inflow* (uang masuk) dan *outflow* (uang keluar) di Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat net-outflow sebesar Rp806,63 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net-outflow* sebesar Rp75,89 miliar.

## 1. KONDISI UMUM

Pada triwulan II 2026, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari meningkatnya tekanan *net-outflow* uang kartal. Pergerakan *inflow* (uang masuk) dan *outflow* (uang keluar) di Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat *net-outflow* sebesar Rp806,63 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net-outflow* sebesar Rp75,89 miliar. Peningkatan *net-outflow* tersebut mengindikasikan lebih tingginya kebutuhan uang kartal pada triwulan laporan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat pada HBKN Idul Adha dan libur sekolah.

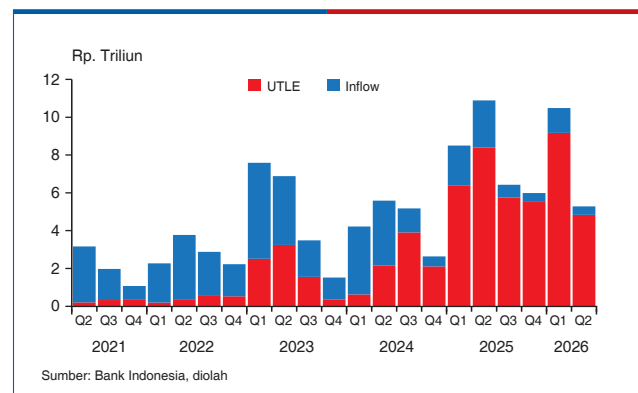
Sejalan dengan hal tersebut, transaksi nontunai di Riau pada triwulan II 2026 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), volume transaksi kliring di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 2,54% (yoy), masih lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dengan kontraksi sebesar 18,03% (yoy). Selain itu, transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 19,22% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,99% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan transaksi menggunakan Uang Elektronik (UE) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang masing-masing tumbuh 41,32% (yoy) dan 108,28% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing 38,89% (yoy) dan 77,78% (yoy). Di sisi lain, volume transaksi melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan laporan mengalami pelambatan, utamanya penggunaan kartu kredit yang hanya mampu tumbuh 21,39% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 27,28% (yoy).

## 2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI RIAU

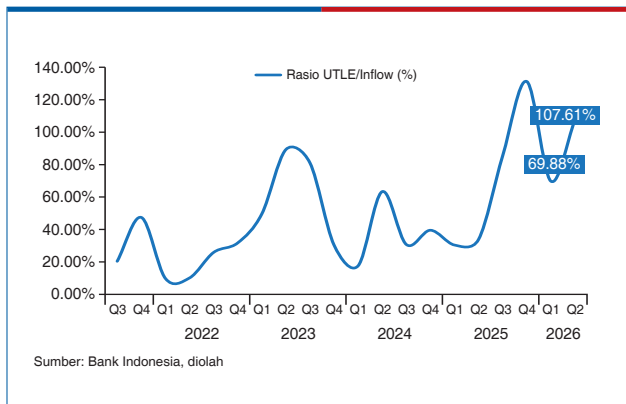
### 2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar di Bank Indonesia Riau (*Inflow – Outflow*)

Aktivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) atau transaksi pembayaran tunai di Bank Indonesia tercermin dari beberapa indikator, di antaranya: (1) Jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*), (2) Jumlah aliran uang masuk ke perbankan (*inflow*), (3) Kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE), dan (4) Jumlah temuan uang palsu.

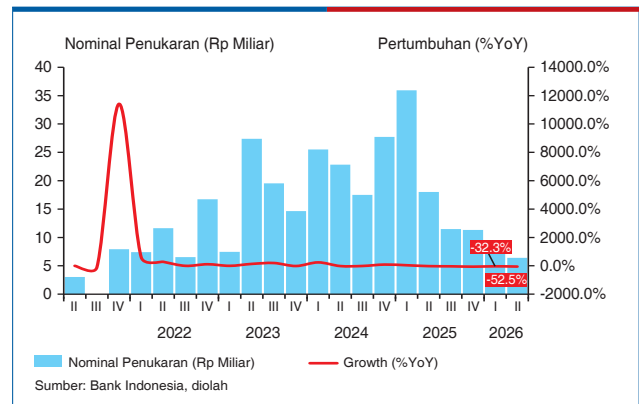
Pada triwulan II 2026, sistem pembayaran tunai di Provinsi Riau tercatat dalam posisi *net-outflow* sebesar Rp806,63 miliar, meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net-outflow* sebesar Rp75,89 miliar. Tingginya *net-outflow* tersebut utamanya dipengaruhi oleh *inflow* uang tunai yang mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 65,77% (qto), setelah pada triwulan sebelumnya *inflow* uang tunai tumbuh sangat tinggi hingga 210,06% (qto) akibat penukaran uang tunai yang masif selama periode HBKN Ramadan dan Idulfitri di triwulan tersebut.



Grafik 4.1. Perkembangan UTLE yang Dimusnahkan



Grafik 4.2. Perkembangan Rasio UTLE terhadap Total Inflow



Grafik 4.3. Nominal Penukaran Uang Kartal

## 2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Untuk menjamin kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, serta tepat waktu dan layak edar (*fit for circulation*). Oleh sebab itu, Bank Indonesia Provinsi Riau secara berkala melakukan pelayanan penyediaan uang kartal kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perbankan). Pelayanan secara langsung dilakukan dalam bentuk penukaran uang, serta kas keliling yang diselenggarakan di dalam dan luar kota. Sementara itu, pelayanan penyediaan uang kartal secara tidak langsung dilakukan melalui penarikan uang oleh perbankan dan kas titipan di beberapa daerah di Provinsi Riau.

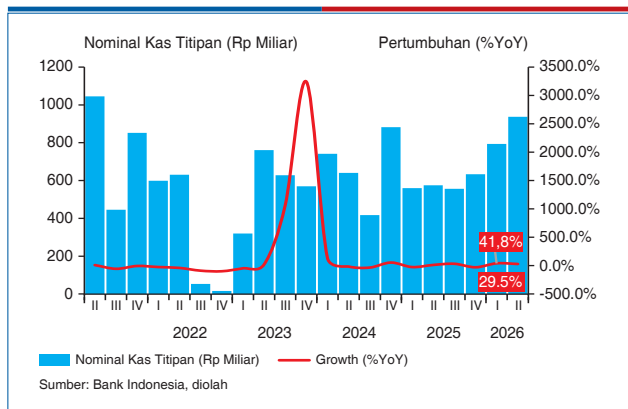
Selain itu, untuk menjamin terlaksananya *clean money policy*, pada triwulan II 2026, Bank Indonesia Provinsi Riau melakukan pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar sebesar 344,4% dari *inflow*. Kegiatan pemusnahan UTLE tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat.

Untuk mendorong *clean money policy* dimaksud, Bank Indonesia juga melakukan layanan kas yang dilaksanakan di dalam kantor maupun luar kantor. Dalam rangka meningkatkan sebaran uang layak edar di seluruh wilayah Provinsi Riau, Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 44 (empat puluh empat)

kantor bank umum, dalam melakukan penukaran UTLE. Sementara itu, untuk layanan yang bersifat langsung Bank Indonesia secara konsisten melakukan kegiatan kas keliling.

Pada triwulan II 2026 Bank Indonesia Provinsi Riau tercatat telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali kas keliling *retail* baik di dalam kota maupun di luar kota Pekanbaru. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat di Provinsi Riau. Selain itu, Bank Indonesia tetap mendorong pelaksanaan penukaran uang pecahan kecil di kantor-kantor cabang perbankan di Riau khususnya Kota Pekanbaru. Dengan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR, Bank Indonesia Provinsi Riau telah melaksanakan penukaran uang layak edar dengan nominal mencapai Rp6,40 miliar pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp8,10 miliar. Pellambatan nominal penukaran tersebut sejalan dengan termoderasinya permintaan masyarakat menjelang pasca HBKN Imlek dan Idulfitri 2026.

Sementara itu, kegiatan kas titipan di wilayah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu untuk memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas ke seluruh wilayah Provinsi Riau tercatat mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2026, volume kas titipan mencapai Rp935 miliar atau bertumbuh sebesar 29,5% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan



Grafik 4.4. Nominal Kas Titipan

ini sejalan dengan *restocking* pasca memenuhi kebutuhan masyarakat dalam momen HBKN Imlek dan Idulfitri yang bertepatan pada triwulan I 2026.

### 2.3. Temuan Uang Rupiah Tidak Asli / Palsu

Pada triwulan II 2026, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, baik dari laporan perbankan maupun berdasarkan laporan masyarakat, tercatat sebanyak 50 lembar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 100 lembar. Bank Indonesia terus berupaya dalam mengantisipasi penggunaan dan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya di masyarakat dengan senantiasa melakukan berbagai langkah, di antaranya: (1) memperluas keterjangkauan dan ketersediaan



Grafik 4.5. Perkembangan Temuan Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau

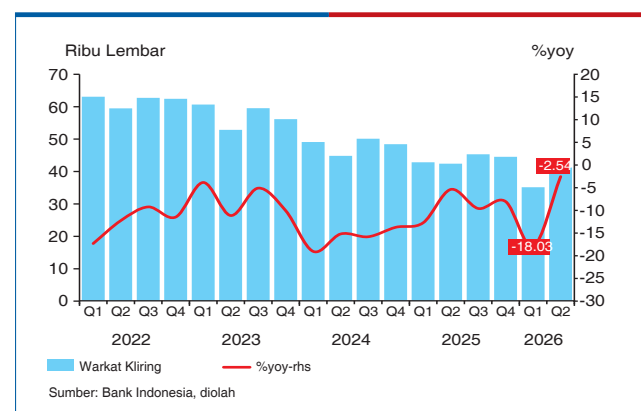
Uang Layak Edar di masyarakat, (2) mendorong pembayaran nontunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang, serta (3) meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

## 3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

Kinerja transaksi sistem pembayaran nontunai di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 khususnya melalui SKNBI, BI-RTGS, UE, dan akseptansi QRIS mengalami peningkatan. Di sisi lain, pertumbuhan penggunaan APMK, baik kartu kredit maupun debit oleh masyarakat Riau cenderung melambat. Selain itu, pelemahan mobilitas wisatawan yang keluar dari Provinsi Riau berimplikasi pada terkontraksinya pertumbuhan transaksi penukaran valuta asing sehingga transaksi pembelian valuta asing di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya.

### 3.1. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Volume transaksi ritel di Riau yang diproses melalui SKNBI pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 2,54% (yoy), masih lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga



Grafik 4.6. Perkembangan Transaksi Kliring (SKNBI) di Provinsi Riau



Tabel 4.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau

| RpMiliar                        | 2024   |        |           |           | 2025      |           |           |           | 2026      |           |
|---------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | I      | II     | III       | IV        | I         | II        | III       | IV        | I         | II        |
| Nilai Transaksi (Rp miliar)     | 35.830 | 40.733 | 43.460,15 | 51.740,79 | 43.606,73 | 41.318,21 | 46.684,10 | 47.767,29 | 52.049,16 | 50.485,00 |
| Volume Transaksi (lembar)       | 17.936 | 18.042 | 20.412,00 | 21.038,00 | 15.360,00 | 16.334,00 | 19.419,00 | 20.002,00 | 17.816,00 | 19.473,00 |
| Growth Nilai Transaksi (% yoy)  | -17,12 | -2,18  | -4,25     | -17,61    | 21,71     | 1,44      | 7,42      | -7,68     | 19,36     | 22,19     |
| Growth Volume Transaksi (% yoy) | -10,65 | 0,28   | -3,72     | -3,39     | -14,36    | -9,47     | -4,86     | -4,92     | 15,99     | 19,22     |

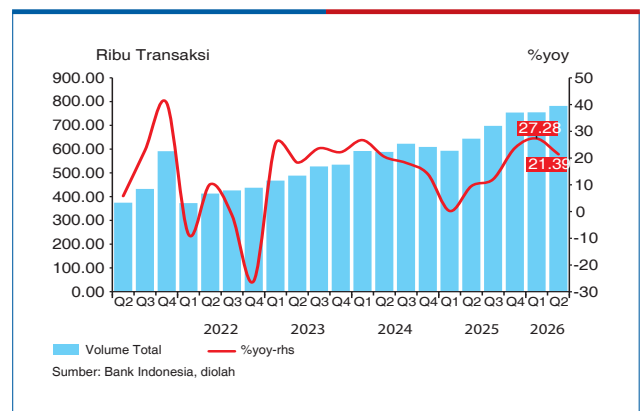
Sumber: Bank Indonesia

18,03% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nominal transaksi kliring mengalami perbaikan dengan peningkatan sebesar 3,35% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 17,18% (yoy). Secara spasial, transaksi pembayaran nontunai melalui transaksi SKNBI Nasabah di wilayah Kota Pekanbaru masih sangat mendominasi dengan pangsa 96,25%, sementara SKNBI Nasabah di Kota Dumai hanya sebesar 3,75%.

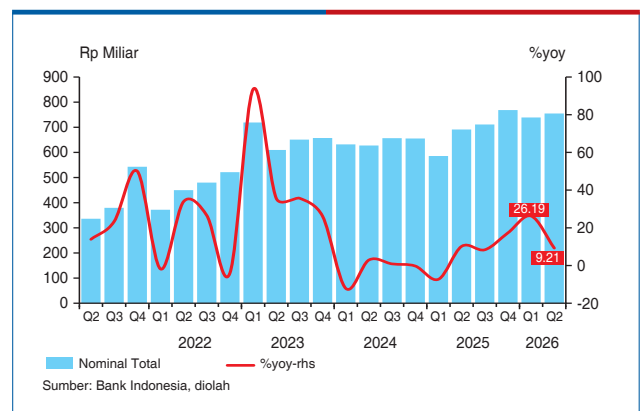
Moderasi transaksi SKNBI terjadi seiring dengan perluasan implementasi BI-FAST, serta pola *shifting* dari SKNBI ke BI-FAST yang menyediakan layanan lebih murah dan *real time*. Pada triwulan II 2026, volume dan nominal transaksi melalui BI-FAST tercatat tumbuh masing-masing sebesar 46,38% (yoy) dan 46,38% (yoy). Selain itu, transaksi melalui SKNBI yang masih berada dalam zona kontraksi juga mengindikasikan preferensi masyarakat pada penggunaan mekanisme pembayaran lainnya seperti Uang Elektronik dan QRIS.

### 3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Pertumbuhan nilai transaksi melalui BI-RTGS mencatatkan pertumbuhan pada triwulan II 2026. Dari segi pertumbuhan nominal, transaksi BI-RTGS tumbuh 22,19% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,36%. Pertumbuhan volume transaksi melalui BI-RTGS juga masih tumbuh sebesar 19,22% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,99% (yoy).



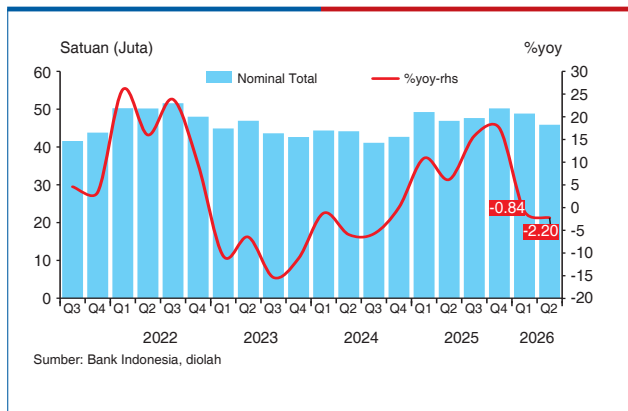
Grafik 4.7. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Riau



Grafik 4.8. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Riau

### 3.3. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

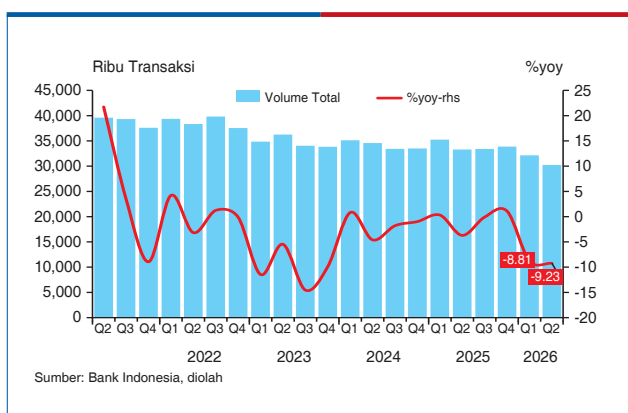
Pada triwulan II 2026, laju pertumbuhan volume transaksi menggunakan Kartu Kredit melambat. Volume transaksi menggunakan kartu kredit tercatat sebanyak 781,6 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 21,26% (yoy), melambat dibanding triwulan



Grafik 4.9. Perkembangan Volume Transaksi Kartu Debit di Riau

sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 27,28% (yoy). Peningkatan juga terlihat pada nominal transaksi menggunakan kartu kredit, pada triwulan II 2026 nilai transaksi tercatat sebanyak Rp753,84 miliar atau tumbuh 9,21% (yoy), lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 26,19% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi kartu debit terpantau mengalami kontraksi yang lebih dalam. Volume transaksi menggunakan Kartu Debit pada triwulan II 2026 tercatat sebanyak 30,24 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 9,23% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,81% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nominal transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan II 2026 tercatat senilai Rp46,08 triliun juga mengalami kontraksi 2,20% (yoy), lebih dalam



Grafik 4.10. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Debit di Riau

dibandingkan triwulan sebelumnya dengan kontraksi 0,84% (yoy).

Tersedianya berbagai instrumen pembayaran yang lebih beragam, seperti QRIS, turut menambah preferensi masyarakat untuk bertransaksi sehingga menyebabkan fluktuasi dalam volume maupun nilai transaksi menggunakan kartu di Provinsi Riau.

### 3.4 Transaksi Uang Elektronik

Pada triwulan II 2026, transaksi menggunakan Uang Elektronik (UE) tercatat mengalami peningkatan dari sisi nominal transaksi. Nominal transaksi UE terutama mengalami peningkatan pada klasifikasi nominal belanja, yaitu penggunaan UE yang tercatat tumbuh positif sebesar 41,32% (yoy) pada triwulan II 2026. Lebih lanjut, nominal transaksi belanja masih mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE dengan nilai Rp1,38 triliun (pangsa 73,9%), diikuti oleh transaksi transfer dengan nominal Rp434,67 miliar (pangsa 23,2%), serta transaksi tarik tunai dengan nominal Rp53,022 miliar (pangsa 2,8%). Secara keseluruhan, nominal transaksi UE di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 sebanyak Rp1,8 triliun. Dari sisi volume transaksi UE di Provinsi Riau, pada triwulan II 2026 juga mengalami pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, volume transaksi uang elektronik di Provinsi Riau tercatat sebanyak 27,66 juta transaksi atau tumbuh sebesar 41,3% (yoy).



Grafik 4.11. Nominal Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau

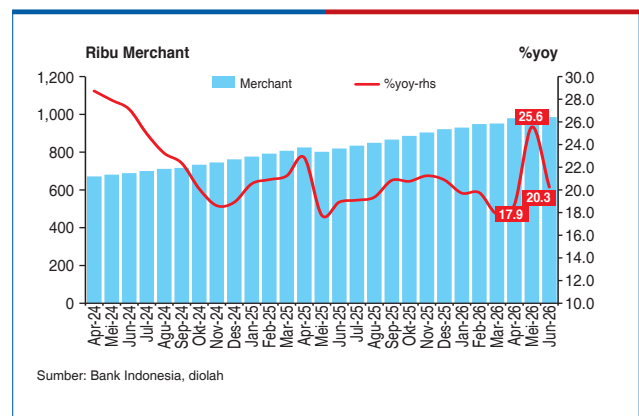


Tabel 4.2. Transaksi Uang Elektronik di Provinsi Riau

| Transaksi   | 2025          |                      |               |                      |               |                      |               |                      | 2026          |                      |               |                      |
|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|             | Tw.I          |                      | Tw.II         |                      | Tw.III        |                      | Tw.IV         |                      | Tw.I          |                      | Tw.II         |                      |
|             | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) | Volume (Ribu) | Nominal (Rp. Miliar) |
| Belanja     | 16.362.234    | 1.451.399            | 17.417.577    | 1.463.544            | 19.006.439    | 1.570.031            | 22.026.570    | 1.772.335            | 22.606.408    | 1.857.748            | 16.137.861    | 1.386.065            |
| Transfer    | 2.043.143     | 495.830              | 2.012.681     | 504.379              | 2.197.752     | 570.637              | 2.303.709     | 623.808              | 2.941.006     | 852.820              | 2.037.968     | 434.676              |
| Tarik Tunai | 156.180       | 58.245               | 146.274       | 52.863               | 191.943       | 61.692               | 224.334       | 62.572               | 233.286       | 67.157               | 158.480       | 53.022               |
| Total       | 18.561.557    | 2.005.475            | 19.576.532    | 2.020.786            | 21.396.134    | 2.202.360            | 24.554.613    | 2.458.714            | 25.780.700    | 2.777.725            | 18.334.309    | 1.873.763            |

Sumber: Bank Indonesia

Tren peningkatan nilai transaksi UE dipengaruhi oleh peningkatan preferensi konsumen menggunakan UE berbasis server, sejalan dengan semakin banyaknya penyedia layanan tersebut serta efisiensi dari transaksi penggunaan. Selain itu, pertumbuhan jumlah pengguna UE di Provinsi Riau pada triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan. Pada triwulan II 2026, jumlah pengguna UE tumbuh sebesar 53,39% atau sebanyak 18,39 juta pengguna, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebanyak Rp18,17 juta pengguna.



Grafik 4.13. Perkembangan Merchant QRIS di Riau

### 3.5. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui transformasi digital sistem pembayaran, Bank Indonesia turut berperan aktif memfasilitasi berbagai program elektronifikasi untuk

meningkatkan implementasi transaksi nontunai dan inklusi keuangan. Beberapa program yang telah dilakukan hingga triwulan II 2026, di antaranya: (1) memfasilitasi elektronifikasi transaksi Pemda, (2) monitoring penyaluran bantuan sosial nontunai, serta (3) mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi retail di sektor lainnya khususnya perluasan akseptansi QRIS di berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, penggunaan QRIS di Riau terus melandai. Hingga Juni 2026, jumlah merchant QRIS di Riau melandai sebesar 20,3% (yoy) dari semula 1 juta merchant pada bulan Mei 2026 menjadi 988,06 ribu merchant pada Juni 2026. Tren peningkatan jumlah merchant tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk selalu berupaya mendorong elektronifikasi di masyarakat.



Grafik 4.12. Jumlah Uang Elektronik di Provinsi Riau

Lebih lanjut, secara spasial mayoritas *merchant* QRIS di Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru (pangsa 47,2), Kota Dumai (pangsa 12,5%), serta Kabupaten Kampar (pangsa 8,1%).

Di sisi lain, jumlah transaksi melalui kanal pembayaran QRIS meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna/user QRIS. Jumlah pengguna QRIS di Provinsi Riau pada hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1,27 juta pengguna. Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti oleh peningkatan volume transaksi melalui kanal pembayaran QRIS. Pada triwulan II 2026, volume transaksi QRIS di Provinsi Riau tercatat sebesar 16,62 juta transaksi atau tumbuh 108,28% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, nominal transaksi QRIS pada triwulan laporan senilai Rp1,55 triliun atau dengan pertumbuhan 79,10% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nominal transaksi QRIS senilai Rp1,52 triliun dengan pertumbuhan 57,33% (yoy).

Dalam rangka mendorong transaksi digital, Bank Indonesia Provinsi Riau bersama *stakeholders* terkait telah melakukan berbagai program pada triwulan II 2026. Pertama, perluasan implementasi QRIS sebagai kanal transaksi digital, yang dilakukan melalui:

1. Sosialisasi dan *User Experience* QRIS Rp1,- kepada pelajar, mahasiswa, serta komunitas di Provinsi Riau.
2. Sosialisasi dan Edukasi QRIS serta Perlindungan Konsumen pada kegiatan *Edutech Summit 2026* Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2026.
3. Kegiatan TANJAK, yaitu pendekatan edukasi QRIS dalam sektor Pendidikan melalui pelaksanaan *Try Out* Akbar persiapan SNBT 2026 yang ditujukan kepada siswa SMA se-Provinsi Riau dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

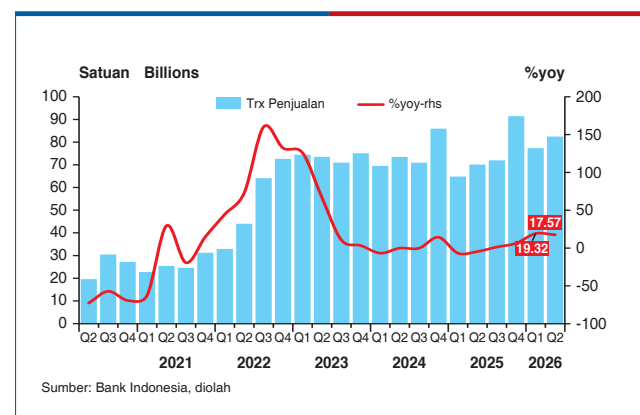
Kedua, perluasan Digitalisasi Daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan ekosistem digitalisasi pembayaran di lingkup Pemerintah Daerah.

### 3.6. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Pada triwulan II 2026, transaksi pembelian valuta asing di Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari 14 KUPVA-BB yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, nominal transaksi pembelian pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp83,63 miliar, atau tumbuh sebesar



Grafik 4.14. Perkembangan Pembelian Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



Grafik 4.15. Perkembangan Penjualan Valuta Asing Melalui KUPVA BB di Riau



17,66% (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,69% (yoy). Sejalan dengan tren aktivitas pembelian, transaksi jual juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya tercatat senilai Rp77,44 miliar pada triwulan I 2026

menjadi Rp82,5 miliar pada triwulan II 2026, atau tumbuh sebesar 17,57% (yoy), hal ini sejalan dengan minimnya aktivitas wisata dari dan/atau menuju ke Provinsi Riau.



## BOKS 3

### TAMASYA QRIS: Hobinya Banyak, QRIS-nya Satu!

#### Memperkuat Akseptasi dan Kualitas Penggunaan Pembayaran Digital di Riau

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi semakin cepat, praktis, dan terintegrasi. Transformasi tersebut mendorong kebutuhan akan sistem pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CeMuMuAH). Dalam konteks ini, QR Code Indonesian Standard (QRIS) telah berkembang menjadi salah satu kanal pembayaran utama dalam mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital, sekaligus memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap ekosistem pembayaran digital. Hingga Semester I 2026, QRIS secara nasional telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant*, dengan 93,16% *merchant* merupakan UMKM.

Seiring dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, tantangan kebijakan tidak lagi hanya berada pada aspek perluasan akseptasi, tetapi juga pada kualitas dan konsistensi penggunaan. Implementasi QRIS secara nasional telah memasuki tahapan *usage* menuju *quality*, sehingga perlu didukung dengan peningkatan pemahaman, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Pada saat yang sama, perkembangan modus kejahatan digital menuntut peningkatan literasi mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta pemahaman atas hak dan kewajiban konsumen.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, KPwBI Provinsi Riau menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 dengan tema "TAMASYA QRIS – Transformasi Ekonomi Masyarakat melalui Akselerasi Sistem Pembayaran yang Andal" dan *tagline* "Hobinya Banyak, QRIS-nya Satu!". Kegiatan utama yang berlangsung pada 15–17 Agustus 2026 di Mal SKA Pekanbaru dirancang sebagai festival pengalaman pembayaran digital yang mengintegrasikan edukasi, kreativitas, hobi, komunitas, dan aktivitas usaha dalam satu ekosistem QRIS. Pelaksanaannya didukung sinergi dengan TP PKK Kota Pekanbaru, Dinas





Pendidikan Provinsi Riau, serta perbankan di Provinsi Riau, dan ditutup melalui *Closing Ceremony* yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si. Kolaborasi tersebut memperkuat upaya membangun pengalaman langsung, keterlibatan, serta penggunaan QRIS yang semakin aktif dan berkualitas. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun pengalaman langsung, keterlibatan, dan penggunaan QRIS secara berulang.

Konsep TAMASYA QRIS mengintegrasikan edukasi dengan aktivitas yang dekat dengan keseharian masyarakat. Pendekatan melalui **hobi dan komunitas** dipilih karena menjadi ruang yang kuat dalam membentuk identitas, minat, dan pola interaksi masyarakat, khususnya generasi muda. Musik, olahraga, seni, kuliner, fashion, permainan digital, dan aktivitas kreatif telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang melibatkan pelaku usaha dan berbagai transaksi pendukung. Melalui integrasi QRIS ke dalam aktivitas tersebut, edukasi pembayaran digital dapat disampaikan secara lebih alami, menarik, dan mudah diingat. Komunitas juga berperan sebagai ruang penyebaran pengalaman dan kebiasaan melalui pengaruh antar orang sehingga berpotensi menciptakan efek domino penggunaan QRIS.

Implementasi konsep tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) zona utama, yaitu **Atrium Siak – Panggung Aksi dan Inspirasi**, **Zona B – Ekspresikan Dirimu bersama QRIS**, **Zona C – Seruput Kebahagiaan bersama QRIS**, dan **Atrium Rokan – Jelajah Rasa bersama QRIS**. Rangkaian kegiatan kemudian dikemas melalui





3 (tiga) pengalaman utama. Pertama, **Panggung Jawara #WujudkanAksimu!**, yang menghadirkan kompetisi lintas segmen seperti Lomba Ranking 1 Siswa SMA, Lomba Tari Kreasi Jingle QRIS, Lomba mewarnai, Lomba menyanyi, dan Lomba menghias tumpeng PKK Kota Pekanbaru sebagai sarana mengintegrasikan pesan digitalisasi, kreativitas, dan nasionalisme.

Kedua, **Panggung Inspirasi #NyalakanInspirasimu!**, yang menghubungkan literasi pembayaran digital dengan isu yang relevan bagi masyarakat. *Talkshow "Sehat Raganya, Aman Keuangannya"* mengangkat pola hidup sehat, pengelolaan keuangan, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap modus penipuan digital; *"From Zero to Hero"* menampilkan perjalanan kesuksesan pelaku usaha dari Riau dalam membangun bisnis dan memanfaatkan kanal digital serta QRIS; sementara *"Sehat adalah Investasi"* bersama tokoh nasional yaitu Ade Rai mengangkat gaya hidup sehat sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas hidup dan produktivitas.

Ketiga, TAMASYA QRIS mengedepankan **pendekatan *experience-based education*** melalui berbagai aktivitas interaktif yang menggabungkan edukasi dengan pengalaman langsung bertransaksi menggunakan QRIS. Implementasinya mencakup **"Bareng-Bareng Jelajahi TAMASYA QRIS!"** melalui 5 (lima) misi interaktif; **"Tebus Seru bersama QRIS"** berupa program voucher potongan harga berbasis transaksi QRIS; edukasi di **Booth Bank Indonesia** yang mengutamakan user experience QRIS serta berbagai game edutainment mengenai QRIS dan Pelindungan Konsumen mengoptimalkan penggunaan <https://www.konsumenaman.id/> serta **vending machine** berhadiah yang diawali dengan transaksi QRIS sebesar Rp81 dan dilanjutkan dengan quiz edukasi. Melalui rangkaian tersebut, pengunjung tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mengalami secara langsung proses bertransaksi digital yang mudah, aman, dan menyenangkan.

Pendekatan edukasi yang dikemas melalui pengalaman tersebut memperoleh respons positif dari masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan PQN 2026 Provinsi Riau mencatat **98.676 kunjungan**, **16.579 transaksi QRIS**, serta **nilai penjualan UMKM dan bazaar sebesar Rp331,65 juta**. Kegiatan melibatkan **26 tenant**, mencatat **tingkat pemahaman sebesar 85%**, serta didukung kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, BMPD Riau, Tim Penggerak PKK, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, komunitas, pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis lainnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan QRIS dapat diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan kanal pembayaran, tetapi juga pada **pembentukan kebiasaan, pengalaman positif, dan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi digital**. Ke depan, pengembangan ekosistem QRIS di Provinsi Riau perlu terus diarahkan pada peningkatan penggunaan yang aktif, berkualitas, dan aman melalui perluasan ekosistem pada sektor UMKM, kuliner, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, serta komunitas berbasis hobi. Penguatan literasi perlindungan konsumen dan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, industri sistem pembayaran, dunia pendidikan, komunitas, dan pelaku usaha menjadi kunci agar semangat **"Hobinya Banyak, QRIS-nya Satu!"** berkembang dari momentum kampanye menjadi bagian dari kebiasaan transaksi digital masyarakat Riau sehari-hari.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*







## BAB 5

# KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

- Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2026 mulai menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sejalan dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan sektor lapangan usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor unggulan Riau seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.

## 1. GAMBARAN UMUM

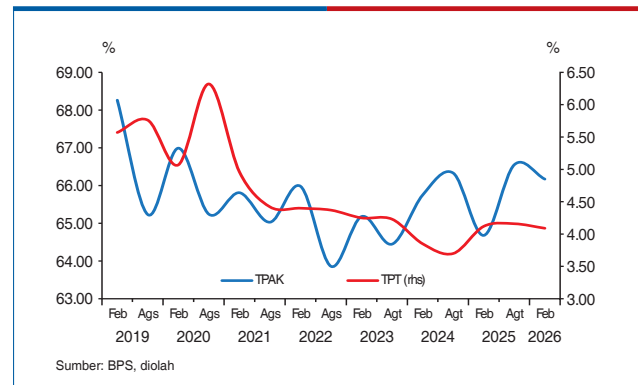
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2026 (data BPS terakhir) menunjukkan tren perbaikan dibandingkan dengan Februari 2025 di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Rilis data BPS pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tetapi tidak semua PUK tersebut secara aktif masuk dalam Angkatan Kerja.

Penurunan TPT dipengaruhi oleh meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor lapangan usaha utama Riau, yaitu pertanian, konstruksi, pengangkutan, dan jasa keuangan. Hal ini ditengarai karena mulai berlangsungnya proses *replanting* perkebunan serta semakin berkembangnya sektor jasa di Riau.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator kemiskinan Provinsi Riau mulai membaik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2026 (data terakhir BPS) yang tercatat menurun menjadi 6,19% dari 6,30% pada September 2025, meskipun sedikit lebih tinggi dibanding Maret 2025 sebesar 6,16%. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2026 tercatat masih cukup baik, yaitu 193,69 pada triwulan II 2026, meskipun menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 197,48. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada seluruh subsektor utama Riau, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

## 2. KONDISI KETENAGAKERJAAN DAERAH

Merujuk pada rilis data ketenagakerjaan BPS per Februari 2026, sebagaimana Tabel 5.1, terlihat bahwa jumlah PUK di Provinsi Riau mengalami peningkatan 1,69% (yoy). PUK merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (usia >15 tahun). Pada kenyataannya, penduduk usia tersebut tidak selalu dalam status bekerja atau aktif mencari kerja (status ini disebut Angkatan Kerja) tetapi ada pula yang berstatus Bukan Angkatan Kerja antara lain karena sedang menempuh pendidikan. Di

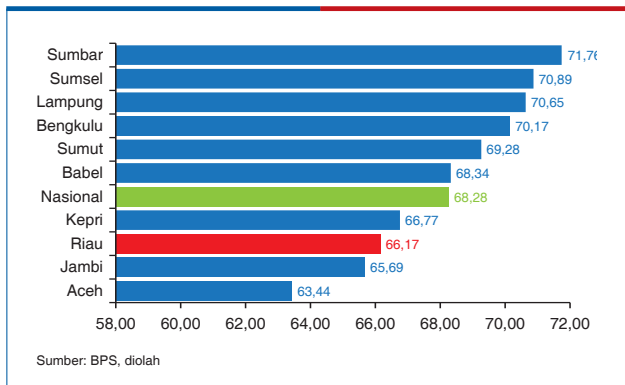


**Grafik 5.1.** Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau

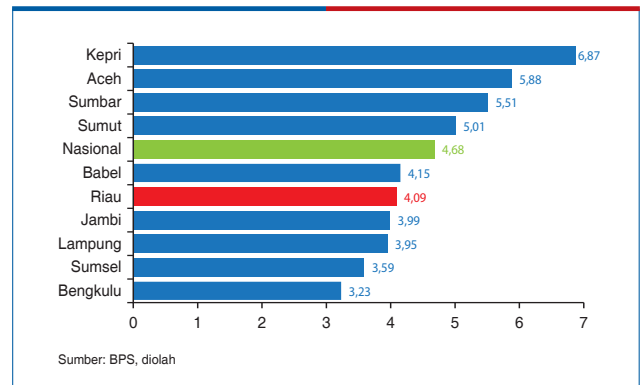
Provinsi Riau, jumlah PUK pada Februari 2026 tercatat sebanyak 5,07 juta orang, meningkat 84,4 ribu orang dari Februari 2025. Peningkatan jumlah PUK ini berkontribusi pada peningkatan jumlah Angkatan Kerja dari 3,22 juta orang pada Februari 2025 menjadi 3,35 juta orang pada Februari 2026, atau meningkat 4,05% (yoy). Sementara itu, jumlah Bukan Angkatan Kerja mengalami penurunan yaitu dari 1,76 juta orang pada Februari 2025 menjadi 1,71 juta orang, atau menurun 2,62% (yoy).

Lebih lanjut mengenai kondisi Angkatan Kerja, secara umum pada Februari 2026 mulai menunjukkan tren perbaikan dari periode sebelumnya. Hal ini terlihat pada Grafik 5.1 yang menunjukkan menurunnya TPT. Lebih lanjut, sebagaimana Tabel 5.3, penurunan TPT terindikasi dari meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor-sektor utama seperti pertanian dan jasa keuangan.

Selanjutnya, TPak Riau pada Februari 2026 tercatat sebesar 66,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,68%. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPak disumbang oleh peningkatan TPak perempuan dari 43,78% menjadi 47,14%. Di sisi lain, peningkatan TPak tersebut ditahan oleh penurunan TPak laki-laki dari 84,72% pada Februari 2025 menjadi 84,48% pada Februari 2026. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, TPak Riau tercatat paling rendah ketiga dibandingkan provinsi lain dan rata-rata Nasional, sebagaimana Grafik 5.2.



**Grafik 5.2.** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi di Sumatera (dalam %)

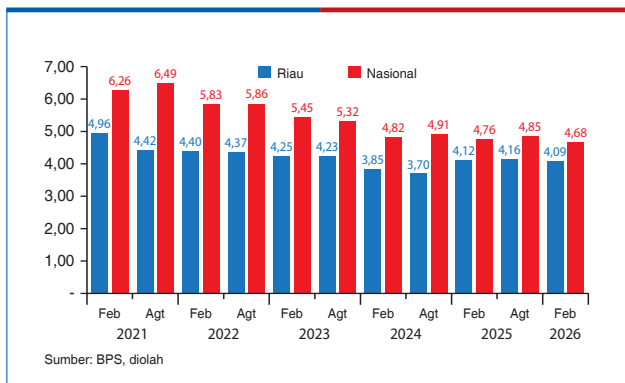


**Grafik 5.4.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi di Sumatera (dalam %)

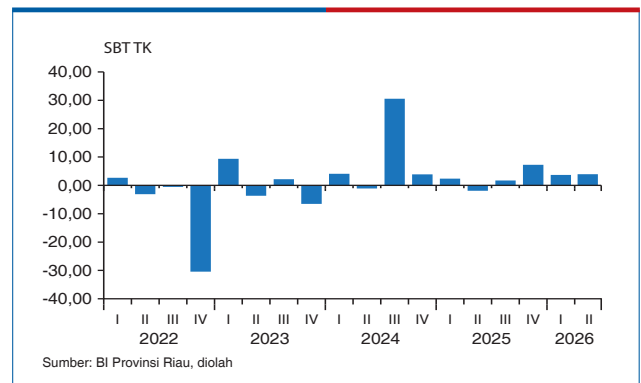
Selanjutnya, TPT Riau mengalami penurunan dari 4,12% pada Februari 2025 menjadi 4,09% pada Februari 2026. Penurunan TPT tersebut mengindikasikan adanya tambahan jumlah serapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sumber serapan tenaga kerja tersebut juga termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun mempersiapkan usaha. Selain itu, tingkat TPT Riau juga masih lebih

rendah daripada TPT Nasional sebesar 4,68% (Grafik 5.3) maupun TPT sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera (Grafik 5.4).

Kondisi penurunan TPT ini dikonfirmasi oleh hasil SKDU Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan SBT tenaga kerja dari -1,92 pada triwulan II 2025 menjadi 3,70 pada triwulan II 2026 sebagaimana Grafik 5.5.



**Grafik 5.3.** Perkembangan TPT Nasional dan TPT Provinsi Riau



**Grafik 5.5.** Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Dunia Usaha di Provinsi Riau

**Tabel 5.1.** Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Riau (Ribuan Orang)

| INDIKATOR                              | 2022     |          | 2023     |          | 2024     |          | 2025     |          | 2026     | Feb '26 terhadap Feb '25 |           |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
|                                        | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Growth                   | Indikator |
| Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)       | 4.766,90 | 5.189,24 | 4.873,51 | 4.863,74 | 4.901,47 | 4.946,20 | 4.986,08 | 5.034,09 | 5.070,52 | 1,69                     | ↑         |
| Angkatan Kerja                         | 3.145,10 | 3.313,82 | 3.176,68 | 3.134,79 | 3.222,76 | 3.280,73 | 3.224,81 | 3.350,14 | 3.355,42 | 4,05                     | ↑         |
| Bekerja                                | 3.006,59 | 3.168,93 | 3.041,63 | 3.002,33 | 3.098,76 | 3.159,37 | 3.091,84 | 3.210,93 | 3.218,30 | 4,09                     | ↑         |
| Pengangguran                           | 138,51   | 144,89   | 135,05   | 132,45   | 124,00   | 121,36   | 132,97   | 139,21   | 137,12   | 3,12                     | ↑         |
| Bukan Partisipan Kerja                 | 1.621,80 | 1.875,43 | 1.696,83 | 1.728,95 | 1.678,71 | 1.665,48 | 1.761,28 | 1.683,95 | 1.715,10 | -2,62                    | ↓         |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 65,98%   | 63,86%   | 65,18%   | 64,45%   | 65,75%   | 66,33%   | 64,68%   | 66,55%   | 66,18%   | 2,32%                    | ↑         |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)       | 4,40%    | 4,37%    | 4,25%    | 4,23%    | 3,85%    | 3,70%    | 4,12%    | 4,16%    | 4,09%    | -0,89%                   | ↓         |

Sumber: BPS Provinsi Riau (Mei 2026), diolah



**Tabel 5.2.** Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ribu Orang)

| PENDIDIKAN                | 2022     |          | 2023     |          | 2024     |          | 2025     |          | 2026     | Feb '26 terhadap Feb '25 |         |           |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|---------|-----------|
|                           | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Ags      | Feb      | Pangsa                   | Growth  | Indikator |
| SD ke bawah               | 1.007,22 | 1.079,84 | 1.006,06 | 906,22   | 928,55   | 932,90   | 894,67   | 906,62   | 979,76   | 30,44%                   | 9,51    | ↑         |
| SMP                       | 570,27   | 560,71   | 508,04   | 541,78   | 565,80   | 543,76   | 517,90   | 541,17   | 543,48   | 16,89%                   | 4,94    | ↑         |
| SMA Umum                  | 715,34   | 819,56   | 851,36   | 843,14   | 843,97   | 918,98   | 891,49   | 959,59   | 882,75   | 27,43%                   | (0,98)  | ↓         |
| SMA Kejuruan              | 315,90   | 289,34   | 325,93   | 311,62   | 311,76   | 294,20   | 296,53   | 320,12   | 347,80   | 10,81%                   | 17,29   | ↑         |
| DI/II/III dan Universitas | 84,16    | 83,13    | 66,26    | 70,78    | 78,00    | 76,99    | 72,33    | 67,94    | 91,88    | 2,85%                    | 27,03   | ↑         |
| Universitas               | 313,70   | 336,36   | 283,98   | 328,80   | 370,68   | 392,54   | 418,92   | 415,51   | 372,62   | 11,58%                   | (11,05) | ↓         |
| Total                     | 3.006,59 | 3.168,94 | 3.041,63 | 3.002,34 | 3.098,76 | 3.159,37 | 3.091,84 | 3.210,95 | 3.218,30 | 100%                     | 4,09    | ↑         |

Sumber: BPS Provinsi Riau (Mei 2026), diolah

**Tabel 5.3.** Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

| LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA        | Ribu Orang |          |          |          |          | Pangsa % | Feb '26 terhadap Feb '25 |           |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|
|                                 | Feb '22    | Feb '23  | Feb '24  | Feb '25  | Feb '26  | Feb '26  | Growth                   | Indikator |
| Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 1.056,74   | 980,72   | 983,79   | 1.000,93 | 1.088,58 | 33,82%   | 8,76                     | ↑         |
| Industri Pengolahan             | 270,59     | 265,06   | 303,76   | 259,08   | 260,93   | 8,11%    | 0,71                     | ↑         |
| Perdagangan                     | 586,96     | 647,61   | 633,27   | 622,94   | 581,96   | 18,08%   | -6,58                    | ↓         |
| Konstruksi dan Real Estate      | 169,45     | 166,87   | 185,07   | 166,30   | 173,33   | 5,39%    | 4,23                     | ↑         |
| Pengangkutan dan Pergudangan    | 122,33     | 125,75   | 81,74    | 104,33   | 124,89   | 3,88%    | 19,71                    | ↑         |
| Pertambangan dan Penggalian     | 29,12      | 46,61    | 47,68    | 44,64    | 37,88    | 1,18%    | -15,14                   | ↓         |
| Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 28,67      | 41,29    | 19,60    | 14,30    | 51,97    | 1,61%    | 263,43                   | ↑         |
| Lainnya *                       | 742,76     | 767,72   | 843,84   | 879,33   | 898,76   | 27,93%   | 2,21                     | ↑         |
| Total                           | 3.006,62   | 3.041,63 | 3.098,75 | 3.091,85 | 3.218,30 | 100,0%   | 4,09                     | ↓         |

\* Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari Penyedia Akomodasi Mamin, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Kategori Lainnya  
Sumber: BPS Provinsi Riau (Mei 2026), diolah

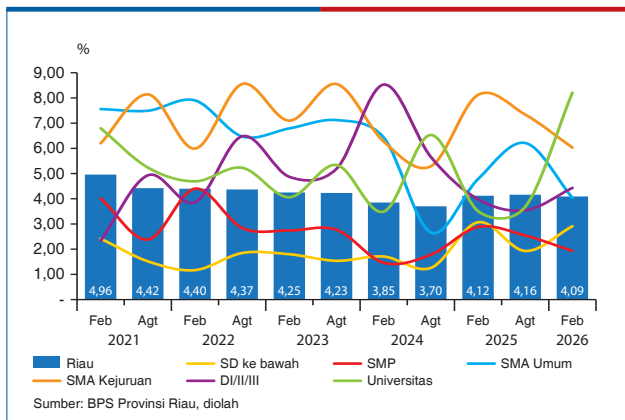
Lebih lanjut pada Tabel 5.3, terlihat bahwa struktur penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Riau pada triwulan laporan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ditinjau secara sektoral, penyerapan tenaga kerja utama di Riau pada Februari masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Secara kumulatif ketiga sektor ekonomi tersebut mampu menyerap 60,02% dari total tenaga kerja di Riau.

Sejalan dengan tingginya pangsa serapan tenaga kerja di ketiga sektor tersebut, peningkatan penyerapan tenaga kerja pada 1 (satu) sektor, yaitu pertanian, akan mendorong penurunan TPT Riau. Namun demikian, penurunan TPT tersebut tertahan oleh menurunnya serapan pada sektor perdagangan.

Lebih lanjut, peningkatan serapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 8,76% (yoy) dan terdapat

sedikit peningkatan di sektor industri pengolahan yaitu 0,71% (yoy). Di sisi lain, sektor perdagangan menahan penurunan TPT lebih dalam dengan berkurangnya serapan tenaga kerja di sektor ini pada level -6,58%.

Indikator lain yang menarik untuk ditinjau adalah sebaran penduduk bekerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada Tabel 5.2, terlihat bahwa serapan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA dan Universitas mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah pekerja dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMK, dan Diploma mengalami peningkatan pada Februari 2026 dibandingkan Februari 2025. Lebih dari itu, pangsa tenaga kerja di Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ SMK ke bawah, yaitu 85,57%, sementara pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing



**Grafik 5.6.** Perkembangan TPT Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

hanya berpangsa 2,85% dan 11,58%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan rencana hilirisasi industri.

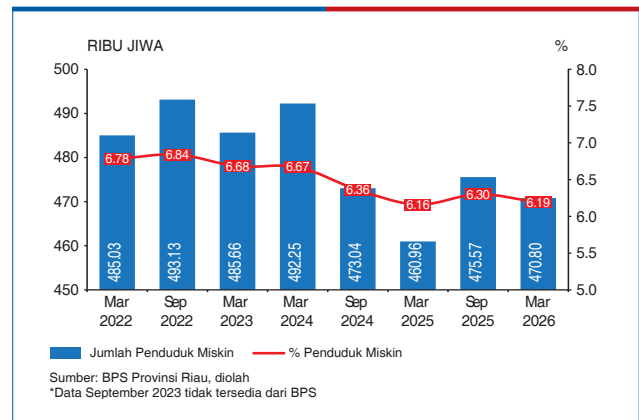
Di sisi lain, perbandingan kondisi TPT antara Februari 2026 dan Februari 2025 pada Grafik 5.6 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah sampai dengan SMA/SMK mengalami penurunan. Sementara itu, pada tingkat Universitas dan Diploma tercatat mengalami peningkatan.

### 3. KONDISI KESEJAHTERAAN DAERAH

#### 3.1. Kemiskinan

Berdasarkan data kemiskinan terkini, periode Maret 2026, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau mulai membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,19%, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 6,30%, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibanding Maret 2025 sebesar 6,16%.

Dilihat dari data historisnya, angka kemiskinan Riau pada Maret 2026 mengalami perbaikan setelah sebelumnya meningkat pada periode September 2025 sebagaimana Grafik 5.7. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2026 mencapai 470,80 ribu jiwa, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 475,57 ribu jiwa, namun meningkat jika dibandingkan periode Maret 2025 yang pada periode

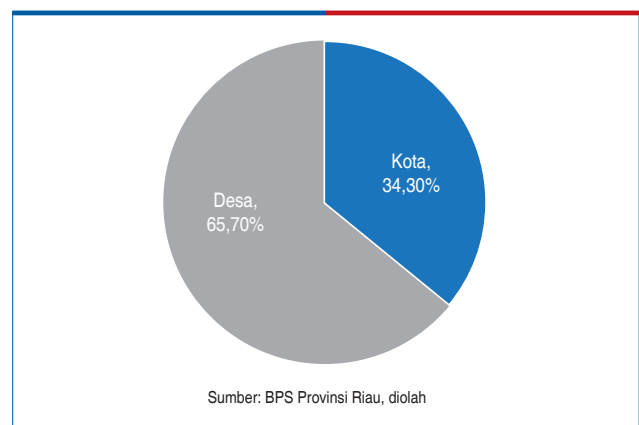


**Grafik 5.7.** Jumlah Penduduk Miskin di Riau

tersebut mencapai titik terendah sejak 2016 sebesar 460,96 ribu jiwa.

Berdasarkan lokasinya, sebagaimana Grafik 5.8, sebaran penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan dengan pangsa 65,70%. Pangsa tersebut meningkat dari periode sebelumnya yaitu 62,36% pada Maret 2025. Sementara itu, pangsa penduduk miskin di perkotaan tercatat menurun menjadi 34,30% dari 37,64% pada Maret 2025.

Dengan sebaran kemiskinan tersebut, mengindikasikan bahwa nilai tambah dari kegiatan ekonomi di Riau masih lebih cepat dinikmati oleh penduduk di wilayah perkotaan. Memperhatikan hal itu, penguatan program pemerataan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan investasi dibutuhkan



**Grafik 5.8.** Sebaran Penduduk Miskin di Riau



untuk memperkecil *gap* antara wilayah perdesaan dan perkotaan sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, laju urbanisasi pun juga dapat semakin dikendalikan.

Selain itu, tingkat kemiskinan di perdesaan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penduduk miskin di pedesaan meningkat menjadi 309,31 ribu orang pada Maret 2026 dari 287,45 ribu orang pada Maret 2025, atau meningkat 7,60% (yoy). Sementara itu, kemiskinan di perkotaan tercatat turun dari 173,52 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 161,49 ribu orang pada Maret 2026, atau turun 6,93% (yoy).

### 3.2. Garis Kemiskinan

Pada Maret 2026, angka Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan, baik di perdesaan maupun perkotaan. Angka GK mencerminkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam 1 bulan yang dibagi dalam GK Makanan (GKM) dan GK Non Makanan (GKNM). Dilihat dari Tabel 5.4, GK di Riau pada Maret 2026 tercatat tumbuh 6,36% menjadi Rp758.447 per kapita/bulan, yang terdiri dari Rp556.050 GKM dan Rp202.397 GKNM.

Peningkatan GK Riau mayoritas bersumber dari kenaikan GKM (73,31%), sedangkan GKNM seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan hanya berkontribusi sekitar 26,69%. Kontribusi komoditas makanan yang masih dominan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut masih berperan penting dalam penentuan tingkat kemiskinan di Riau. Berdasarkan data BPS pada Maret 2026, terdapat 5 (lima) komoditas makanan dengan andil terbesar terhadap GK, baik di perkotaan maupun perdesaan, yaitu: (1) beras, (2) rokok kretek filter, (3) daging ayam ras, (4) telur ayam ras, dan (5) cabe merah. Sedangkan pada komoditas non-makanan, penyumbang GK didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Salah satu penyebab relatif meningkatnya GK adalah

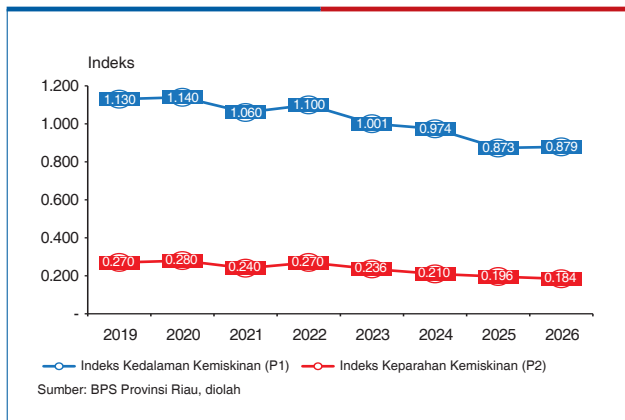
kenaikan harga komoditas pangan yang tercermin dari tingkat inflasi komoditas, seperti beras, daging ayam ras, dan rokok kretek. Peningkatan harga komoditas pangan di Riau kerap disebabkan oleh *supply shock* seperti gangguan produksi dan pergeseran periode tanam akibat gangguan cuaca, bencana alam, kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta transmisi kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan untuk menahan laju peningkatan GKM, diperlukan penguatan program pengendalian inflasi untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

Tabel 5.4. Garis Kemiskinan Provinsi Riau

| Daerah             | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) |               |         |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------|
|                    | Makanan                          | Bukan Makanan | Total   |
| <b>Perkotaan</b>   |                                  |               |         |
| Mar-19             | 361.135                          | 152.604       | 513.739 |
| Mar-20             | 400.297                          | 170.165       | 570.462 |
| Mar-21             | 419.858                          | 175.412       | 595.270 |
| Mar-22             | 450.681                          | 191.327       | 642.008 |
| Mar-23             | 495.115                          | 203.126       | 698.241 |
| Mar-24             | 529.025                          | 211.197       | 740.222 |
| Mar-25             | 542.999                          | 215.175       | 758.174 |
| Mar-26             | 575.887                          | 232.973       | 808.860 |
| <b>Perdesaan</b>   |                                  |               |         |
| Mar-19             | 368.149                          | 23.242        | 391.391 |
| Mar-20             | 394.776                          | 131.654       | 526.430 |
| Mar-21             | 409.818                          | 136.989       | 546.807 |
| Mar-22             | 435.905                          | 146.319       | 582.224 |
| Mar-23             | 475.721                          | 156.983       | 632.704 |
| Mar-24             | 501.450                          | 167.924       | 669.374 |
| Mar-25             | 514.581                          | 168.483       | 683.064 |
| Mar-26             | 543.774                          | 181.670       | 725.444 |
| <b>Kota + Desa</b> |                                  |               |         |
| Mar-19             | 365.515                          | 135.097       | 500.612 |
| Mar-20             | 396.883                          | 147.175       | 544.058 |
| Mar-21             | 413.593                          | 152.344       | 565.937 |
| Mar-22             | 441.535                          | 164.377       | 605.912 |
| Mar-23             | 483.092                          | 175.519       | 658.611 |
| Mar-24             | 511.959                          | 185.337       | 697.296 |
| Mar-25             | 525.806                          | 187.311       | 713.117 |
| Mar-26             | 556.050                          | 202.397       | 758.447 |

Sumber: BPS Provinsi Riau, diolah



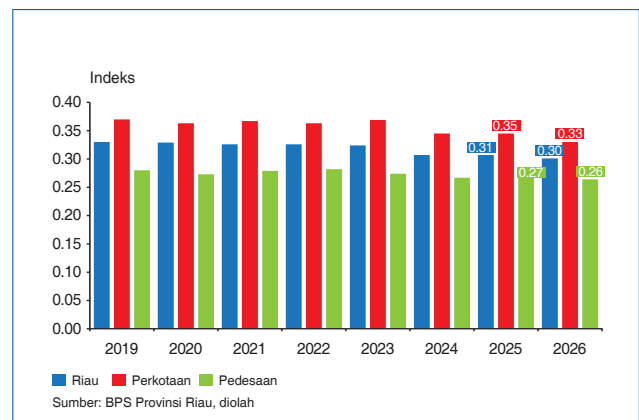
**Grafik 5.9.** Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selanjutnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Riau pada periode Maret 2026 mengalami peningkatan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan justru mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) sedikit mengalami peningkatan dari 0,873 pada Maret 2025 menjadi 0,879 pada Maret 2026. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan representasi rata-rata ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Riau sedikit menjauh dari GK atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Riau sedikit mengalami peningkatan.

Namun demikian, indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami penurunan. Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) tercatat dari 0,196 pada Maret 2025 menjadi 0,184 pada Maret 2026. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Riau menurun, atau sebaran pengeluaran penduduk miskin di Riau semakin menyempit.

### 3.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Dimensi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah selain indeks  $P_1$  dan  $P_2$  adalah Rasio Gini

**Grafik 5.10.** Perkembangan Rasio Gini (Periode Maret)

yang cenderung stabil. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini yang tercatat sebesar 0,301 pada Maret 2026, sedikit mengalami penurunan dari Maret 2025. Ketimpangan atau pemerataan pendapatan di Riau masih dapat dijaga untuk tetap berada di kategori sedang ( $0,30 \leq G \leq 0,50$ ) dan rendah ( $G < 0,30$ ). Secara spasial, apabila dibandingkan dengan posisi Maret 2025, Rasio Gini perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan masing-masing dari 0,345 menjadi 0,330 dan dari 0,267 menjadi 0,264 pada Maret 2026.

### 3.4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

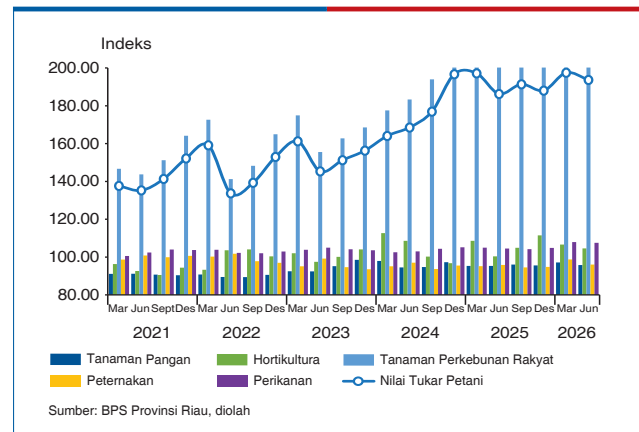
Indikator kesejahteraan lainnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif petani. Tingkat kesejahteraan petani di Riau pada triwulan II 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indikator NTP pada triwulan II 2026 tercatat menurun sebesar 3,79% (q<sub>tq</sub>), atau tercatat sebesar 193,69 pada Juni 2026 dari 197,48 pada Maret 2026. Penurunan NTP Riau terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima oleh petani (I<sub>t</sub>) yang dibarengi dengan peningkatan indeks harga yang dibayar petani (I<sub>b</sub>). Indeks harga yang diterima petani (I<sub>t</sub>) menurun dari 240,57 menjadi 240,15, atau turun

sebesar 0,17% (qtq). Di saat yang bersamaan, indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat dari 121,82 menjadi 123,99 atau meningkat 1,78% (qtq). Secara umum, hal ini mengindikasikan adanya penerimaan yang lebih rendah dari komoditas yang diproduksi daripada kenaikan harga yang harus dibayar dalam rangka memproduksi komoditas tersebut ditambah kebutuhan konsumsi rumah tangga petani. Secara umum, NTP Riau masih berada di atas 100 yang artinya tingkat kesejahteraan petani relatif terjaga.

Lebih lanjut, penurunan NTP terjadi pada seluruh subsektor utama Riau, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. NTP tanaman pangan turun dari 97,14 pada Maret 2026 menjadi 95,81 pada Juni 2026. NTP subsektor hortikultura dan subsektor perikanan juga mengalami penurunan masing-masing menjadi 104,60 dan 107,53 pada Juni 2026 dari sebelumnya 106,60 dan 107,95 pada Maret 2026. Selain itu, penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor peternakan dan tanaman perkebunan rakyat masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,81% (qtq) dan 1,98% (qtq), dengan capaian Juni 2026 masing-masing mencapai 96,06 dan 213,80 menurun dibandingkan Maret 2026 sebesar 98,73 dan 218,11.

Secara lebih rinci, NTP berdasarkan subsektor di Riau masih berada di atas 100 kecuali untuk subsektor tanaman pangan dan peternakan sehingga tingkat kesejahteraan petani mayoritas relatif masih terjaga. Namun demikian, para pemangku kepentingan di



Grafik 5.11. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau

daerah tetap perlu memberikan perhatian lebih pada subsektor dengan NTP di bawah 100 tersebut agar *net income* petani pada subsektor dimaksud juga dapat segera menjadi positif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani serta juga dapat mencegah urbanisasi.

Secara spasial dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, NTP Riau tercatat sebagai yang tertinggi kedua di wilayah Sumatera, setelah Bengkulu dengan angka 196,87. Sementara terhadap nasional, hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatera berada di atas NTP nasional yaitu sebesar 127,65 serta berada di atas indeks dasar (=100). Hal tersebut mengindikasikan kesejahteraan petani di Riau relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Sumatera dan Nasional.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*







## BAB 6

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

- Pertumbuhan ekonomi Riau pada 2026 diperkirakan tumbuh positif dalam kisaran 4,6 – 5,4%. ditopang oleh perbaikan konsumsi RT dan Investasi. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) utama yang membaik di tahun 2026, di antaranya Industri Pengolahan dan LU Pertanian yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Selain itu, sektor tersier (jasa-jasa) diperkirakan juga akan membaik seiring pemulihan permintaan terutama permintaan domestik.

Lebih lanjut, inflasi Provinsi Riau pada tahun 2026 diperkirakan melandai dibandingkan tahun 2025, serta berada pada titik tengah sasaran inflasi  $2,5\% \pm 1\%$  (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan dominan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Transportasi; dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.



## 1. PROSPEK EKONOMI GLOBAL 2026

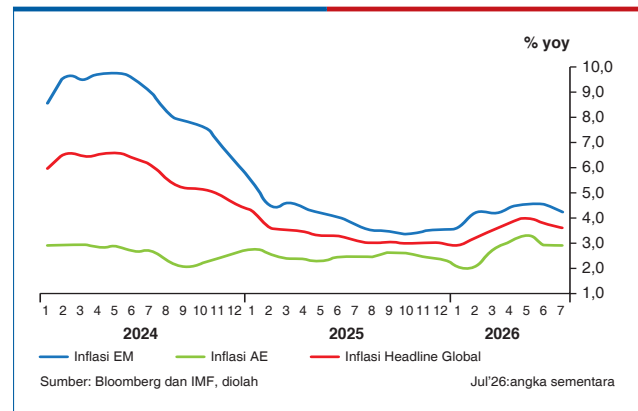
Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat kembali seiring eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan pasar energi global. Ekonomi global pada 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 3,0%, sedikit melambat dibandingkan dengan rilis *World Economic Outlook* (WEO) sebelumnya pada April 2026. Dengan demikian, ekonomi global diperkirakan relatif lebih lambat dibandingkan tahun 2026, yakni dari sebelumnya 3,1% menjadi 3,0% pada tahun 2026<sup>1</sup>.

Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh melambat, yaitu dari sebelumnya sebesar 1,9% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 1,7% (yoy) pada tahun 2026 disebabkan oleh estimasi kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang masing-masing tumbuh dari 2,1% (yoy) dan 1,4 % (yoy) pada tahun 2025 menjadi masing-masing tumbuh sebesar 2,3% dan 0,9% (yoy) pada tahun 2026. Lebih kuatnya kinerja ekonomi kawasan Amerika Serikat sejalan dengan perbaikan permintaan domestik seiring dengan upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi.

Sementara itu, kinerja ekonomi negara berkembang diperkirakan tumbuh melambat dari 4,5% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2026. Tertahannya kinerja ekonomi global dipengaruhi tingginya gejala global akibat perang di Timur Tengah sehingga mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok antarnegara juga mendorong kenaikan harga komoditas dunia lainnya yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian global meningkat.

Sementara itu, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang lambat dan dampak gejala global di Timur Tengah. Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat ketidakpastian perdagangan dan kondisi geopolitik.

1. IMF *World Economic Outlook* July 2026



Grafik 6.1. Perkembangan Inflasi Global

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dipengaruhi kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari prakiraan serta arah kebijakan bank sentral AS. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih terbatas. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap *US Treasury*.

Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat sementara pada 2026 menjadi 4,7% sebelum kembali menurun menjadi 3,9% pada 2027. Tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga energi dan efek rambatan ke rantai pasok global<sup>2</sup>.

Fragmentasi geopolitik dan reorientasi perdagangan global terus berlanjut. Arus perdagangan semakin bergeser ke mitra yang dinilai lebih resilien, sementara ketidakpastian global tetap tinggi.

Di tengah prospek masih tertahannya ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap kuat seperti tahun 2025, didukung oleh peningkatan investasi dan inflasi yang terkendali dalam target sasaran. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada dalam kisaran 4,6 – 5,4%. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia yang baik didukung

2. IMF *World Economic Outlook* July 2025





terjaganya daya beli seiring meredanya tekanan inflasi yang diperkirakan kembali pada kisaran sasaran  $2,5\% \pm 1\%$  di 2026.

Kinerja permintaan domestik diperkirakan tetap kuat sepanjang 2026, ditopang oleh terjaganya komponen konsumsi RT sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penyelenggaraan event internasional. Sementara itu, prospek investasi lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama pada investasi bangunan. Peran fiskal daerah diperkirakan berlanjut, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi. Adapun kinerja ekspor diperkirakan terjaga meski lebih rendah dari perkiraan, sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

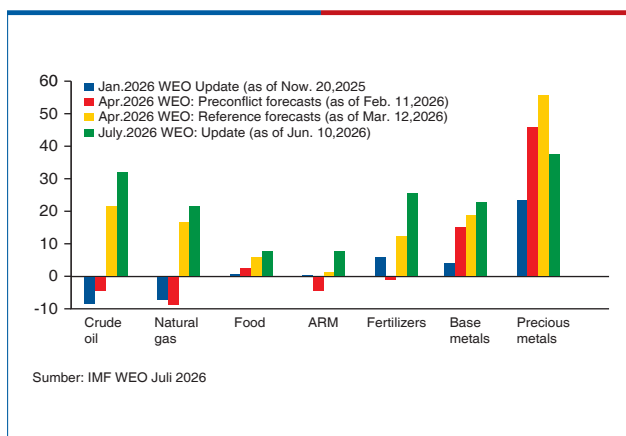
Perekonomian Provinsi Riau pada 2026 diperkirakan tetap positif namun lebih moderat. Rentang pertumbuhan  $4.40\% - 5.20\%$  (yoy) masih relevan dengan penopang utama berasal dari industri pengolahan, pertanian, dan net ekspor. Namun perlambatan perdagangan global dan volatilitas harga komoditas perlu diwaspadai terutama terhadap ekspor CPO dan produk berbasis *pulp & paper*.

Program strategis Pemerintah seperti Makan Siang Bergizi (MBG) dapat mendorong perekonomian Riau. Peningkatan kinerja ekspor yang disertai dengan konsumsi rumah tangga dan Pemerintah yang distimulasi oleh program MBG diharapkan dapat menahan perlambatan perekonomian. Perdagangan

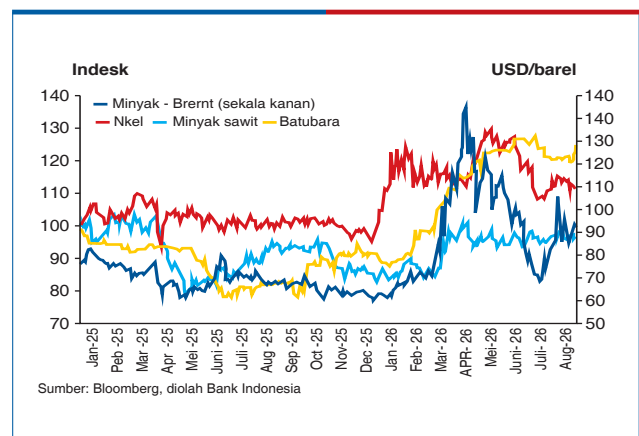
antardaerah Riau juga diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Kinerja ekspor Riau diperkirakan tetap tertopang oleh permintaan ASEAN dan India yang relatif lebih resilien, meskipun volume perdagangan dunia melambat. Harga energi dan komoditas yang masih tinggi berpotensi menopang *terms of trade*, namun meningkatkan risiko biaya produksi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat, volume perdagangan dunia pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh dalam laju yang moderat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan penyesuaian pola perdagangan internasional. Dinamika perdagangan global masih dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian kebijakan perdagangan fragmentasi geopolitik, serta proses reorientasi rantai pasok dan mitra dagang global. Kondisi tersebut tercermin dari masih tingginya indikator ketidakpastian global dan berlanjutnya pergeseran arus perdagangan internasional menuju negara dan kawasan yang lebih resilien, sehingga berpotensi menahan akselerasi pertumbuhan volume perdagangan dunia ke depan. Hal tersebut tercermin pada ketidakpastian global berdasarkan laporan *World Economic Outlook* dari *Internasional Monetary Fund*.



Grafik 6.2. Harga Komoditas



Grafik 6.3. Harga Komoditas Unggulan



**Tabel 6.1.** Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Sejumlah Negara Maju dan Berkembang (% yoy)

| Negara                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2026* |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Dunia                      | 3,5  | 3,3  | 3,3  | 3,4   | 3,0   |
| Negara Maju                | 2,6  | 1,7  | 1,8  | 1,9   | 1,7   |
| Amerika Serikat            | 1,9  | 2,9  | 2,8  | 2,1   | 2,3   |
| Kawasan Eropa              | 3,4  | 0,4  | 0,9  | 1,4   | 0,9   |
| Jepang                     | 1,0  | 1,5  | 0,1  | 1,2   | 0,7   |
| Negara Berkembang          | 4,1  | 4,4  | 4,3  | 4,4   | 3,9   |
| Tiongkok                   | 3,0  | 5,2  | 5,0  | 5,0   | 4,5   |
| India                      | 6,8  | 7,7  | 6,5  | 7,6   | 6,5   |
| ASEAN-5                    | 5,5  | 4,0  | 4,6  | 4,5   | 4,0   |
| Amerika Latin              | 4,2  | 2,4  | 2,4  | 2,4   | 2,4   |
| Negara Berkembang Eropa    | 1,2  | 3,3  | 3,4  | 2,0   | 2,1   |
| Timur Tengah & Asia Tengah | 5,4  | 2,0  | 2,4  | 3,6   | 2,6   |

Sumber: IMF WEO. \* Proyeksi Bank Indonesia

**Tabel 6.2.** Perkembangan Harga Komoditas Ekspor Indonesia (% yoy)

| KOMODITAS                               | 2024  |       |       |       |       | 2025  |       |       |       |       | 2026  |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                         | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    | 2024  | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    | 2025  | Q1    | Q2    | YTD*  |
| Tembaga                                 | -4,7  | 16,8  | 11,2  | 12,8  | 8,8   | 10,3  | -4,3  | 5,6   | 19,2  | 7,5   | 36,7  | 39,7  | 30,4  |
| Batu Bara                               | -27,7 | -16,3 | 0,2   | -11,3 | -15,3 | -14,4 | -16,8 | -20,2 | -11,5 | -15,7 | 5,2   | 35,2  | 20,2  |
| CPO                                     | 0,5   | 6,2   | 5,2   | 31,3  | 10,5  | 17,1  | 0,3   | 6,9   | -14,0 | 1,7   | -10,7 | 11,4  | 0,3   |
| Karet                                   | 17,9  | 44,3  | 40,6  | 40,0  | 35,3  | 9,3   | -9,2  | -7,6  | -14,6 | -6,0  | -0,3  | 32,8  | 17,1  |
| Nikel                                   | -35,7 | -16,9 | -19,9 | -7,2  | -21,3 | -6,2  | -17,7 | -7,8  | -7,1  | -10,0 | 11,1  | 20,4  | 16,2  |
| Timah                                   | 0,2   | 25,3  | 16,5  | 23,4  | 16,7  | 21,0  | 0,5   | 7,0   | 24,8  | 12,8  | 52,2  | 56,0  | 44,5  |
| Aluminium                               | -8,2  | 12,3  | 10,0  | 16,9  | 7,4   | 17,1  | -3,9  | 8,1   | 9,3   | 7,4   | 21,8  | 44,2  | 25,6  |
| Kopi                                    | 7,1   | 19,9  | 55,9  | 65,7  | 36,4  | 100,7 | 63,9  | 36,9  | 31,0  | 54,1  | -16,7 | -19,6 | -17,0 |
| Lainnya                                 | -1,0  | -0,2  | 0,3   | 0,1   | -0,2  | -0,2  | 1,1   | 1,7   | 0,4   | 0,7   | 0,3   | 0,7   | 0,5   |
| Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia | -3,2  | 1,7   | 6,1   | 8,7   | 1,5   | 2,9   | -5,0  | -3,5  | -4,9  | -2,9  | 3,4   | 20,1  | 11,0  |
| Minyak (Brent)**                        | 83    | 85    | 80    | 75    | 81    | 76    | 68    | 69    | 64    | 69    | 81    | 117   | 93    |

\*\* Minyak dalam USD/barel, komoditas lain (% yoy)

Sumber: Bloomberg; \*) Data sampai 18 Mei 2026

Meskipun pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat, harga komoditas global diperkirakan masih terjaga pada level yang tetap tinggi pada tahun. Hal tersebut diperkirakan turut menjaga kinerja ekspor utama Provinsi Riau.

## 2. PROSPEK EKONOMI REGIONAL 2026

### 2.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2026

Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh stabil. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,4 – 5,2% (yoy, stabil dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar

4,79% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi RT. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan prospek ekonomi nasional, kinerja positif konsumsi swasta diperkirakan menjadi penopang utama ekonomi Riau di tahun 2026. Terjaganya daya beli masyarakat, yang didukung oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga terjaganya harga kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi Riau. Selain konsumsi swasta, PMTB diperkirakan meningkat seiring dengan





penyelesaian proyek Tol *Bypass* Pekanbaru dan peningkatan investasi swasta.

Secara sektoral, prospek ekonomi Riau yang lebih tinggi disebabkan oleh perbaikan kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja pada LU Pertambangan. Prospek ekonomi yang tetap positif juga mendorong kinerja LU sektor tersier, antara lain Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

### 2.1.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Permintaan

Untuk keseluruhan tahun 2026, kinerja ekonomi Riau dari sisi permintaan diperkirakan mengalami peningkatan, ditopang oleh perbaikan konsumsi swasta dan PMTB. Terjaganya daya beli masyarakat dengan peningkatan UMP di tengah stimulus fiskal diperkirakan akan meningkatkan konsumsi RT. Sejalan dengan itu, konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sehubungan dengan bencana Sumatera yang terjadi di akhir 2025.

Sementara itu, kinerja ekspor LN Riau diperkirakan masih tumbuh melandai pada tahun 2026. Akan tetapi, dengan peningkatan konsumsi swasta dan PMTB, diperkirakan impor di tahun 2026 akan meningkat dibandingkan 2025.

## KONSUMSI SWASTA

Prospek konsumsi swasta pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Riau. Kinerja konsumsi swasta Provinsi Riau diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi RT. Perbaikan pendapatan masyarakat diperkirakan sejalan dengan penyesuaian UMP sebesar 7,33%. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) pada Triwulan II 2026, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dalam 6 (enam) bulan mendatang masih berada pada rentang level optimis, meskipun lebih rendah

dari Tw. I 2026. Konsumsi LNPRT juga diperkirakan membaik seiring dengan realisasi 2025 yang rendah dan sebagai kelanjutan dari bencana Sumatera di akhir tahun 2025.

**Prospek positif konsumsi swasta juga didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia**, antara lain penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,75%, insentif pemerintah seperti bantuan pangan pada Bulan Ramadan & Idul Fitrifitri, peningkatan insentif & THR ASN, diskon tarif transportasi, diharapkan dapat memberikan insentif masyarakat untuk konsumsi RT. Selain itu, pertumbuhan konsumsi swasta pada keseluruhan tahun 2026 juga didukung oleh inflasi yang terjaga pada kisaran sasaran.

Optimisme konsumsi swasta juga tercermin dari ketenagakerjaan yang menunjukkan pengangguran yang berkurang. TPT Riau mengalami penurunan, menjadi 4,09% pada Februari 2026 dari 4,12% pada Februari 2025. Penurunan TPT tersebut mengindikasikan adanya tambahan jumlah serapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sumber serapan tenaga kerja tersebut juga termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan maupun mempersiapkan usaha. Selain itu, tingkat TPT Riau juga masih lebih rendah daripada TPT Nasional sebesar 4,68%

Meskipun demikian, konsumsi swasta Provinsi Riau pada tahun 2026 diperkirakan masih dibayangi perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tertahan, serta prospek pelambatan perdagangan internasional di tahun 2026.

## INVESTASI

Ke depan, kinerja investasi diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2026 terutama ditopang oleh investasi non-bangunan. Pertumbuhan investasi diperkirakan terutama bersumber dari investasi non-bangunan, investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya



aktivitas ekonomi domestik dan peningkatan ekspor luar negeri, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas. Investasi korporasi swasta di sektor industri pengolahan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi. Peningkatan kapasitas produksi oleh perusahaan sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik, terutama pada industri pengolahan CPO, serta peningkatan kapasitas industri pengolahan *pulp* dan kertas.

Namun demikian, kinerja investasi bangunan juga diperkirakan akan membaik seiring dengan penyelesaian konstruksi Tol *Bypass* Pekanbaru yang menjadi tahun 2026 dan pembangunan JTTS tahap selanjutnya.

#### KONSUMSI PEMERINTAH – FISKAL DAERAH

Pada tahun 2026, kinerja fiskal diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2025. Meskipun terdapat penurunan pagu belanja daerah APBD dari Rp9,58 triliun menjadi Rp8,3 triliun pada tahun 2026, penurunan pagu anggaran tersebut lebih landai dibandingkan tahun 2025, yaitu kontraksi 13,36% (yoy) pada 2026 dibandingkan 2025 yang terkontraksi 14,46% (yoy). Selain itu, penurunan pagu belanja utamanya terjadi pada belanja barang modal, dan belanja operasional relatif konsisten dengan 2025.

Akselerasi program elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan realisasi belanja di daerah.

#### EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA

Kinerja Ekspor Riau diperkirakan mengalami pelambatan, sejalan dengan proyeksi perdagangan global. Dari sisi eksternal, proyeksi penurunan perdagangan internasional dapat menekan permintaan negara mitra akan komoditas utama Riau seperti CPO & turunannya serta *Pulp & Paper*. Kompetisi harga dari produk substitusi *vegetable*

*oil* juga diperkirakan akan menyebabkan permintaan internasional akan CPO berkurang. Selain itu, potensi penurunan produksi TBS dan CPO yang disebabkan faktor produktivitas dan cuaca dapat menghambat ekspor Riau. Secara keseluruhan, prospek net ekspor di Riau berpotensi melandai di tahun 2026. Akan tetapi, dari sisi domestik, perdagangan antardaerah Riau diperkirakan membaik sejalan dengan prospek pergeseran ekspor luar negeri yang rendah meningkatkan porsi penjualan domestik.

Impor luar negeri diperkirakan mengalami percepatan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan impor barang modal untuk investasi dan barang konsumsi untuk menunjang konsumsi swasta. Akan tetapi, impor barang antara diperkirakan mengalami pelambatan.

Net Ekspor Antar Daerah diperkirakan tumbuh di tahun 2026. Dengan penurunan permintaan ekspor LN atas komoditas CPO dan turunannya, diperkirakan akan ada *shifting* pangsa ekspor antar daerah.

#### 2.1.2. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), untuk keseluruhan tahun 2026, seluruh LU diperkirakan relatif tumbuh positif. Sumber pertumbuhan ekonomi Riau pada 2026 berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor ekonomi tersier. Peningkatan kinerja LU tersebut utamanya ditopang oleh kinerja LU yang berorientasi ekspor. Selain itu kinerja sektor pertambangan diperkirakan akan melambat pada tahun 2026 sehingga diperkirakan dapat menahan perlambatan lebih dalam pada pertumbuhan ekonomi Riau.

#### LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian diperkirakan tumbuh moderat pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025, terutama bersumber dari subsektor perkebunan kelapa sawit. Produktivitas perkebunan Riau yang tetap terjaga dikarenakan upaya peremajaan yang



telah dilakukan, serta kebutuhan bahan baku CPO dan biodiesel diperkirakan menopang pertumbuhan LU Pertanian pada tahun 2026. Di sisi lain, ruang akselerasi LU Pertanian tetap dibatasi oleh risiko cuaca, produktivitas tanaman, dan perkembangan harga TBS serta komoditas perkebunan.

Program *replanting* yang masih berlangsung diperkirakan akan mendorong peningkatan produktivitas komoditas kelapa sawit. Lebih lanjut, meningkatnya luas tanaman yang menghasilkan setelah *replanting* dan intensifikasi lahan turut mendorong tumbuh tingginya kinerja LU Pertanian.

### LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan di Riau pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh moderat. Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan akan tetap ditopang oleh industri berbasis CPO seiring peningkatan permintaan ekspor. Selain itu, tingginya permintaan domestik, seiring berlanjutnya program B50 yang diimplementasikan pada 1 Juli 2026 sebagai implementasi program *biofuel* nasional yang menjadi upaya Pemerintah RI dalam menargetkan Indonesia bebas impor bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2027, diperkirakan akan menopang permintaan CPO.

### LU Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan tumbuh melambat di tahun 2026. Dengan penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan kegiatan eksplorasi & produksi di tahun 2026, diperkirakan hal tersebut akan menahan perlambatan yang lebih dalam pada LU Pertambangan.

Berlanjutnya *natural declining* migas, serta *unplanned shut down* yang terjadi menahan pertumbuhan yang lebih tinggi. *Natural declining* migas yang diperkirakan sekitar 8–12% setiap tahunnya dan *unplanned shutdown* membayangi pertumbuhan LU Pertambangan yang lebih tinggi.

### LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif. LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional, serta proyek swasta korporasi, maupun rumah tangga. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis oleh Pemerintah, serta proyek pembangunan oleh Pemda. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta Kawasan Industri Tenayan (KIT) dan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Akan tetapi, penurunan APBD pemerintah daerah dapat menghambat pertumbuhan LU konstruksi terkait proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah.

### LU Perdagangan

Secara keseluruhan tahun 2026, kinerja LU Perdagangan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjaganya daya beli konsumsi rumah tangga yang sejalan dengan kenaikan pendapatan, masih tingginya permintaan, peningkatan UMP, serta bantuan pangan, dan optimalisasi MBG di tahun 2026 diperkirakan menjadi faktor utama tetap tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan di tahun 2026.

Akan tetapi, perubahan pola pengeluaran masyarakat yang memprioritaskan pengalaman seperti wisata, serta tren pelambatan penyaluran kredit konsumsi, dan tekanan daya beli apabila harga komoditas utama melemah dapat menahan pertumbuhan LU Perdagangan yang lebih tinggi.

### LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

Pertumbuhan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan *Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibition* (MICE) berskala besar yang terus bertambah, mobilitas masyarakat, HBKN dan



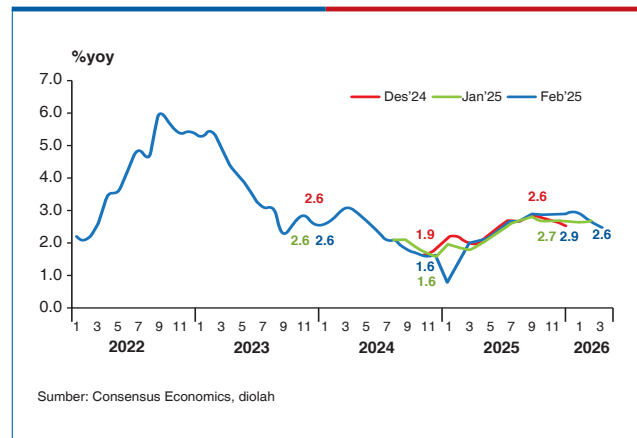
musim liburan, serta peningkatan konektivitas penerbangan. Hal tersebut terindikasi dari perbaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang yang lebih tinggi pada Triwulan II 2026 dibandingkan Triwulan I 2026.

Di sisi lain, penurunan pagu belanja Pemerintah Daerah dapat menahan pertumbuhan LU Akmamin. Pemotongan anggaran belanja untuk kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan perjalanan dinas dapat menghambat pertumbuhan LU Akmamin di tahun 2026.

## 2.2. Prospek Inflasi Provinsi Riau 2026

Inflasi global pada 2026 diperkirakan masih menghadapi tekanan di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* Juli 2026 memprakirakan inflasi global meningkat menjadi 4,7% pada 2026, sebelum kembali menurun menjadi 3,9% pada 2027. Peningkatan tekanan inflasi pada 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan seiring berlanjutnya konflik di Timur Tengah dan gangguan pasokan global. Perkembangan tersebut menyebabkan tren disinflasi global yang berlangsung sejak awal 2024 tertahan sementara.

Sejalan dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia tetap memandang positif inflasi IHK nasional pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran  $2,5 \pm 1\%$ , meskipun risiko tekanan harga masih perlu dicermati. Terkendalinya inflasi nasional turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dalam menjaga ekspektasi inflasi, kebijakan fiskal, dan sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Selain itu, efektivitas upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan, ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, serta dampak positif digitalisasi.



Grafik 6.4. Ekspektasi Inflasi

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, inflasi Provinsi Riau pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, sejumlah risiko peningkatan harga yang perlu dicermati baik dari sisi eksternal maupun domestik yakni; (i) gejolak harga energi dan komoditas global; (ii) gejolak nilai tukar Rupiah, yang berpotensi meningkatkan tekanan *imported inflation* pada bahan pangan, energi, dan bahan baku industri; (iii) kenaikan harga pangan strategis akibat gangguan pasokan antarwilayah dan peningkatan permintaan pada periode HBKN; serta (iv) gangguan produksi dan distribusi akibat kondisi cuaca yang lebih kering dan risiko karhutla. Kendati demikian, tekanan inflasi diperkirakan dapat dimitigasi melalui penguatan upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan oleh TPIP dan TPID melalui implementasi program GPIPS 2026. Selain itu, perkembangan digitalisasi di Provinsi Riau diharapkan turut mendukung efisiensi transaksi, distribusi, dan pemantauan harga. Tekanan harga yang berasal dari barang dan jasa yang tarifnya diatur oleh pemerintah diperkirakan meningkat secara terbatas, seiring dengan kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas beberapa tarif strategis, antara lain tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir.



### 3. RISIKO

Kondisi perekonomian Riau masih dibayangi beberapa risiko (*downside risk*), di antaranya diperkirakan berasal dari: (i) komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang dipengaruhi oleh prospek harga komoditas internasional yang mengalami perlambatan, volume perdagangan dunia yang termoderasi lebih dalam, serta eskalasi ketegangan geopolitik yang memengaruhi transaksi perdagangan dan harga komoditas global; (ii) Faktor cuaca kering ekstrim dan risiko karhutla yang berpotensi mengganggu aktivitas produksi, distribusi serta mobilitas masyarakat; (iii) peningkatan biaya logistik internasional, termasuk biaya *freight* kapal, akibat perubahan rute pelayaran sebagai dampak ketegangan geopolitik; serta (iv) penurunan produksi karet akibat berkurangnya pasokan bahan baku, seiring alih fungsi lahan karet menjadi kelapa sawit oleh sebagian petani dan pelaku usaha.

Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih baik, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus mendorong stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal, serta bersinergi erat dengan Pemerintah Daerah dan otoritas terkait. Beberapa upaya akan terus dilakukan dalam mendorong kinerja ekonomi Riau, antara lain:

1. **Penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.** Hal ini dilakukan agar investasi pada produk turunan komoditas utama Riau dapat lebih beragam dan mengarah pada produk konsumsi yang bernilai tambah tinggi.
2. **Dukungan atas penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas dan ketersediaan energi, terutama pada kawasan industri, yang ditopang oleh instrumen tata ruang, perizinan, dan insentif pajak daerah.** Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan peningkatan alokasi belanja Pemerintah Daerah

untuk pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.

3. **Optimalisasi anggaran melalui percepatan realisasi anggaran yang tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.** Aktivitas konsumsi pemerintah akan berdampak luas terhadap elemen perekonomian di Riau. Alokasi anggaran yang tepat guna dapat mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor produksi. Selain itu, pentingnya mendorong pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah seperti melalui program wakaf produktif terutama pada proyek-proyek infrastruktur strategis.
4. **Mengembangkan sumber pertumbuhan baru yang diarahkan pada sektor pariwisata dan UMKM.** Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM dapat dilakukan melalui (i) pengembangan desa wisata; (ii) penguatan dan integrasi database pelaku UMKM; (iii) penguatan dan korporatisasi UMKM; (iv) pengembangan model bisnis UMKM berbasis *halal value chain*; (v) Pelatihan dan pendampingan digitalisasi bagi UMKM agar dapat naik kelas; serta (vi) pendampingan dan fasilitasi UMKM melalui *business matching* dan promosi perdagangan di dalam dan/atau luar negeri.
5. **Meningkatkan transaksi ekonomi melalui sistem pembayaran nontunai.** Tren digitalisasi yang meningkat harus dimanfaatkan dalam menciptakan perekonomian yang lebih efisien, termasuk dalam lingkup pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong elektronifikasi dan transaksi digital, yaitu pemanfaatan kanal pembayaran digital pada pembayaran pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Dari sisi inflasi, koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan mitra strategis lainnya melalui kerangka Tim Pengendalian



Inflasi Daerah (TPID) serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali dalam sasaraannya pada tahun 2026.

**Upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat oleh TPID Riau pada tahun 2026, melalui:**

1. **Optimalisasai Peran BUMD Pangan Riau**

Mendorong peran kelembagaan melalui BUMD pangan PT. Riau Pangan Bertuah dengan **Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN) dan Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling (TOPLING)** yang dapat berperan dalam mengelola stok komoditas pangan strategis, menjadi *offtaker* atau pembeli komoditas dari daerah pemasok. Ke depan, model kelembagaan dan operasional BUMD Pangan tersebut dapat diadaptasi juga oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya, peran BUMD pangan juga perlu didukung oleh seluruh OPD terkait, termasuk memfasilitasi *linkage* kemitraan dengan industri, dan pemanfaatan *cold storage* untuk penyimpanan komoditas pangan.

2. **Penguatan kerjasama antardaerah (KAD) yang ditindaklanjuti dengan transaksi berkelanjutan setelah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS), baik yang bersifat *Government to Government* (G2G) maupun *Business to Business* (B2B), serta disinergikan dengan Fasilitas Distribusi Pangan dan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/SPHP.**

3. **Pembentukan dan Perluasan Kios Pangan Pengendali Inflasi**

TPID Riau akan menambah Kios Pengendalian Inflasi Terkendali. Selain itu, memperkuat skema Pasar Tani yang melibatkan petani untuk

langsung berjualan di Pasar Murah, dengan harga jual di atas harga jual ke distributor/pengepul namun masih di bawah harga jual pasar.

4. **Program OPSI PADI RIAU Dukungan Ketahanan Pangan Riau**

Dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Nasional (SPN), serta upaya mengatasi defisit neraca pangan di Provinsi Riau, TPID Riau mencanangkan Program Optimalisasi Produksi Padi (OPSI) Riau Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan Riau. Pada tahun 2026, OPSI PADI Riau mencanangkan peningkatan produksi padi seluas 50.000 ha, terdiri dari peningkatan indeks pertanaman seluas 30.000 ha, peningkatan produktivitas seluas 10.000 ha, rehabilitasi sawah terlantar seluas 5.000 ha, dan cetak sawah baru seluas 5.000 ha. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau, luas panen padi Riau pada tahun 2025 mencapai 59,50 ribu ha dengan produksi sebesar 232,07 ribu ton GKG atau setara 133,19 ribu ton beras. Memasuki tahun 2026, produksi padi Riau pada triwulan I 2026 tercatat sekitar 86,81 ribu ton GKG, dengan produksi tertinggi terjadi pada Maret 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya momentum perbaikan produksi pada awal tahun, namun kesinambungan produksi tetap perlu dijaga mengingat produksi padi berpotensi melandai setelah periode puncak panen.

Secara umum, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penahan inflasi tahun 2026 yang perlu dicermati sebagai berikut:



Tabel 6.3. Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Riau Tahun 2026

| Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Faktor Penahan Inflasi Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Defisit neraca pangan mendorong tingginya ketergantungan pada pasokan daerah lain</li><li>Potensi peningkatan Indeks Harga <i>Imported Inflation</i> (IHIM) Pangan yg memengaruhi <i>imported inflation</i></li><li>Gangguan produksi di daerah pemasok akibat faktor cuaca, termasuk kondisi yang lebih kering dan risiko karhutla.</li><li>Gejolak harga energi dan komoditas global, termasuk CPO dan emas, yang berpotensi memengaruhi harga minyak goreng dan emas perhiasan.</li><li>Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2026 sebesar 7,74% dibandingkan 2025</li><li>Pola musiman kenaikan sewa rumah, kontrak rumah, pendidikan, mobil tahunan</li><li>Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN &amp; libur sekolah</li><li>Penyesuaian harga energi, termasuk BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan avtur, yang dapat berdampak pada biaya transportasi dan distribusi.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi peran BUMD Pangan Riau melalui PT Riau Pangan Bertuah, TOPAN, dan TOPLING sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li><li>Menerapkan <i>early warning system</i> sebagai indikator <i>pre-emptive</i> saat terjadi lonjakan harga pada komoditas pangan strategis</li><li>Replikasi dan adaptasi model bisnis BUMD Pangan Provinsi Riau oleh Kabupaten/ Kota sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.</li><li>Efektivitas program TPID dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi pangan.</li><li>Penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Kerja Sama Antar Daerah (KAD).</li><li>Peningkatan program OPSI PADI Riau untuk meningkatkan produksi padi Riau 2026</li><li>Kebijakan moneter yang bersifat <i>pre-emptive</i> dan <i>forward looking</i> guna menjaga inflasi inti ke dalam target sasaran.</li><li>Ekspektasi inflasi yang terjaga</li><li>Diskon tarif angkutan udara pada periode HBKN Idulfitri 2026 dan Nataru 2026</li></ul> |

# Daftar Istilah

## *Administered Price*

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

## *Base Effect*

Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

## *BEC*

Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

## *Barang Modal (Capital Goods)*

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

## *BI 7 Day Reverse Repo Rate*

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

## *BI-RTGS*

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

## *CPO (Crude Palm Oil)*

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.



---

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

---

Dana yang diterima perbankan dari masyarakat, berupa giro, tabungan atau deposito.

---

### Ekspor dan Impor

---

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

---

### *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

---

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

---

### Inflasi

---

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).

---

### Inflasi Inti

---

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat dan permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

---

### Inflow

---

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

---

### Kredit

---

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

### Kredit Investasi

---

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin

---

### Kredit Modal Kerja

---

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

---

## Kredit Konsumsi

---

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

---

## Kredit Usaha Rakyat (KUR)

---

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

---

## Kliring

---

Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

---

## Kliring Debet

---

Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaraan kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di Kantor Pusat Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

---

## Kliring Kredit

---

Kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di Kantor Pusat Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

---

## Liaison

---

Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

---

## Loan to Deposit Ratio (LDR)

---

Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan, dan deposito).

---

## Net Interest Income (NTI)

---

Pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.



### Nilai Tukar Petani (NTP)

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

### Non Core Deposit (NCD)

Dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan, dan 10% deposito berjangka waktu 1–3 bulan.

### Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

### Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

### PDRB Riil

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

### Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

### Quarter to quarter (qtq)

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan sebelumnya.

### Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Ls terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Ls, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan.

### Rasio Non Performing Loans (NPLs) - Net

Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit.



---

### Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

---

Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

---

### Survei Konsumen

---

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

---

### Survei Penjualan Eceran

---

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

---

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

---

Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

---

### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

---

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

---

### Uang Kartal

---

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

---

### *Volatile Food*

---

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

---

### *Year on year (yoy)*

---

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek seasonal yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal Hari Besar Keagamaan Nasional, tahun ajaran baru, dsb).



## Tim Penyusun

### Pengarah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

**Panji Achmad**

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau:

**Syachman Perdymer**

### Editor

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi Sumatera Utara

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

**Franciskus Arnold Sitanggang**

### Kontributor

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi:

Hafidh Jati Husodo  
Muhammad Reza Alif Santoso  
Naufal Muhammad  
Annisa Rahma Lubis  
Calica Rosnaomi Lumbanraja





*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**BANK INDONESIA**

Jl. Jend. Sudirman No. 464  
Pekanbaru - Riau